



KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

📍 Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Jakarta Selatan 12940
📞 1500 587
✉ info@kemenkopukm.go.id
🌐 www.kemenkopukm.go.id

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA sehingga Deputy Bidang Perkoperasian mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian dan pada akhirnya tersusun Laporan Kinerja Tahun 2023 ini. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian visi dan misi terhadap penggunaan anggaran tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang ada berdasar perencanaan strategis yang telah disusun.



Hasil pencapaian tugas dan fungsi Deputy Bidang Perkoperasian tahun 2023, seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan program/kegiatan prioritas secara umum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Capaian tersebut, tidak hanya mendukung peran Kementerian Koperasi dan UKM, namun sekaligus upaya pencapaian target-target nasional sebagaimana RPJMN 2020-2024. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa masih perlu penyempurnaan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan untuk perbaikan ke depannya.

Akhir kata, terima kasih atas dukungan seluruh pihak terkait dalam pencapaian kinerja sehingga dapat terjadi optimalisasi peran perkoperasian untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Koperasi untuk Indonesia Maju!

Jakarta, Januari 2024

Deputy Bidang Perkoperasian

Ahmad Zabadi

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perkoperasian merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program tahun 2023. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja tahun ketiga berdirinya Deputy Bidang Perkoperasian dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024.

Deputy Bidang Perkoperasian memiliki 4 (empat) sasaran program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja program dengan capaian sebagai berikut:

- Persentase Koperasi berkualitas target 7,5% capaian 8,63% atau 115,07% dari target yang ditentukan
- Pertumbuhan volume usaha koperaasi target 5% capaian 0,82% atau 16,47% dari target yang ditentukan
- Jumlah Koperasi modern target 150 unit Koperasi capaian 150 unit Koperasi atau 100% dari target yang ditentukan
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik perkoperasian target 80% capaian 87,23% atau 109,04% dari target yang ditentukan
- Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya target 70% capaian 75,39% atau 115,98% dari target yang ditentukan
- Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi target 75% capaian 88,67% atau 118,22% dari target yang ditentukan
- Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB target Nilai 34 capaian 34,2 atau tercapai 100,59%
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Perkoperasian target nilai 85 capaian nilai 88,59 atau 104,22% dari target yang ditentukan.
- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputy Bidang Perkoperasian target nilai 85 capaian nilai 87,55 atau 103% dari target yang ditentukan.

Secara keseluruhan target kinerja telah tercapai dengan rerata capaian 117,88%. Hal ini tentunya berkat komitmen dan kerja bersama di jajaran Deputy Bidang Perkoperasian.

Demi mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi, pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai perbaikan berdasarkan rekomendasi baik evaluasi mandiri maupun dari inspektorat ataupun Kementerian PAN dan RB melalui berbagai penyempurnaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas

kebijakan, dan penerapan *good governance* dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien, yaitu:

- a. Menyempurnakan proses bisnis dan cascading indikator kinerja dari level Menteri sampai dengan individu serta mekanisme pemantauannya.
- b. Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam mensinkronkan berbagai program perkoperasian dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pembina Koperasi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif dan penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi.
- c. Meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan penyusunan konsep sistem *reward and punishment* dari kehadiran pegawai dan penilaian atasan melalui e-kinerja.
- d. Pemantauan capaian kinerja pegawai oleh atasan langsung setiap bulanannya.
- e. Mengoptimalkan fungsi pengendalian program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sesuai target.
- f. Memperbaiki Laporan Kinerja sesuai rekomendasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022.

DAFTAR ISI

+ Kata Pengantar.	ii
+ Ikhtisar Eksekutif	iii
+ Daftar Isi	v
+ Daftar Tabel	vi
+ Daftar Gambar.....	vii
+ BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.	1
C. Profil Organisasi	2
D. Kondisi Eksisting <i>Customer</i>	11
E. Sistematika Penyajian Laporan	12
+ BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Stretegis Tahun 2020-2024.	14
B. Sasaran Strategis Tahun 2020-2024	16
C. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2023	17
D. Program dan Anggaran Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2023	18
+ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	21
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	48
+ BAB IV PENUTUP.....	52
+ LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Sebaran PNS Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan Jabatannya Tahun 2023.	4
Tabel 1.2	Sebaran PNS Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	6
Tabel 1.3	Pegawai Non PNS Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	8
Tabel 1.4	Sebaran Pegawai Deputy Bidang Perkopersian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	9
Tabel 1.5	Data Pengelolaan JFPK Tahun 2023	10
Tabel 1.6	Data Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2020 s.d. 2023 ..	11
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Deputy Bidang Perkoperasian Tahun 2021-2024..	16
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Deputy Bidang Perkoperasian Tahun 2023.....	18
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Perkoperasian Tahun 2023.....	20
Tabel 3.2	Capaian Koperasi Berkualitas Tahun 2023	22
Tabel 3.3	Peringkat Kesehatan Koperasi Indonesia Tahun 2020 s.d 2023	23
Tabel 3.4	Perbandingan Volume Usaha Koperasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 s.d 2023	27
Tabel 3.5	Perbandingan Volume Usaha dan Jumlah Anggota Koperasi Indonesia dengan Dunia.....	27
Tabel 3.6	Capaian Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 s.d. 2023,.....	35
Tabel 3.7	SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya Tahun 2021 s.d. 2023	37
Tabel 3.8	Capaian Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi Tahun 2021 s.d. 2023	39
Tabel 3.9	Nilai Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	40
Tabel 3.10	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB Tahun 2020 s.d.2023.....	41
Tabel 3.11	Nilai Unsur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB Tahun 2023	41
Tabel 3.12	Nilai IKPA Deputy Bidang Perkoperasian Tahun 2020 s.d. 2023	43
Tabel 3.13	Nilai EKA Deputy Bidang Perkoperasian Tahun 2020 s.d. 2023.....	45
Tabel 3.14	Capaian Realisasi Anggaran Deputy Bidang Perkoperasian Tahun 2023.....	48
Tabel 3.15	Dukungan Anggaran terhadap Indikator Kinerja Tahun 2023	48

Daftar Gambar

Gambar 1	Kunjungan Kerja ke Lokasi Calon Pabrik Minyak Makan Merah di Koperasi Produsen Karya Sawit Mandiri Jaya, Kalimantan Tengah.....	viii
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Perkoperasian	3
Gambar 1.2	Komposisi PNS Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 1.3	Keragaan Koperasi di Indonesia	11
Gambar 2	Kunjungan ke Lokasi Piloting Program Solusi (Solar untuk Koperasi) Nelayan, Nusa Tenggara Barat.....	19
Gambar 3.1	Tren Capaian Koperasi Berkualitas Tahun 2020 s.d. 2023.....	21
Gambar 3.2	Capaian/Tren Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun 2020 s.d. 2023	26
Gambar 3.3	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 2020 s.d. 2023.....	26
Gambar 3.4	Tren Capaian Jumlah Koperasi Modern 2021 s.d. 2023.....	29
Gambar 3.5	Tingkat Kepuasan Koperasi terhadap Program Pendampingan Koperasi Modern	31
Gambar 3.6	Tingkat Kebermanfaatan Program Koperasi Modern.....	32
Gambar 3.7	Tren Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 s.d. 2023	32
Gambar 3.8	Tren Persentase SDM Perkoperasian yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Tahun 2021 s.d. 2023.....	36
Gambar 3.9	Tren Capaian Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi Tahun 2021 s.d. 2023.....	38
Gambar 3.10	Tren Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 s.d. 2023.....	40
Gambar 3.11	Persentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021 s.d 2023	43
Gambar 3.12	Persentase Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021 s.d. 2022	45
Gambar 3.13	Kepuasan Koperasi terhadap Output Pendampingan Koperasi Modern.....	47
Gambar 4	Grand Opening Pengembangan Unit Usaha Ritel Koperasi Karyawan PT Adis Dimension Footwear	51



Gambar 1. Kunjungan Kerja ke Lokasi Calon Pabrik Minyak Makan Merah di Koperasi Produsen Karya Sawit Mandiri Jaya, Kalimantan Tengah 26 Mei 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan hidup berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu serangkaian upaya terpadu dari seluruh unit kerja khususnya dalam hal pendayagunaan aparatur negara. Komitmen untuk melakukan perubahan pola pikir dan kultur aparatur negara untuk menciptakan sistem produktivitas dan kinerja yang optimal. Untuk itu, diperlukan sistem perencanaan dan evaluasi yang tepat dan akurat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, pembinaan hukum, pengelolaan kehumasan yang optimal, serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Deputy Bidang Perkoperasian proaktif menyempurnakan sistem dan iklim kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel serta menerapkan prinsip pengelolaan organisasi pemerintahan yang berorientasi pada manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perkoperasian. Hal ini secara tertulis dibuktikan salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Perkoperasian yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja akan diuraikan mengenai sejarah suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

C. Profil Organisasi

Tugas dan Fungsi

- Perumusan kebijakan
- Koordinasi kebijakan
- Sinkronisasi kebijakan
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- pelaksanaan administrasi
- penugasan lain yang diberikan oleh Menteri

Lingkup Tugas

- Pembaruan dan Kemitraan Perkoperasian,
- Akses pembiayaan dan Pelindungan Koperasi
- Pengawasan Koperasi
- Pengembangan SDM Perkoperasian
- Pengelolaan Jabatan Fungsional
- Penguatan Kelembagaan dan Tata Koperasi

Obyek

KOPERASI
130.119 Koperasi

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM dan ODS Kementerian Koperasi dan UKM Per 31 Desember 2023

Deputi Deputi Bidang Perkoperasian merupakan Deputi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian. Deputi Bidang Perkoperasian di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Perkoperasian mempunyai fungsi, yaitu:

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
- ❖ koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
- ❖ pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi,

pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi;

- ❖ penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang izin usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- ❖ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang izin usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- ❖ pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Perkoperasian; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Perkoperasian



Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM, struktur Deputy Bidang Perkoperasian mengalami penambahan dari semula terdiri dari 5 (lima) Eselon II menjadi 6 (enam) Eselon II, hal ini mempertimbangkan bahwa keefektifan penyelenggaraan urusan penguatan kelembagaan dan tata kelola Koperasi yang tidak efektif apabila menjadi satu dengan penyelenggaraan pengawasan Koperasi mengingat ruang lingkup keduanya luas dan keduanya memerlukan fokus dan perhatian lebih intens yang tidak memungkinkan dilakukan oleh Pejabat Administrasi atau setingkat Eselon III.

Deputy Bidang Perkoperasian mempunyai telah melakukan mempunyai kekuatan pegawai yang terdiri dari Pejabat telah menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Fungsional Pengawas Koperasi hanya ditempatkan di Asdep Pengawasan Koperasi dan Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional agar mempermudah memperoleh angka kredit berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Perubahan lainnya sesuai rekomendasi tahun 2022 adalah penempatan fungsional umum atau pelaksana sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan atau nomenklatur unit kerjanya, pegawai yang aktif bekerja di unit lain sudah dilakukan pemindahan legalitas dan penambahan unit kerja Eselon II di Deputy Bidang Perkoperasian yang ditindaklanjuti dengan dikukuhkannya Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi melalui.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Deputy Bidang Perkoperasian tahun 2023 sebanyak 151 orang berkurang 7 orang pension dari tahun 2022.

Tabel 1.1. Sebaran PNS Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan Jabatannya Tahun 2023

Jabatan	Deputi	Sesdep	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
Eselon I	1						
Eselon II		1	1	1	1	1	1
Eselon III		2	2	2	2	2	2
Eselon IV		3					
Pengawas Koperasi Ahli Utama					3	1	
Arsiparis Ahli Madya		1					
Analisis Kebijakan Ahli Madya			1	2			2
Pengawas Koperasi Ahli Madya					9	4	
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya						1	

Jabatan	Deputi	Sesdep	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
Analisis Anggaran Ahli Muda		1					
Arsiparis Ahli Muda		1					
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		2					
Analisis Kebijakan Ahli Muda			7	3	1		2
Pengawas Koperasi Ahli Muda				1	10	7	3
Pengawas Koperasi Ahli Pertama						11	
Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Muda						1	
Perencana Ahli Pertama				1			
Arsiparis Pertama		1					
Pranata Komputer Ahli Pertama		3					
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama		1					
Pengawas Koperasi Ahli Pertama					1		5
Arsiparis Terampil		2					
Analisis Manajemen Resiko		2					
Analisis Rencana Program dan Kegiatan		1					
Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1					
Analisis Layanan Umum		1		1			
Pengadministrasian Kepegawaian		2					
Analisis Perbendaharaan		1					
Analisis Penagihan		1					
Verifikator Keuangan		1					
Pengadministrasian Perkantoran		1					
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Keuangan			2	1	1		
Analisis Koperasi			2	2		1	1
Penyuluh Koperasi						1	
Penyusun Bahan Bimbingan Teknis			2	1	1	1	
Pranata Koperasi			1				

Jabatan	Deputi	Sesdep	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi			1				
Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi			1				
Pengelola Kegiatan dan Anggaran			1	1		3	1
Analisis Strategi Pembiayaan				2			
Analisis Diklat						1	
Analisis Pengembangan Jabatan						1	
Jumlah	1	29	21	18	29	36	17

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Keterangan:

- Sesdep : Sekretaris Deputi
- Asdep 1 : Asdep Pembaruan dan Kemitraan Perkoperasian
- Asdep 2 : Asdep Pembiayaan dan Pelindungan Koperasi
- Asdep 3 : Asdep Pengawasan Koperasi
- Asdep 4 : Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional
- Asdep 5 : Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa komposisi terbesar pegawai berada pada Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional sebanyak 36 orang (23.84%) karena sebagian besar PNS di unit tersebut adalah eks PNS Deputi Bidang Pengawasan yang mengalami penyetaraan menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK). Kemudian dukungan jumlah PNS terbanyak kedua adalah Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional sebanyak 44 orang (28%) dan jumlah PNS terkecil terkecil adalah Asdep Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian sebanyak 15 orang (9%). Apabila melihat jumlah tersebut seharusnya Asdep Pengawasan Koperasi lebih optimal dalam mencapai target kinerja.

Dukungan sumber daya tersebut juga dilengkapi dengan tingkat pendidikan yang memadai, yakni jenjang tertinggi (Strata 3/S3) berada pada Asdep Pengawasan Koperasi, begitu juga dengan jumlah pegawai Strata 2/S2 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2. Sebaran PNS Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

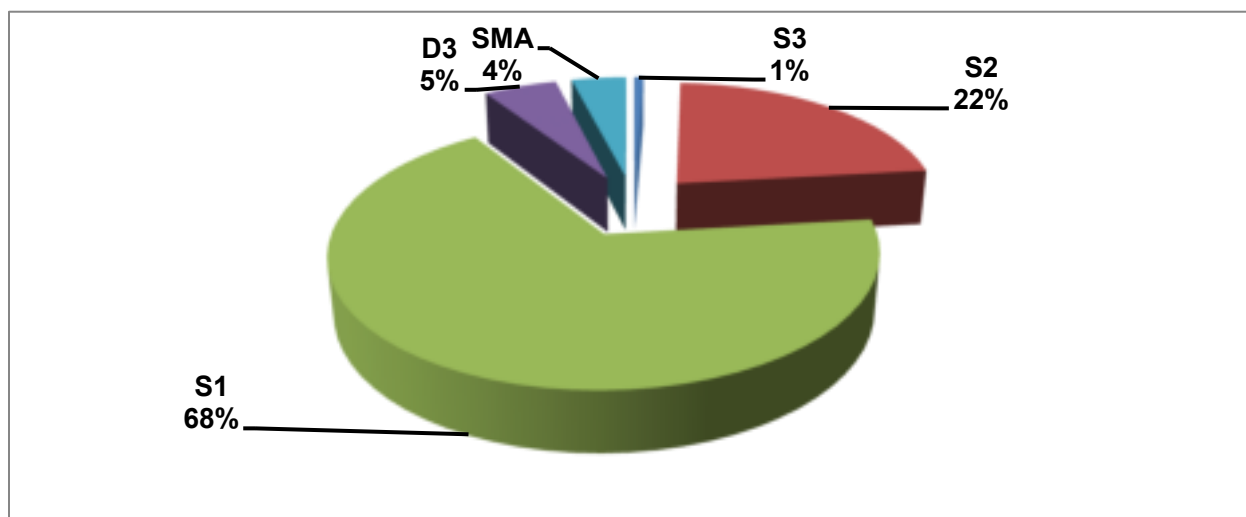
Tingkat Pendidikan	Deputi	Sesdep	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
S3	-	-	-	-	1	-	-
S2	1	6	6	2	10	6	3

Tingkat Pendidikan	Deputi	Sesdep	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
S1	-	17	12	14	17	29	13
D3	-	3	2	1	1	1	-
SMA	-	3	1	1	-	-	1
Jumlah	1	29	21	18	29	36	17

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Komposisi tingkat pendidikan PNS Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kompisisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

terbanyak adalah S1/Sarjana (68%), diikuti dengan S2 (22%), Diploma 3 (5%), SMA (4%) dan S3 (1%). Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari tingkat Pendidikan, PNS Deputi Bidang Perkoperasian cukup berkemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Upaya efektivitas pegawai yang dilakukan Deputi Bidang Perkoperasian, yaitu:

1. Penyusunan SKP di awal tahun dan pengisian SKP on-line yang di-review setiap bulannya semenjak tahun 2019;
2. Penyusunan perjanjian kinerja cascading s.d. Staf, agar para pegawai berkomitmen untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
3. *Review* permasalahan pegawai dan pekerjaan (kinerja) melalui rapat staf setiap tahunnya.
4. Memotivasi pegawai untuk menerapkan disiplin melalui sosialisasi terkait Kinerja dan Disiplin Pegawai dengan mengundang Pejabat dari Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembicara.

Upaya lainnya adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, berupaya menerapkan disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan, yaitu:

1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Hasilnya pada tahun 2023 tidak ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan.

Selain SDM berupa PNS, terdapat tenaga Non PNS sebanyak 40 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pegawai Non PNS di Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

TK Pendidikan	SESDEP	ASDEP 1	ASDEP 2	ASDEP 3	ASDEP 4	ASDEP 5
S2	0	1	0	0	0	0
S1	11	5	4	1	5	4
D3	1	0	1	0	1	0
SLTA	5	0	0	1	0	1
Jumlah	17	6	5	2	6	5

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Keterangan:

- Sesdep : Sekretaris Deputi
- Asdep 1 : Asdep Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
- Asdep 2 : Asdep Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian
- Asdep 3 : Asdep Pengawasan Koperasi
- Asdep 4 : Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional
- Asdep 5 : Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai non PNS terbanyak di Sekretariat Deputi dan terkecil di Asdep Pengawasan Koperasi, dan apabila dijumlahkan, maka komposisi dukungan sumber daya manusia di setiap unit berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Sebaran Pegawai di Deputi Bidang Perkopersian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Sesdep	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
S3	0	0	0	1	0	0
S2	6	7	2	10	6	3
S1	28	17	18	18	34	17
D3	4	2	2	1	2	0
SMA	8	1	1	2	0	2
Jumlah	46	27	23	32	42	22

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Dari gambaran di atas, apabila ditinjau dari tingkat pendidikan maka komposisi tingkat pendidikan tertinggi adalah Asdep Pengawasan Koperasi dan terendah adalah Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi. Sebaran jumlah SDM di Deputi Bidang Perkoperasian tidak merata. Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola merupakan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini tentunya membutuhkan analisis beban kerja dan redistribusi SDM. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam mencapai sasaran kinerja.

Capaian

Terbangunnya sistem data based pegawai Deputi Bidang Perkoperasian yang dapat diakses melalui <https://msha.ke/layan anumum>.

Tindak lanjut tahun sebelumnya

1. Terbentuknya struktur atau nomenklatur baru di Deputi Bidang Perkoperasian, yakni Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi.
2. Penyesuaian penempatan JFU sesuai nama jabatannya.

Permasalahan/kendala

1. Komposisi pegawai yang tidak merata di setiap unit kerja.
2. Distribusi pekerjaan yang tidak merata.

Faktor pendukung

1. Kerja sama yang baik sehingga program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.
2. Komitmen menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.

Solusi dan tindak lanjut yang diperlukan

1. Keberlanjutan telaah kebutuhan pegawai sesuai beban kerja masing-masing unit Eselon II untuk penempatan jumlah pegawai di unit tersebut.
2. Pegawai yang aktif bekerja di unit lain, agar legalitas kepindahannya segera diselesaikan.

Disamping itu, Deputi Bidang Perkoperasian juga menyelenggarakan pengelolaan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional. Adapun jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (PFPK) seluruh Indonesia sebanyak 1.171 orang dengan rincian 64 orang PFPK Pusat dan 1.107 Daerah. Adapun pengelolaan kegiatan JFPK tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Data Pengelolaan JFPK Tahun 2023

Data JFPK	Jumlah	
	Pusat	Daerah
Usulan Perpindahan	0	50
Jumlah rekomendasi tahun 2023	0	36
Jumlah pelantikan tahun 2023	0	2
Jumlah yg mengundurkan diri	0	0
Jmh Pengajuan Angka Kredit (AK) Januari-Juni 2023	231	
Jmh Penetapan AK Januari-Juni 2023	231	

Sumber: Data diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023

Note: Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa mulai bulan Juli 2023 penilaian angka kredit menggunakan hasil konversi penilaian predikat kinerja pegawai dan untuk dokumen penilaian dan penetapan angka kredit di ttd oleh Pejabat Penilai Kinerja masing-masing instansi

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hanya 7 usulan perpindahan dari daerah yang mendapatkan rekomendasi karena persyaratannya tidak terpenuhi. Hal lainnya yang dilakukan dalam rangka pengelolaan JFPK adalah:

1. Draft Penyusunan Penulisan Karya Tulis Ilmiah
2. Draft Penyusunan Pedoman Penilaian Angka Kredit (amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/ Peraturan Menteri PAN & RB nomor 43 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi);
3. Draft Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (amanat Peraturan Menteri PAN & RB nomor 43 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi);
4. Penyusunan draft Naskah Akademik perubahan Peraturan Menteri PAN & RB nomor 43 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.

D. Kondisi Eksisting

Secara umum, perkembangan koperasi nasional menunjukkan kinerja yang positif. Reformasi total koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi

terhadap PDB Nasional dari 3,99% pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,07% pada tahun 2022. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional yang dapat dilihat melalui peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp 67,50 triliun, naik 193,13% pada tahun 2022 menjadi Rp.197,86 triliun. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota, sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK), modal, dan aset.

Gambar 1.2 Keragaan Koperasi di Indonesia Per 31 Desember 2023

No	Provinsi	Koperasi		KAT	Jumlah Anggota	Jumlah Manajer	Jumlah Karyawan	Jumlah Tenaga Kerja	Modal Sendiri (Rp. Juta)	Modal Luar (Rp. Juta)	Aset (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp. Juta)	SMA (Rp. Juta)
		Aktif (NIK)	Sertifikasi NIK										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	4.181	742	887	146.018	137	913	13.593	621.545,26	356.382,61	1.039.841,77	1.037.052,03	60.536,57
2	Bangka Belitung	5.482	1.543	1.499	1.495.208	233	4.541	21.217	5.285.620,47	3.126.744,72	8.565.641,93	5.383.351,34	349.178,97
3	Bangka Barat	2.275	1.545	1.493	274.633	323	8.640	10.788	3.578.095,60	2.027.375,63	5.727.496,33	3.707.635,10	204.468,70
4	Bangka	3.207	956	1.054	850.171	107	2.745	12.512	2.619.490,99	1.095.440,79	6.014.929,11	3.981.764,14	327.270,73
5	Bengkulu	1.908	615	643	129.369	84	1.583	7.391	2.223.312,72	1.623.010,64	3.959.476,48	3.657.924,17	1.052.081,19
6	Bengkulu Selatan	4.310	805	816	346.328	258	2.718	15.908	1.401.236,86	1.116.707,87	7.784.394,34	2.048.593,01	142.888,88
7	Bengkulu Utara	2.033	583	504	61.070	43	560	6.707	393.901,09	113.811,43	578.086,73	448.085,35	37.484,92
8	Bengkulu Tengah	2.263	808	939	739.768	330	4.144	11.363	1.640.935,87	1.901.946,86	4.187.116,43	3.331.457,20	195.524,38
9	Bengkulu Selatan	773	282	290	41.133	27	347	2.893	204.487,31	303.555,61	543.391,34	626.954,11	38.798,57
10	Bengkulu Utara	1.186	279	257	69.510	39	321	3.818	383.693,61	265.603,62	936.422,91	467.754,06	23.960,91
11	DIY Jakarta	5.556	1.596	1.011	1.866.313	985	17.373	94.426	17.625.194,12	71.827.558,43	37.887.818,97	34.647.537,09	1.226.943,25
12	Jawa Barat	16.080	4.868	4.753	2.413.319	1.512	28.529	78.283	10.585.286,41	10.536.465,75	23.844.084,98	18.085.623,87	810.468,73
13	Jawa Tengah	10.016	5.299	6.986	8.649.146	4.563	63.052	97.699	14.168.513,53	38.155.170,47	54.886.084,67	33.021.350,46	345.915,36
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.947	1.363	1.256	853.332	416	5.363	11.520	1.871.861,05	4.705.852,78	7.039.765,45	4.399.322,41	113.995,62
15	Jawa Timur	22.019	13.579	13.025	4.643.362	2.258	40.730	129.105	16.689.774,94	23.343.494,57	41.936.669,46	33.800.305,45	1.399.616,30
16	Banten	4.435	1.243	1.113	1.244.429	579	7.070	20.954	1.238.172,53	1.382.147,10	7.524.466,96	8.634.450,41	355.854,64
17	Bali	3.809	2.578	3.775	983.818	1.109	16.883	28.819	4.071.187,86	13.621.803,88	19.211.645,27	19.917.514,68	428.286,26
18	Nusa Tenggara Barat	2.524	1.044	924	360.933	235	2.837	11.844	1.171.415,45	609.886,27	1.818.891,61	1.040.788,75	71.579,08
19	Nusa Tenggara Timur	2.826	637	539	1.435.646	356	5.892	14.726	3.462.746,04	4.408.829,82	9.356.172,80	7.924.168,19	163.884,01
20	Kalimantan Barat	3.518	734	1.141	1.523.117	335	5.296	16.185	6.924.642,11	7.034.458,46	15.534.788,72	10.078.955,61	225.093,61
21	Kalimantan Tengah	2.993	457	575	255.395	130	2.493	11.802	1.327.781,10	1.325.872,68	2.685.348,76	2.871.587,80	265.035,69
22	Kalimantan Selatan	1.932	577	706	363.390	135	2.772	8.709	1.035.696,65	1.034.554,76	2.435.065,61	1.552.661,25	192.490,45
23	Kalimantan Timur	2.994	613	861	188.794	100	1.637	10.719	1.562.781,68	2.817.948,41	4.794.338,13	2.463.352,90	252.817,55
24	Kalimantan Utara	709	120	80	25.733	19	409	2.555	121.455,49	98.798,18	460.870,94	134.760,99	10.452,21
25	Sulawesi Utara	3.353	403	229	42.145	79	888	11.006	168.146,63	145.317,24	324.111,82	186.389,40	16.843,40
26	Sulawesi Tengah	1.554	414	354	134.649	118	1.695	6.875	300.643,41	313.750,27	1.070.019,04	603.895,11	28.054,22
27	Sulawesi Selatan	4.977	1.076	1.064	445.238	457	4.911	28.319	2.906.999,60	2.173.059,41	6.158.812,40	4.384.816,01	188.790,14
28	Sulawesi Tenggara	2.199	566	653	197.945	85	1.479	8.163	993.179,37	217.706,97	732.287,36	622.762,20	46.525,80
29	Gorontalo	1.063	237	325	42.907	52	889	4.136	447.647,84	77.913,83	897.593,83	237.357,88	18.587,00
30	Sulawesi Barat	871	72	79	17.645	23	138	2.775	61.688,09	27.530,21	104.563,03	111.478,43	6.086,76
31	Makassar	2.515	170	216	81.625	139	1.149	8.833	182.293,37	90.774,11	353.130,03	237.927,25	25.489,26
32	Makassar Utara	1.139	185	115	21.778	110	697	4.224	184.455,32	26.476,41	286.309,05	173.314,43	21.406,41
33	Papua Tengah	898	88	47	6.711	7	103	2.684	91.722,26	3.635,45	98.086,43	71.241,87	10.634,29
34	Papua Pegunungan	363	1	1	574	-	-	1.083	1.488,57	75,00	2.250,87	2.412,88	261,14
35	Papua	933	23	29	8.406	23	152	2.974	107.519,92	6.724,62	242.476,89	147.471,61	9.460,69
36	Papua Barat	448	94	47	11.906	16	732	2.086	37.740,06	3.177,67	146.201,07	20.327,65	3.183,96
37	Papua Selatan	281	33	35	10.726	7	129	1.009	36.730,04	5.541,98	84.448,02	53.093,53	2.589,89
38	Papua Barat Daya	357	38	40	7.608	14	92	1.177	36.597,20	109.868,75	138.476,99	34.905,23	4.775,04
TOTAL		130.119	45.794	47.208	20.984.292	15.464	254.849	660.670	106.625.641,96	130.463.194,13	277.973.019,71	191.504.949,66	8.979.305,46

Adapun Data Perkembangan Koperasi di Koperasi Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.6 Data Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2016 s.d. 2023

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	151.170	152.174	126.343	123.048	127.124	127.846	130.354

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Anggota (Orang)	11.842.415	18.228.682	20.049.995	22.463.738	25.098.807	27.100.372	29.448.965
3	Jumlah Sertifikasi NIK	7.185	20.136	30.188	35.761	38.865	41.231	43.811
4	Jumlah Modal Sendiri (Rp. Triliun)	26,25	66,93	74,90	70,92	79,90	91,61	10.877,77
5	Jumlah Modal Luar (Rp. Triliun)	28,23	61,76	66,22	81,19	90,48	106,36	13.683,85
6	Jumlah Aset (Rp. Triliun)	54,48	128,70	141,13	152,113	221,50	250,98	281,57
7	Jumlah Volume Usaha (Rp. Triliun)	67,50	137,26	145,86	154,178	174,03	192,35	197,86
8	Jumlah PDB Koperasi (%)	3,99	4,48	5,10	5,54	6,20	6,20	6,07

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 31 Desember 2022

Permasalahan Koperasi antara lain:

- 1) Adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata;
- 2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi;
- 3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami defisit; dan
- 4) Keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Daerah
- 5) Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel/Gambar/Grafik

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

C. Akuntabilitas Keuangan

Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Deputy Bidang Perkoperasian 2021-2024

Deputi Bidang Perkoperasian menjalankan Program/Kegiatan dalam rangka mewujudkan **visi Indonesia**:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi:



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dari visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan Deputy Bidang Perkoperasian dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah dalam rangka mendukung arahan Presiden tersebut, yaitu:

Visi Kementerian Koperasi dan UKM
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”



Misi Kementerian Koperasi dan UKM
“Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”



Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM
1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern;
2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global; dan
3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi.



Visi Deputy Bidang Perkoperasian
Mewujudkan Koperasi yang mampu berperan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional



Misi Deputy Bidang Perkoperasian
Membentuk Koperasi yang berperan dalam Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional



Tujuan Deputy Bidang Perkoperasian
1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern;
2. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Sumber: Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024

B. Sasaran Strategis Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021-2024

No	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Mewujudkan Koperasi modern dan berkualitas	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	1	Persentase Koperasi Berkualitas	7,5%
			2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	18%
			3	Koperasi Modern	150 Unit
		Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perkoperasian	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian	80 Nilai
		Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif	1	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	65%
			2	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi	75%
2	Mewujudkan Deputi Bidang Perkoperasian yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB	34 Nilai
			2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perkoperasian	85 Nilai
			3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian	85 Nilai

C. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2023



SS1 Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern

1.1. Persentase Koperasi berkualitas 7,5%

1.2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 5%

1.3. Jumlah Koperasi Modern 150 Unit Koperasi

SS2 Terwujudnya kebijakan Perkoperasian yang berkualitas

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik "80"

SS3 Terwujudnya pemberdayaan Koperasi yang efektif

1.1. Meningkatnya SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya "65%"

1.2. Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi "75%"

SS4 Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi

1.1. Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB "34"

1.2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan
anggaran (IKPA)

“85”

1.3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
Deputi Bidang Perkoperasian anggaran “85”

Sumber: Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 dan Renstra Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021-2024

D. Program dan Anggaran Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2023

Tabel 2.2 Program dan Anggaran Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2023

KODE	KEGIATAN	JUMLAH	SATUAN	ANGGARAN (RP.)
1	2	3	4	5
044.01.02	Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi			73.797.836.000
2746	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	725	Koperasi	6.917.388.000
4442	Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian	808	Koperasi	13.257.808.000
4458	Pengawasan Koperasi	3,600	Koperasi	14.456.689.000
5615	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional			28.200.000.000
6967	Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi			9.197.639.000
044.01.01	Program Dukungan Manajemen			6.762.206.000
4946	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian			6.762.206.000
Sub Total Deputi Bidang Perkoperasian				78.791.730.000
044.01.02	Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi (Dekopin)			
EB. 4948	Pengembangan dan Penguatan Kontribusi Koperasi			1.768.312.000
Sub Total Dekopin				1.768.312.000
Total Perkoperasian				80.560.042.000



Gambar 2. Kunjungan ke Lokasi Piloting Program Solusi (Solar untuk Koperasi) Nelayan, Nusa Tenggara Barat, 31 Maret 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian atas target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam target kinerja dengan realisasinya.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Target Akhir Renstra	
				2021	2022		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Terwujudnya koperasi yang modern dan berkualitas	1. Persentase Koperasi berkualitas	Persen	109,8%	112,27 %	8,63*)	7,5	115,07%	10	86,3%
		2. Pertumbuhan volume usaha Koperasi	Persen	34,14%	85,10%	0,82	5	16,47%	20	4,12%
		3. Jumlah Koperasi Modern	Unit Koperasi	100%	100%	150	150	100%	500	80%
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perkoperasian	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian	Persen	100%	106,06 %	87,23	80	109,04%	80	109,04%
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif	5. Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	Persen	100%	131,88 %	75,39	65	115,98%	75	100,52%
		6. Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis	Persen	133,33 %	133,33 %	88,69	75	118,22%	75	118,22%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Target Akhir Renstra	
				2021	2022		Target	Capaian	Target	Capaian
		Koperasi								
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	7. Hasil penilaian mandiri akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perkoperasian	Nilai	100%	100%	34	34	100	Nilai A	100%
		8. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Nilai	96,5%	103,9%	88,59	85	104,22%	90	98,43%
		9. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian	Nilai	110,78 %	110,78 %	87,55	85	103%	90	97,28%

Sumber: Renstra Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021-2024

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2023

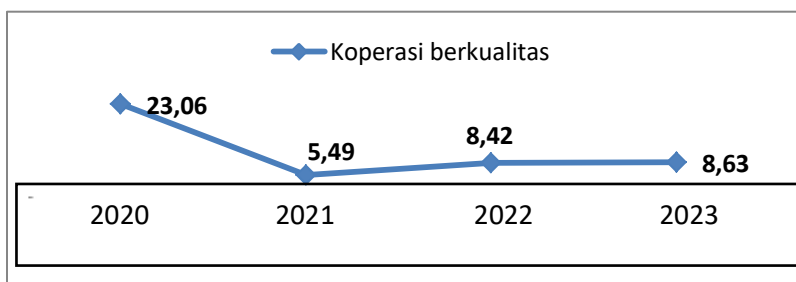
Berdasarkan tabel tersebut, walaupun terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun beberapa indikator tercapai melebihi target yang ditentukan. Secara rinci capaian kinerja Deputi Bidang Perkoperasian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS (Program) 1

Terwujudnya koperasi Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern

1 Indikator Kinerja 1: Persentase Koperasi berkualitas

Gambar 3.1 Tren Capaian Koperasi Berkualitas Tahun 2020 s.d. 2023



Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Target	Capaian	% Capaian
7,5%	8,63% ¹⁾	115,07%

Tren Koperasi berkualitas dari selama 4 (empat) tahun terakhir menurun pada tahun 2021 dan merangkak naik pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan persentase Koperasi berkualitas sebesar 2,49% dari tahun 2022.

Koperasi berkualitas merupakan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 yang diturunkan ke dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2021-2024.

Koperasi berkualitas diukur dengan membandingkan jumlah koperasi bersertifikat sehat dan cukup sehat dibagi dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam aktif yang dikalikan 100. Peringkat Kesehatan dalam hal ini Sehat dan Cukup Sehat merupakan peringkat berdasarkan Permenkop dan UKM No 9 tahun 2020 tentang pengawasan Koperasi yang mana terdapat 4 (empat) unsur yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi, yakni: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan yang selanjutnya akan diperoleh tingkat kesehatan Koperasi yang dibedakan dalam peringkat: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Capaian

Dari hasil pemeriksaan Koperasi tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Pusat) dengan Dinas Yang Membidangi Koperasi Provinsi dan Kabupaten Kota diperoleh jumlah Koperasi yang diperiksa kesehatannya sebanyak 1.722 Koperasi dengan rincian:

- Sehat sebanyak 689 Koperasi
- Cukup Sehat sebanyak 939 Koperasi
- Dalam Pengawasan sebanyak 91 Koperasi
- Dalam Pengawasan Khusus sebanyak 9 Koperasi

Data ODS per 15 Desember 2023 diperoleh bahwa jumlah KSP aktif sebanyak 18.795 Unit Koperasi sehingga capaian Koperasi berkualitas tahun 2023 sebanyak 8,63% atau mencapai 115,07% dari target yang telah ditetapkan (data KSP aktif masih sementara).

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka capaian koperasi berkualitas Koperasi pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,49% yakni dari 8,42% menjadi 8,63%, namun demikian jumlah ini masih bisa meningkat apabila data pemeriksaan kesehatan Koperasi yang dilakukan oleh daerah disampaikan ke pusat.

Tabel 3.2 Capaian Koperasi Berkualitas Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Σ KSP Aktif	SEHAT	CUKUP SEHAT	Target Renstra	Target PK	% Kop Berkualitas	% Capaian
2020	17.737	1.254	2.836	-	-	23,06	-
2021	18.156	291	705	5%	5%	5,49	109,8
2022	18.699	596	977	7,5%	7,5%	8,42	112,27
2023	18.795 ^{*)}	689	939	7,5%	7,5%	8,63 ^{**)}	115,07

Sumber: ODS Kementerian Koperasi dan UKM, 31 Desember 2023 (belum *cleansing*/verifikasi)

Dapat dilihat pada Tabel 3.1 bahwa capaian Koperasi berkualitas mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa selain karena pengaruh pandemi Covid-19, yang berpengaruh terhadap usaha Koperasi, kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan Koperasi di daerah yang terbatas dan juga keterbatasan pengiriman data pemeriksaan kesehatan Koperasi pusat. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah Koperasi berkualitas selain karena bangkitnya pertumbuhan usaha setelah mengalami pandemi Covid-19 dan juga perbaikan fungsi koordinasi pengawasan Koperasi begitu juga tahun 2023. Hal lain yang menjadi konsen dan menjadi salah satu penyebab adalah pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi yang tidak tersampaikan ke Pusat (Kementerian Koperasi dan UKM). Lebih lanjut, jumlah peringkat kesehatan Koperasi secara rinci tahun 2020 s.d. 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Peringkat Kesehatan Koperasi Indonesia Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Σ KSP Aktif (unit)	SEHAT		CUKUP SEHAT		DALAM PENGAWASAN		DALAM PENGAWASAN KHUSUS	
		Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%	Jmh	%
2020	17.737	1.254	7,07	2.836	15,99	459	2,59	127	0,72
2021	18.156	291	1,60	705	3,88	263	1,45	37	0,20
2022	18.699	595	3,18	995	5,32	150	0,80	19	0,10
2023	18.795*)	683	3,63	939	5,00	9	0,05	0	0

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 (data KSP Aktif masih sementara/belum dipublikasin)

Secara capaian, jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 dan mulai merambat naik dari tahun 2022. Penurunan tersebut karena jumlah Koperasi yang diperiksa kesehatannya menurun pada tahun 2021 karena pembatasan bergerak akibat Covid-19. Namun kondisi tersebut berangsur membaik dari tahun 2022 hingga 2023. Sedangkan jumlah Koperasi Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus cenderung mengalami penurunan.

Peneliti *Center of Economic and Law Studies* (Celios), Muhammad Andri Perdana, mengatakan Koperasi yang berhasil dikelola dengan baik bisa memberi keuntungan besar bagi seluruh anggotanya dan masyarakat secara umum (Solopos.com Pos Bisnis, 23 Februari 2024). Hal ini memberi gambaran bahwa pengelolaan Koperasi dalam hal ini tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan tentunya harus baik dan mempunyai predikat yang baik dalam hal ini SEHAT dan CUKUP SEHAT.

Selain hal-hal tersebut, pada tahun 2023 juga terdapat terdapat beberapa capaian lainnya dalam rangka pengawasan Koperasi, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian:
 - Tersusunnya *draft* Rancangan Undang Undang Perkoperasian

- Sosialisasi RUU Perkoperasian.
- 2. Tindak lanjut penanganan Koperasi Bermasalah untuk menangani 8 (delapan) Koperasi, yakni: KSP Intidana, KSP SB, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Pracico Inti Utama, Koperasi Timur Pratama Indonesia, Koperasi Wahana Jasa Sentosa, KSP Indosurya, dan KSP Lima Garuda yang belum sesuai skema PKPU
- 3. Identifikasi dan analisis terhadap Koperasi yang terindikasi dalam pinjaman online ilegal
- 4. Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi
- 5. SE Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri. Tahap I (1 September – 15 Oktober 2023)
- 6. SE Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri. Tahap II (28 November – 29 Desember 2023)
- 7. Pembahasan RPOJK tentang Transformasi Koperasi sebagai KSJK (Kemudahan Persyaratan dan ‘Sweetener’ Bagi Koperasi)
- 8. Koordinasi Sosialisasi, Satgas dan Rencana Kerja Bersama OJK, termasuk FGD, Uji Publik dan Rencana Uji Petik
- 9. Koordinasi PPATK untuk sosialisasi dan registrasi go AML
- 10. Sosialisasi UU P2SK, Kriteria dan Instrumen, Permen Kop UKM Nomor 8 Tahun 2023 dan SE Deputi No 7 Tahun 2023
- 11. Sosialisasi dan Bimtek Self Declare kepada Dinas dan Gerakan Koperasi (langsung di beberapa daerah dan daring melalui zoom)
- 12. Menyusun Aplikasi Sistem ODS Self Declarea dengan Biro KTI
- 13. Melakukan Uji Coba *Self Declare* dan Pelatihan Staf Narahubung
- 14. Mengkoordinasikan Pelaksanaan *Self Declare* Sep – 15 Ok 2025
- 15. Memberikan Konsultasi kepada Dinas Koperasi dan gerakan Koperasi selama 7 hari per minggu mengenai pengisian *self declare*
- 16. Memberikan Bimbingan Teknis kepada JFPK dan Dinas mengenai pelaksanaan validasi data hasil isian (langsung dan daring)
- 17. Melakukan Uji Petik Lapangan Mengenai Isian Validasi
- 18. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Validasi Daring dan Validasi Lapangan terhadap Isian Self Declare oleh JFPK dan Dinas.

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

- Telah dilakukan bimtek pengawasan Koperasi maupun sosialisasi regulasi perkoperasian untuk meningkatkan pemahaman Koperasi dalam menerapkan akuntabilitas koperasi kepada Koperasi.

- Telah dilakukan sosialisasi sistem pengawasan Koperasi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sistem pengawasan koperasi.

Permasalahan/kendala

- Penyampaian data hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi dari daerah belum optimal sehingga data tingkat kesehatan Koperasi terbatas (belum semua Provinsi menyampaikan data pemeriksaan kesehatan Koperasi).
- Dukungan APBD untuk pengawasan Koperasi belum optimal
- Sistem mutasi daerah yang dinamis sehingga menyebabkan keterbatasan pemahaman Perkoperasian pada aparat pembina dan pengawas Koperasi daerah

Faktor Pendukung

- Pemahaman Koperasi tentang kinerja keuangan dan tata kelola koperasi.
- Sosialisasi tentang Perkoperasian khususnya pemahaman tentang pengawasan Koperasi.
- Dukungan Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan Koperasi
- Meningkatnya pemahaman aparat pengawas koperasi (Dinas operasi dan JFPK) tentang pengawasan Koperasi

Kegiatan pendukung

- Pengawasan Koperasi
- Penanganan Koperasi bermasalah
- Optimalisasi sistem pengawasan Koperasi
- Pembinaan tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan
- Penilaian usaha simpan pinjam koperasi (*close loop* dan *open loop*)

Anggaran

Anggaran yang mendukung pencapaian Koperasi berkualitas adalah Pengawasan Koperasi dengan PAGU sebesar Rp.14.456.689.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.167.416.607,00 (98%).

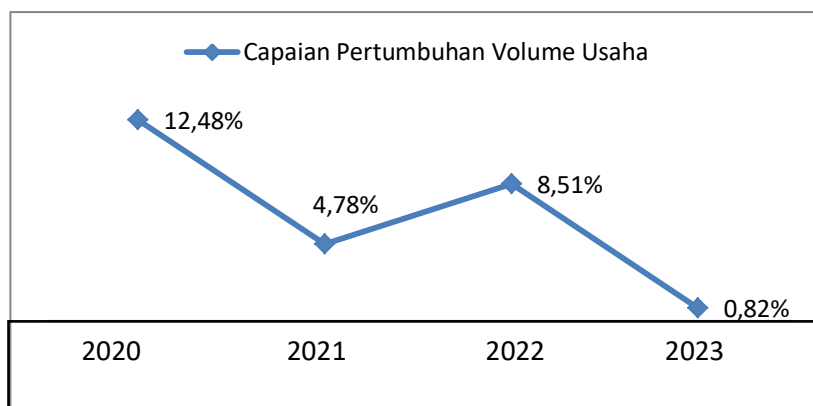
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024

- Meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi,
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan koperasi baik bagi anggota maupun pengurusnya.
- Pembinaan terhadap pengelolaan koperasi secara kontinyu khususnya kepada KSP yang Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus agar meningkat menjadi Cukup Sehat dan Sehat.
- Sosialisasi penggunaan sistem pengawasan Koperasi

2

Indikator Kinerja 2: Pertumbuhan volume usaha koperasi

Gambar 3.2 Tren Capaian Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun 2020 s.d 2023



Target	Capaian	% Capaian
5%	0,82%	16,4%

Tren capaian persentase pertumbuhan volume usaha Koperasi fluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2023

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

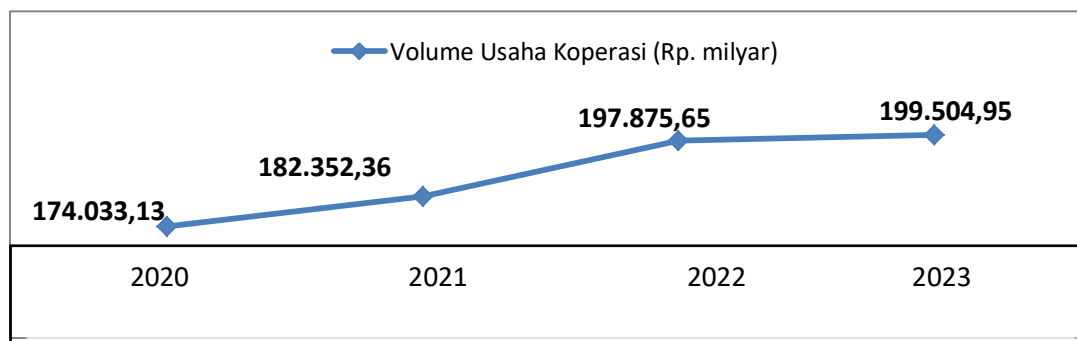
Keterangan: *) Data ODS belum cleansing/verifikasi

Indikator kinerja ini merupakan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 yang diturunkan ke dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2021-2024. Persentase pertumbuhan volume usaha Koperasi dihitung berdasarkan volume usaha Koperasi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Mempertimbangkan pengisian *Online Data System* (ODS) dan kepatuhan Koperasi dalam menyampaikan laporan rapat anggota, target volume usaha Koperasi sama dengan tahun 2022.

Capaian

Secara angka, pertumbuhan volume usaha Koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya saja pertumbuhan tersebut belum sesuai harapan (target yang ditentukan).

Gambar 3.3 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi



Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun volume usaha Koperasi cenderung meningkat, hanya saja peningkatannya tidak sesuai target yang diharapkan (persentase pertumbuhan Koperasi tidak tercapai 100% dari target yang ditentukan). Namun demikian, apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan dari tahun 2022, maka bertumbuhnya volume usaha Koperasi masih dianggap wajar selain dari pendaatan Koperasi yang belum maksimal dan juga penginputan atau penyampaian data Koperasi yang belum optimal. Sebagaimana diketahui bahwa data Koperasi diinput ke dalam aplikasi online data system sesuai dengan kewenangan wilayah keanggotaan Koperasi.

Tabel 3.4 Perbandingan Volume Usaha Koperasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 s.d.3

Tahun	Volume Usaha	Target Renstra (%)	Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)		Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)	Target PK (%)	Pertumbuhan Volume Usaha (%)	Capaian (%)
			Bank Dunia	IMF				
2020	174.033.134.950.000	-	-3,5	3,5	-2,07	-	12,48	-
2021	182.352.358.990.000	14	6,2	6	3,69	14	4,78	34,14
2022	197.875.647.880.000	16	3	3,2	5,3	10	8,51	85,10
2023	199.504.949.660.000	18	2,6	2,7	5,05	5	0,28	16,47

Sumber:

- Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023
- <https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/gdp-growth-rate>
- *International Monetary Fund*; <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- *Global Economic Prospects*
- *Press release The world bank, January, 9, 2024*

Apabila dibandingkan dengan Koperasi dunia, maka dapat dilihat bahwa volume usaha Koperasi dengan jumlah anggota Koperasi Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia. Jumlah volume usaha Koperasi dunia lebih banyak dengan jumlah anggota Koperasi yang relatif lebih sedikit.

Tabel 3.5 Perbandingan Volume Usaha dan Jumlah Anggota Koperasi Indonesia dengan Dunia

Tahun	Volume Usaha Koperasi 300 Top Dunia (USD billion)	Volume Usaha Koperasi 300 Top Dunia (Rp.milyar, 1USD=Rp.15.595)	Jmh Anggota Koperasi Dunia (Rata-rata Top 10)	Volume Usaha Koperasi Indonesia (Rp. Milyar)	Jmh Anggota Koperasi Indonesia
2020	2,217.50	34,581,912.50	A/N	174,033	25,098,807
2021	2,409.41	37,574,748.95	112,410.60	182,352	27,100,372
2022	A/N	A/N	A/N	197,876	29,448,965
2023	A/N	A/N	A/N	199,505	28,984,292

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 dan *World Cooperative Monitor* 2023

Sebagaimana diketahui bahwa volume usaha Koperasi merupakan capaian yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM c.q. Deputi Bidang Perkoperasian hanya sebagai faktor pendorong. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan volume usaha Koperasi, yaitu:

1. Partisipasi ekonomi anggota Koperasi
2. Iklim usaha Koperasi
3. Kondisi perekonomian masyarakat

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia, maka pertumbuhan volume usaha Koperasi relatif lebih baik, walaupun pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, namun masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

- Program/kegiatan pemerintah yang mendorong pemberdayaan dan pengembangan Koperasi diantara akses pembiayaan, akses pemasaran, pengawasan koperasi, dan peningkatan kapasitas SDM Perkoperasian.
- Pemutakhiran dan validasi data ODS agar data pertumbuhan Koperasi sesuai dengan kondisi sebenarnya
- Optimalisasi penginputan data Koperasi khususnya laporan keuangan koperasi

Permasalahan/Kendala

- Keperpihakan pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan Koperasi belum optimal ditinjau dari kebijakan yang dikeluarkan untuk pembangunan Koperasi
- Dukungan APBD bagi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi belum optimal
- Kesadaran daerah dalam penginputan *online data system* masih rendah sehingga data volume usaha Koperasi tidak tersampaikan ke pusat

Faktor pendukung

- Permodalan Koperasi yang kuat
- Kualitas produk atau layanan
- Kemudahan memperoleh produk atau layanan
- Promosi yang baik

Kegiatan Pendukung:

Secara prinsip bahwa seluruh kegiatan di Deputi Bidang Perkoperasian akan mendukung pertumbuhan volume usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dari hasil identifikasi kegiatan yang memberikan dukungan langsung terhadap pertumbuhan volume usaha Koperasi adalah:

- Fasilitasi Akses permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi

- Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan
- Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan
- Perluasan Jaringan Usaha Koperasi
- Dukungan Fasilitas *Factory Sharing*
- Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern
- Akselerasi Pencapaian Koperasi Modern
- Implementasi Tata Kelola Koperasi

Anggaran

Dukungan anggaran dengan kegiatan yang memberikan dampak bagi pertumbuhan volume usaha Koperasi sebesar Rp.29.372.835.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.27.237.208.842,00 atau 92.73%

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024

- Dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses pasar
- Digitalisasi Koperasi
- Akses pembiayaan yang memadai

3

Indikator Kinerja 3: Jumlah Koperasi Modern

Gambar 3.4 Tren Capaian Jumlah Koperasi Modern Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Target	Capaian	% Capaian
150 Koperasi	150 Koperasi	100%

Tren capaian Koperasi modern dari tahun 2021 dan 2022 adalah sama tercapai 100%.

Kegiatan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang mengamanatkan indikator Pengembangan Koperasi Modern yang kemudian diturunkan kepada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 yang lebih lanjut diturunkan ke dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Perkoperasian 2021-2024. Koperasi modern adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Program ini dimulai tahun 2021 bersamaan dengan terbentuknya Deputi Bidang Perkoperasian.

Terdapat 3 (tiga) pilar kriteria Koperasi modern, yaitu:

1. Pilar Kelembagaan
 - a. Daftar anggota berbasis elektronik
 - b. Manajemen Koperasi yang professional
 - c. Rapat anggota tahunan dilakukan secara online
2. Pilar Usaha
 - a. Orientasi usaha berbasis model bisnis (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/*inclusive closed loop*)
 - b. Telah memiliki *offtaker*/pasar
 - c. Inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (promosi ekonomi anggota);
 - d. Telah memanfaatkan teknologi informasi/digital
3. Pilar Keuangan
 - a. Standar akuntansi yang transparan dan akuntabel
 - b. Laporan keuangan online

Tahun ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga Program Pengembangan Koperasi modern yang sebagaimana *roadmap* maka target tahun 2023 sebesar 150 Koperasi Modern. Koperasi Modern merupakan Koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola yang baik (*good cooperative governance*), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Adapun ciri-ciri Koperasi Modern adalah:

1. Dikelola dengan prinsip **tata kelola** koperasi yang baik dan memiliki rencana pengembangan kelembagaan
2. Memiliki rencana pengembangan **bisnis**
3. Terhubung dengan ekosistem rantai pasok dan **pasar**
4. Terhubung dengan ekosistem **pembiayaan**
5. Memanfaatkan teknologi dan menerapkan **digitalisasi**

Mempertimbangkan jumlah target s.d. tahun 2024 sebanyak 500 Koperasi modern dengan tenggat waktu yang seharusnya 5 (lima) tahun dan hanya dilakukan dalam waktu 4 (empat) tahun, maka kriteria tersebut dipersempit paling tidak Koperasi telah memanfaatkan teknologi dan menerapkan **digitalisasi** dan terhubung dengan ekosistem **pembiayaan**.

Capaian

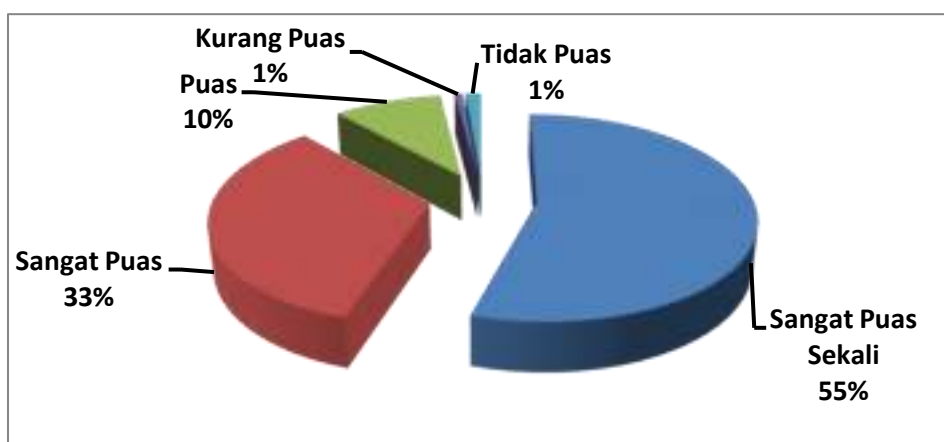
Capaian Koperasi modern tahun 2023 sebanyak 150 Koperasi modern atau tercapai 100%. Capaian tersebut merupakan jumlah Koperasi modern yang telah diberikan intervensi yang terdiri dari 100 Koperasi Pangan dan 50 Koperasi Non pangan. Intervensi tersebut dilakukan melalui kegiatan perkoperasian maupun pendampingan yang dilakukan oleh 133 tenaga pendamping yang dilakukan secara *offline* dan sebanyak 28 Koperasi secara *online*.

Pengembangan Koperasi Modern dilakukan dengan dua pendekatan utama *On Demand* Masyarakat melalui Program Akselerator Koperasi Modern, di mana Deputi Bidang Perkoperasian melakukan *Open Call* bagi seluruh koperasi untuk mendaftarkan diri dalam program tersebut dan yang kedua adalah usulan dari Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM.

Dari *open call* diperoleh hasil 312 koperasi yang mendaftar sebagai peserta Program Koperasi Modern dengan dua pilihan sektor: pangan dan non pangan. Kemudian dari jumlah tersebut diseleksi menjadi 150, di mana 100 koperasi adalah sektor pangan dan 50-nya non pangan.

Secara capaian target, maka capaian Koperasi modern secara jumlah tercapai 100% sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun, apabila dibandingkan dengan intervensi, maka capaian tahun 2023 lebih baik karena jumlah pendamping Koperasinya lebih banyak sehingga lebih banyak yang mendampingi secara *offline* dan intervensi pelatihan juga lebih terarah.

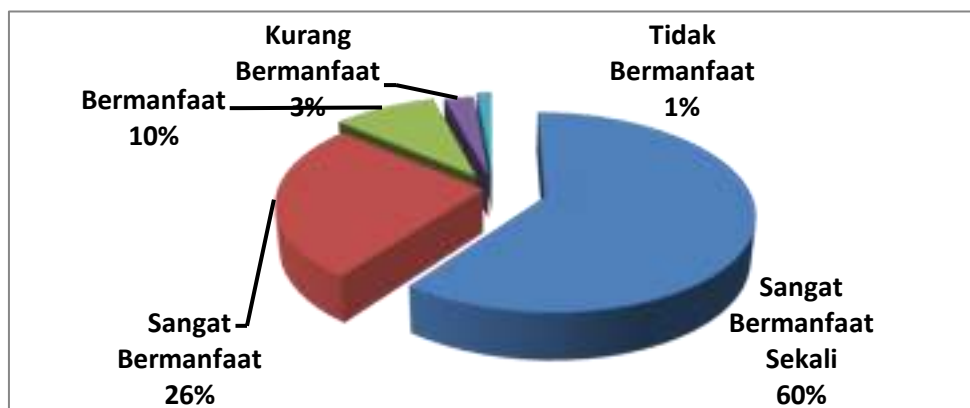
Gambar 3.5 Tingkat Kepuasan Koperasi terhadap Program Pendampingan Koperasi Modern



Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas Koperasi merasa puas terhadap Program Pendampingan Koperasi Modern dan hanya 1% yang merasa tidak puas karena pendamping Koperasi tidak selalu hadir ke Koperasi dan yang lainnya karena pendamping Koperasi tidak memberikan akses permodalan. Namun demikian, dalam hal kesan disampaikan bahwa Koperasi tersebut mendapatkan pendampingan yang luar biasa dan pendampingan koperasi sangat membantu dalam pengembangan usaha koperasi. Selain itu, Koperasi juga menginginkan kelanjutan pendampingan. Untuk kebermanfaatan Koperasi diperoleh data

Gambar 3.6 Tingkat Kebermanfaatan Program Koperasi Modern



Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Berdasarkan data ICA bahwa pada 300 Koperasi Besar Dunia tipe Koperasi yang menduduki peringkat pertama adalah Koperasi Produsen. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa Koperasi sektor riil layak menjadi fokus pembangunan Koperasi.

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

- Telah dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan OPD Pembina Koperasi dan UMKM untuk pelaksanaan program Koperasi modern serta Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Bekerja sama dengan pemangku terkait untuk melakukan business matching atau menjembatani koperasi dengan *off taker* atau menjadi *off taker*
- Melakukan pendampingan bagi Koperasi yang masih memerlukan pendampingan

Faktor pendukung

Pemberian dukungan program bagi koperasi yang dilakukan melalui pendampingan oleh Keasdepan terkait dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan, penandatanganan PKS dengan Direktur Jenderal Hortikultura dan Dekan Fakultas Pertanian IPB mengena Pengembangan Korporatisasi Petani Hortikultura melalui Koperasi, kolaborasi pendampingan koperasi sektor perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kolaborasi pendampingan koperasi sektor perkebunan dengan Kementerian ATR/BPN terkait pemanfaatan lahan TORA melalui Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota/masyarakat, penempatan tenaga pendamping di Koperasi, dam kerja sama dengan Agriterra. Selain itu, dalam rangka perluasan program digitalisasi koperasi sedang dilakukan perombakan portal IDXCOOP.

Kegiatan pendukung

- Fasilitasi Akses permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi
- Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan
- Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan

- Perluasan Jaringan Usaha Koperasi
- Dukungan Fasilitas *Factory Sharing*
- Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern
- Akselerasi Pencapaian Koperasi Modern
- Implementasi Tata Kelola Koperasi

Anggaran

Dukungan anggaran sebesar Rp.29.372.835.000,00 dengan realisasi Rp.27.237.208.842,00 atau 92,73%

Permasalahan/kendala

- Keterbatasan anggaran yang menyebabkan waktu pendampingan kurang lama dan hal ini menyebabkan pula bahwa tidak semua Koperasi mendapatkan pendampingan secara *offline* (mendapatkan pendampingan secara *online*)
- Infrastruktur Koperasi terbatas sehingga pendampingan secara online (*Long Distance Campus/LDC*) tidak berjalan optimal
- Komitmen Koperasi untuk melakukan perubahan sebagaimana arahan pendampingan

Solusi dan Tindak Lanjut

- Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk bersama-sama menangani program ini
- Menjembatani koperasi dengan *off taker* atau menjadi *off taker*
- Tindak lanjut pendampingan pada tahun berikutnya/perlu anggaran lebih

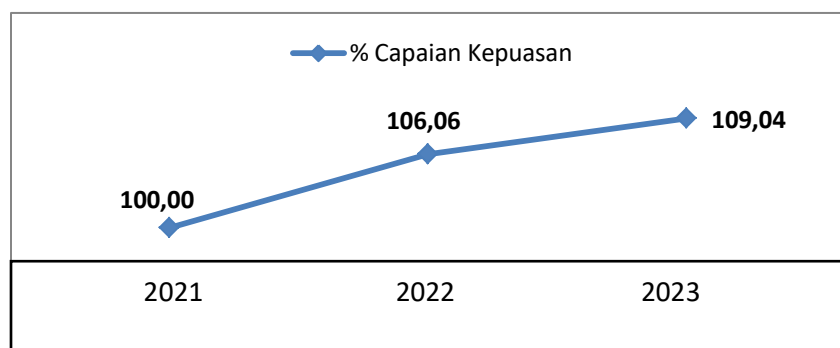


SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Perkoperasian

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian

Gambar 3.7 Tren Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 s.d. 2023



Target	Capaian	% Capaian
80%	84,85%	106,06%

Tren capaian Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

Sumber: Data diolah Deputy Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Indikator kinerja ini merupakan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 yang diturunkan ke dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2021-2024. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian merupakan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kebijakan/program Deputi Bidang Perkoperasian dalam hal ini penyelenggaraan program kegiatan layanan Nomor Induk Koperasi (NIK), pemeriksaan kesehatan Koperasi, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diukur berdasarkan umpan balik yang diisi oleh peserta melalui *google* formulir. Semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan semakin baik layanan/kebijakan yang diberikan.

Tahapan yang dilakukan adalah:

1. Menyusun instrumen survei berdasarkan unsur Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) yang sesuai
2. Menentukan besaran sampel yang akan menjadi responden survei
3. Menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan publik Deputi Bidang Perkoperasian
4. Mengolah data menggunakan rumus:
 - a. Bobot nilai rata-rata tertimbang
 - b. $SKM = \frac{\text{penjumlahan Total dari Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$
 - c. $SKM \text{ unit pelayanan} \times 25$
 - d. Mencocokkan hasil pengolahan data dengan nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan
 - e. Untuk jumlah layanan lebih dari 1 (satu), IKM dihitung dari rata-rata IKM seluruh layanan

Unsur-unsur SKM diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian

Kegiatan layanan Perkoperasian identik dengan layanan *core business* urusan Perkoperasian dalam hal ini izin usaha simpan pinjam Koperasi dan penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang mana layanan NIK dilakukan bersama-sama dengan Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi. Namun demikian, apabila ditinjau secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka layanan berarti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Kegiatan melayani ini biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberi kenyamanan terhadap seseorang yang kehadirannya dianggap penting dan bernilai. Dengan kata lain semua kegiatan dari Deputi Bidang Perkoperasian yang diperuntukan bagi masyarakat dalam

hal ini Koperasi, merupakan layanan termasuk program/kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Koperasi.

Unsur-unsur dalam form survei merupakan unsur standar kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 3,49 dengan persentase nilai kepuasan sebesar 87,23% (kategori baik). Apabila dibandingkan capaian setiap tahunnya maka Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perkoperasian cenderung meningkat.

Tabel 3.6 Capaian Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun	Target Renstra	Realisasi %	% Capaian
2021	80	80	100
2022	80	84,85	106,06
2023	80	87,23	109,04

Sumber: Diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023

Berdasarkan website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Kementerian Pembina bahwa Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 3,66 (sangat baik), maka capaian Deputi Bidang Perkoperasian masih di bawah satu peringkat dari Kementerian tersebut.

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

- Telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan layanan masyarakat melalui survey kepuasan yang mana survey ini juga memberikan umpan balik dari penerima layanan terkait pengembangan ke depannya
- Telah dilakukan pengarahan terhadap petugas atau pelaksana layanan untuk senantiasa memberikan pelayanan optimal
- Telah dilakukan terobosan pembentukan kampus merdeka yang pembelajarn dengan metode *e-learning* dengan materi akuntansi, digitalisasi, dan expo.

Faktor pendukung

- Pemberian layanan sesuai kebutuhan Perkoperasian
- Respon petugas pelaksana kegiatan terhadap peserta kegiatan yang baik.

Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung adalah dukungan manajemen merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan survey layanan izin usaha, akses pembiayaan, Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi Modern, Pelatihan Akutansi,

Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi, Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar.

Anggaran

Dukungan anggaran bagi kegiatan dengan sebesar Rp.6.762.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.733.890.421,00 (99,58%).

Permasalahan/Kendala

- Kurangnya respon umpan balik dari peserta kegiatan.
- Pemberian layanan terkesan monoton dan tidak ada terobosan baru

Solusi dan Tindak Lanjut

- Koordinasi yang baik dengan unit pemberi layanan agar memberikan layanan secara optimal
- Perlunya terobosan baru dalam pemberian layanan perkoperasian (digitalisasi)



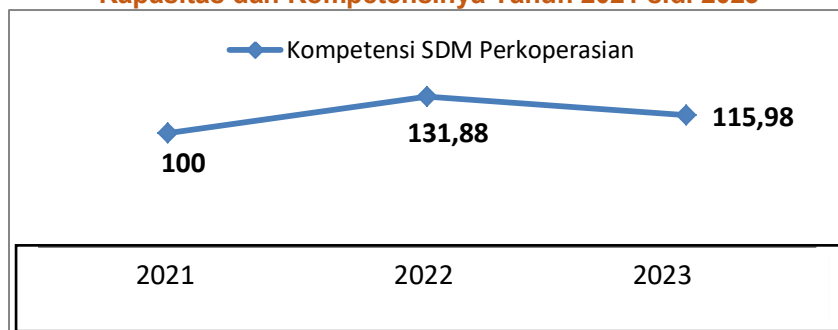
SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

1

Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya

Gambar 3.8 Tren Persentase SDM Koperasi yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Tahun 2021 s.d. 2023



Target	Capaian	% Capaian
65%	75,59%	119,98%

Tren capaian Persentase SDM Koperasi yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya mengalami peningkatan

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya diperoleh dengan membandingkan kompetensi SDM Koperasi yang diberi fasilitas peningkatan kapasitas sebelum dan sesudah pemberian fasilitas melalui survey dan diperoleh hasil sebanyak 85,72% SDM Koperasi meningkat kapasitas dan kompetensinya.

Penghitungan tersebut dilakukan terhadap keasdepan yang memiliki tugas dan fungsi dalam peningkatan kapasitas yang mana memiliki 5 (lima) kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi.

Capaian

Pengukuran peningkatan kapasitas baru dilakukan dari tahun 2021 atau semenjak Deputi Bidang Perkoperasian berdiri. Adapun capaian peningkatan SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya tahun 2023 sebesar 75,39% dari sebanyak 6.175 orang SDM Perkoperasian yang diberikan peningkatan kapasitas dan kompetensi. Adapun peningkatan kapasitas tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.7 SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Σ SDM Perkoperasian (orang)			Targ et PK	Target Renstra	Realisasi	% Capaian
	Σ Pelatihan/ Bimtek	Meningkat	Tidak Meningkat				
2021	3.090	1854	1236	60%	60%	60%	100
2022	5.134	4400	734	60%	65%	85,72%	131,88
2023	6.175	4655	1520	65%	70%	75,39%	115,98

Sumber: Diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya tercapai dari tahun ke tahun

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Telah perbaikan dan penyempurnaan program peningkatan kapasitas melalui optimalisasi petugas layanan atau pelaksana kegiatan. Selain itu, telah dilakukan evaluasi program peningkatan kapasitas untuk melihat seberapa jauh manfaat dari pelatihan yang telah diberikan dan Telah dilakukan terobosan pembentukan kampus merdeka yang pembelajarn dengan metode *e-learning* dengan materi akuntansi, digitalisasi, dan expo.

Faktor pendukung

- Narasumber/pembicara yang kompeten
- Materi sesuai dengan kebutuhan pengurus dan pengelola koperasi
- Penjelasan pembicara atau narasumber yang mudah dipahami

Kegiatan Pendukung

Kegiatan layanan perkoperasian adalah Akses Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian, Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian, Pengawasan Koperasi, Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional, Perkuatan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi.

Anggaran

PAGU sebesar Rp. 28.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.706.083.234,00 (98.25%)

Permasalahan/Kendala

- Peserta tidak mengisi survey peningkatan kapasitas
- Keragaman tingkat pemahaman masing-masing peserta dalam menerima materi pelatihan atau bimtek

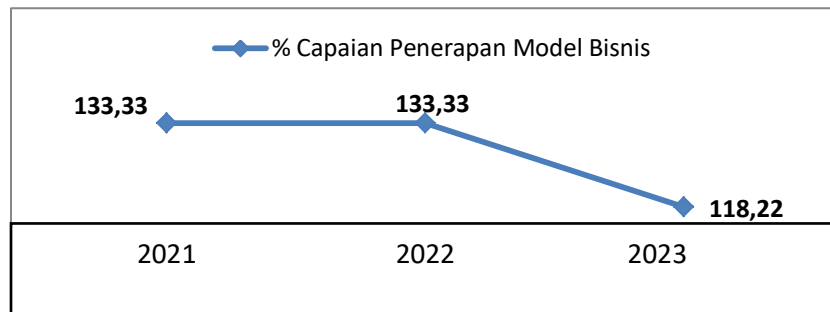
Solusi dan Tindak Lanjut

- Penilaian awal terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas
- Koordinasi dengan Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UMKM tentang kebutuhan peningkatan kapasitas Perkoperasian di daerah.

2

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Gambar 3.9 Capaian Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi Tahun 2021 s.d 2023



Target	Capaian	% Capaian
75%	100%	133,33%

Tren capaian Koperasi modern dari tahun ke tahun sama sebesar 100%

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Tingkat Penerapan Model Bisnis merupakan tahapan implementasi rencana pengembangan bisnis oleh koperasi yang dibangun berdasarkan potensi yang telah dianalisa dari input, proses sampai pada output untuk meningkatkan nilai tambah bagi koperasi dan anggotanya.

Pada tahun 2023 penerapan model bisnis Koperasi merupakan bagian dari proses pendampingan model bisnis kepada Koperasi modern berdasarkan hasil pemetaan proses bisnis koperasi dan menjadi dasar intervensi kegiatan sesuai kebutuhan pengembangan usaha koperasi. Setiap Koperasi diberikan model bisnis canvas untuk pengembangan usaha dari sisi: *Value Proposition* (merupakan nilai jual yang dimiliki produk/jasa sehingga konsumen memilih produk tersebut), *Customer Segments*, *Customer Relationship*, *Channels*, *Key Activities*, *Key Resources*, *Cost Structures*, *Revenue Streams*.

Capaian

Pada tahun 2023, bahwa dari 150 Koperasi yang direncanakan untuk penerapan model bisnis tercapai 133 Koperasi yang diberikan model bisnis pengembangan usaha oleh

133 Pendamping Koperasi Modern dan telah diterapkan di Koperasi melalui pemantauan dan pendampingan 133 pendamping Koperasi tersebut, sehingga realisasinya adalah 133 Koperasi dibandingkan 150 Koperasi sehingga capaiannya 88,67%.

Tabel 3.8 Capaian Penerapan Model Bisnis Koperasi Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Target Renstra	Capaian	% Capaian
2021	75%	100%	133,33
2022	75%	100%	133,33
2023	75%	88,67%	118,22

Sumber: Diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Bahwa berdasarkan kebutuhan sebelumnya Koperasi banyak memerlukan pengembangan usaha, maka pada tahun 2023, peserta program Koperasi modern telah diberikan model bisnis pengembangan usaha melalui pendamping Koperasi Modern untuk diterapkan pada Koperasi.

Faktor pendukung

- Pemahaman Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi mengenai pentingnya menerapkan/ melaksanakan model bisnis yang telah ditetapkan
- Dukungan pemangku kepentingan terhadap Koperasi untuk menerapkan model bisnisnya

Kegiatan Pendukung

Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan.

Anggaran

PAGU sebesar Rp. 13.257.808,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.144.935.221,00 (99,15%).

Permasalahan/Kendala

- Komitmen Koperasi yang didukung oleh anggotanya untuk melaksanakan model bisnis yang telah ditetapkan
- Konsistensi penerapan model bisnis

Solusi dan Tindak Lanjut

- Replikasi model tersebut kepada Koperasi lainnya
- Peningkatan kerja sama dan dukungan berbagai pihak bagi pengembangan model Koperasi
- Dukungan sumber pembiayaan secara berkesinambungan, seperti dari LPDB-KUMKM dan kredit Perbankan dalam KUR Petani untuk mengembangkan bisnis hortikultura lebih luas lagi.



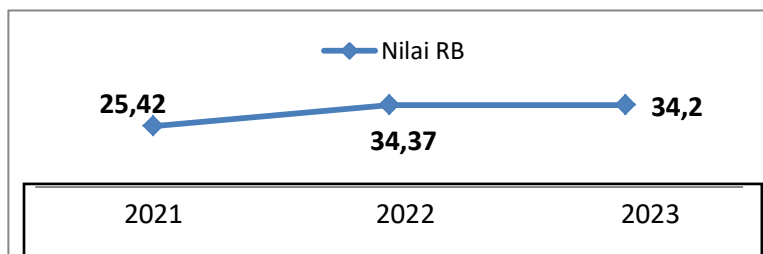
SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi

1

Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB

Gambar 3.10 Tren Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 s.d. 2023



Target	Capaian	% Capaian
34	34.2	100,59

Tren capaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian cenderung meningkat

Sumber: Data diolah Deputy Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian berdasarkan PMPRB merupakan gambaran sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh Deputy Bidang Perkoperasian, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh Deputy Bidang Perkoperasian.

Tabel 3.9 Nilai Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
5	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Capaian

Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB merupakan penyelenggaraan tata kelola birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian yang dinilai berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Asesor Deputy Bidang Perkoperasian terhadap komponen-komponen yang dinilai dalam hal ini komponen pengungkit dan reform. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 sebesar 34,2 dengan target Deputy Bidang Perkoperasian Nilai 34.

Nilai capaian tersebut apabila dibandingkan dengan nilai Reformasi dari Kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

Tabel 3.10 Nilai Pelaksanaan Reformasi Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB Tahun 2021 s.d. 2023

	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Nilai RB	25,42	34,37	34	34,2	100,59

Sumber: Data diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2022

Tabel 3.11 Unsur Nilai Pelaksanaan Reformasi Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB Tahun 2023

No	Unsur Penilaian	Bobot	Nilai
I	Pemenuhan	14.6	13.28
1	Manajemen Perubahan	2	1,85
2	Deregulasi Kebijakan	1	0,5
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2	2
4	Penataan Tatalaksana	1	0,79
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,4	1,37
6	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,45
7	Penguatan Pengawasan	2,2	2,06
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	2,26
II	Reform	21,7	20,92

No	Unsur Penilaian	Bobot	Nilai
1	Manajemen Perubahan	3	3
2	Deregulasi Kebijakan	2	2
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,5	1,5
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2	2
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,38
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,34
	Jumlah	36,3	34,2

Sumber: Diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Perkoperasian menyelenggarakan pertemuan staf untuk merubah pemikiran (*mind set*) aparat sipil dalam bekerja sehingga diperoleh tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif dan efisien, bersih dari KKN dan berorientasi pada pelayanan prima.

Faktor pendukung

- Koordinasi dan kerja sama yang baik di Deputi Bidang Perkoperasian.
- Komitmen dari sebagian besar ASN Deputi Bidang Perkoperasian untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

Kegiatan dukungan

Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2023, telah didukung melalui kegiatan dukungan manajemen di Deputi Bidang Perkoperasian.

Anggaran

PAGU anggaran sebesar Rp. 6.762.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.733.890.421,00 (99,58%).

Permasalahan/Kendala

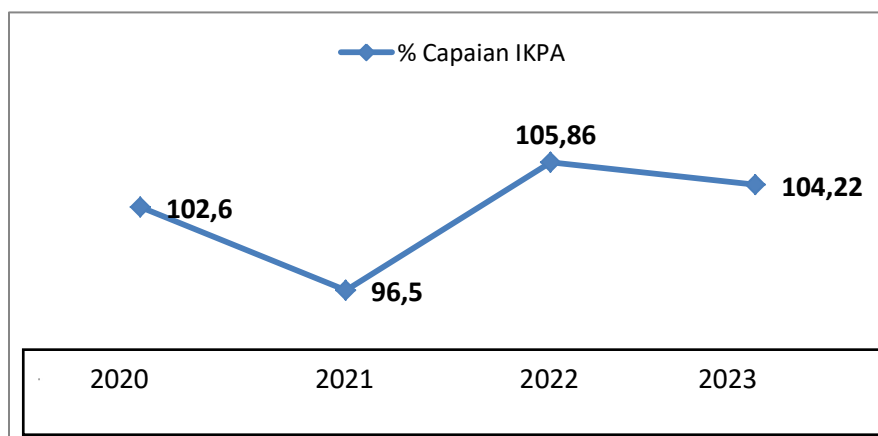
- Komitmen penyelenggaraan reformasi birokrasi belum optimal
- Pola pikir implementasi reformasi birokrasi belum sepenuhnya berubah.

Solusi dan Tindak Lanjut

Perlunya sosialisasi penyelenggaraan RB secara berkala di lingkungan Deputi Bidang Perkoperasian agar implementasi RB di Deputi Bidang Perkoperasian optimal dan komitmen ASN terjaga.

2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Perkoperasian

Gambar 3.11 Persentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Perkoperasian Tahun 2021 s.d 2023



Target	Capaian	% Capaian
Nilai 85	Nilai 89,98	105,86

Tren persen capaian nilai IKPA Deputy Bidang Perkoperasian meningkat

Sumber: Data diolah Deputy Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran Deputy Bidang Perkoperasian yang diambil dari Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Capaian

Nilai IKPA Deputy Bidang Perkoperasian sebesar 88,59 atau tercapai 104,22% dari target sebesar nilai 85.

Tabel 3.12 Nilai IKPA Deputy Bidang Perkoperasian Tahun 2020 s.d 2023

Tahun	Target	Capaian IKPA	% Capaian
2020	-	92,32	102,6
2021	90	86,84	96,5
2022	85	89,98	105,86
2023	85	88,59	104,22

Sumber: Data diolah Deputy Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Keterangan:

Capaian IKPA tahun 2020 karena Deputy Bidang Perkoperasian belum terbentuk, maka merupakan rata-rata capaian Deputy Bidang Kelembagaan dan Deputy Bidang Pengawasan mengingat Deputy Bidang Perkoperasian terbentuk dari gabungan kedua deputy tersebut.

Apabila dilihat dari tabel tersebut, maka persentase capaian nilai IKPA Deputy Bidang Perkoperasian meningkat, selain disebabkan karena capaian IKPA meningkat juga disebabkan karena target yang pada tahun ini capaiannya hanya nilai 85. Hal ini mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

- Telah dilakukan optimalisasi perencanaan kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan faktor resiko untuk meminimalisir revisi kegiatan dan anggaran.
- Telah pendistribusian pekerjaan dalam hal ini kegiatan terkait pengembangan Koperasi modern kepada PMO untuk membantu pelaksanaan kegiatan di keasdepan

Faktor Pendukung

- Koordinasi dan kerja sama yang baik di Deputi Bidang Perkoperasian
- Komitmen dari segenap ASN Deputi Bidang Perkoperasian untuk mencapai target kinerja anggaran yang telah ditetapkan yang optimal.
- Realisasi anggaran konsisten dan selaras dengan capaian kegiatan dan terinput dengan baik

Kegiatan dukungan

Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2023, telah didukung melalui kegiatan dukungan manajemen di Deputi Bidang Perkoperasian.

Anggaran

PAGU anggaran sebesar Rp. 6.762.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.733.890.421,00 (99,58%).

Permasalahan/Kendala

- Tidak konsistennya antara POK dengan capaian kegiatan
- Revisi anggaran dan kegiatan
- Kegiatan besar (kontraktual) dilaksanakan di akhir sehingga realisasi menumpuk di akhir tahun

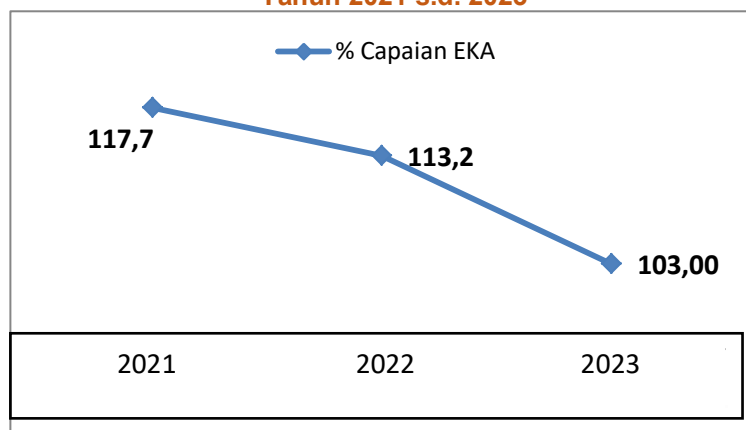
Solusi dan Tindak Lanjut

- Koordinasi penyusunan POK dan komitmen pencapaian target
- Sosialisasi mengenai konsistensi penyerapan dan capaian target terhadap nilai IKPA.

3

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian

Gambar 3.12 Persentase Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021 s.d. 2023



Target	Capaian EKA	% Capaian
Nilai 85	Nilai 87,55	103

Tren capaian nilai EKA Deputi cenderung turun dan tren capaian EKA Satuan Kerja di Kementerian Koperasi dan UKM yang cenderung menurun

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian merupakan nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Perkoperasian yang diperoleh dari aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Capaian

Hasil penilaian SMART Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2023 sebesar 87,55 atau tercapai 103% dari target nilai 85. Perbandingan capaian Nilai EKA Deputi Bidang Perkoperasian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.13 Nilai EKA Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Target PK	Target Renstra	Capaian EKA	% Capaian
2021	85	90	94,16	110,78
2022	85	90	94,16	110,78
2023	85	90	87,55	103

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian EKA Deputi Bidang Perkoperasian mengalami penurunan, namun penurunan ini merupakan tren dari capaian EKA Satuan Kerja di Kementerian Koperasi dan UKM yang cenderung menurun. Hal ini penyempurnaan sistem yang mana saat ini aplikasi Om Span terintegrasi dengan aplikasi SMART dan aplikasi SAKTI.

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 telah diupayakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang telah ditetapkan, walaupun tidak sepenuhnya

dilakukan karena adanya pencadangan dan pemblokiran anggaran. sehingga POK yang telah ditetyang baik dan konsisten sebagai acuan. Peningkatan atau optimalisasi kinerja pegawai juga terus ditingkatkan melalui penilaian ekinerja dan diskusi atau rapat terkait kendala atau hambatan kegiatan.

Faktor Pendukung

- *Timeline* kegiatan
- Optimalisasi kinerja untuk mencapai target output yang telah ditetapkan
- Pemantauan dan dorongan untuk mencapai capaian output

Kegiatan Pendukung

Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2023, telah didukung melalui kegiatan dukungan manajemen di Deputi Bidang Perkoperasian.

Anggaran

PAGU sebesar sebesar Rp. 6.762.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.733.890.421,00 (99,58%).

Permasalahan/Kendala

- Penginputan capaian output seringkali diperbaiki karena unit kerja terlambat menyampaikan capaian output
- Pencadangan anggaran atau pemblokiran anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir anggaran

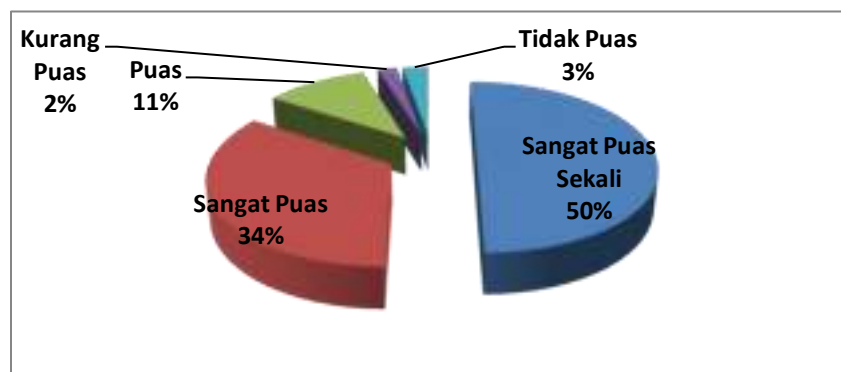
Solusi dan Tindak Lanjut

- Pelaksanaan Petunjuk Operasional Kegiatan yang baik dan konsisten sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sehingga output tercapai sesuai perencanaan yang telah ditentukan.
- Meningkatkan optimalisasi sumber daya agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan

Evaluasi Pendamping Koperasi Modern

Pada tahun 2023 telah dilakukan pendampingan Koperasi Modern sebanyak 113 Koperasi yang dilakukan oleh 113 orang pendamping Koperasi Modern. Dari hasil pendampingan Koperasi modern telah dilakukan survey kepuasan tenaga pendamping Koperasi modern untuk mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Koperasi Modern dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13 Kepuasan Koperasi terhadap Output Pendampingan



Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, 2023

Tindak lanjut tahun sebelumnya

- Penambahan tenaga pendamping Koperasi modern
- Selektivitas tenaga pendamping ditingkatkan melalui seleksi yang ketat
- Penyelenggaraan couching tentang Koperasi modern bagi pendamping Koperasi Modern

Faktor pendukung

- Persyaratan administrasi pendamping yang lebih selektif sesuai kebutuhan tema pendampingan
- Penerimaan pendamping Koperasi modern bersifat terbuka dan melalui proses seleksi

Faktor penghambat

- Waktu pendampingan untuk semua Koperasi sama, seharusnya disesuaikan dengan materi dan kebutuhan pendampingan
- Keterbatasan anggaran yang menyebabkan mayoritas metode pendampingan dilakukan secara online sehingga tidak semua Koperasi menerima pendampingan secara optimal

Solusi dan Tindak Lanjut

- Materi seleksi diperdalam
- Sebelum penerimaan setiap pendamping agar menyampaikan rencana pendampingan dan *goal* pendampingan sesuai keahlian masing-masing pendamping, selain itu pendamping juga harus bisa memetakan faktor resiko beserta rencana antisipasi dari bidang yang hendak disampaikan
- Penjelasan atau couching yang baik dengan waktu yang memadai sebelum pendamping melakukan pendampingan
- Laporan pelaksanaan pendampingan secara mingguan kepada PMO

C. Akuntabilitas Keuangan

Capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Realisasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022 dan 2023

UNIT ES II	2022		2023			
	REALISASI (Rp.000)	%	PAGU AWAL (Rp.000)	PAGU REVISI AKHIR (Rp.000)	REALISASI (Rp.000)	%
Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian	9.453.737,053	98,29	21.894.453	13.257.808	13.144.935,221	99,15
Pembiayaan dan Pelindungan Koperasi	6.206.829,403	99,34	5.850.000	6.917.388	6.912.144,380	99,92
Pengawasan Koperasi	9.667.123,542	97,68	17.225.000	14.456.689	14.167.416,607	98,00
Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	30.652.505,212	94,60	33.700.000	28.200.000	27,706,083.234	98,25
Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi	-	-	-	9.197.639	7.180.129,241	78,06
Sekretariat Deputi	8.605.854,859	99,85	6.883.340	6.762.206	6.733.890,421	99,58
DEKOPIN	-	-	4.268.312	1.768.312	1.725.152	97,56
JUMLAH	64.586.050,069	96,71	89.821.105	80.560.042	77.569.751	96,29

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2023 mengalami penurunan dari realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 0,43%. Hal ini disebabkan karena terjadi pada tahun 2023 tidak semua anggaran dapat direalisasikan sehubungan peruntukan anggaran untuk pembahasan RUU Perkoperasian yang masih menunggu penjadwalan pembahasan di DPR. Dengan kata lain, walaupun realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun realisasi anggaran Deputi Bidang Perkoperasian sebanding dengan capaian output.

Tabel 3.15 Dukungan Anggaran terhadap Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran/ Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Penye rapan
Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern						
Persentase Koperasi Berkualitas	7,50%	8,63%	115,07%	14.456.689	14.167.416,607	98,00
Pertumbuhan Volume	5%	0,82%	16,47%	13.257.808	13.144.935,221	99,15

Sasaran/ Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Penye rapan
Usaha Koperasi				6.917.388	6.912.144,380	99,92
				9.197.639	7.180.129,241	78,06
Jumlah Koperasi Modern	150 Unit Koperasi	150 Unit Koperasi	100%	13.257.808	13.144.935,221	99,15
				6.917.388	6.912.144,380	99,92
				9.197.639	7.180.129,241	78,06
Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Perkoperasian						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian	80%	87,23%	109.04%	6.762.206	6.733.890,421	99,58
Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif						
Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	65%	75,39%	115,98%	28.200.000	27.706.083,234	98,25
Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi	75%	86,67%	118,22%	13.257.808	13.144.935,221	99,15
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi						
Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB	34	34,2	100,59%	6.762.206,00	6.733.890,421	99,58
	Nilai	Nilai				
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Perkoperasian	85	88,59	104.22%			
	Nilai	Nilai				
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputy Bidang Perkoperasian	80	87,55	103%			
	Nilai					

Sumber: Data diolah Deputy Bidang Perkoperasian, tahun 2023

Secara capaian indikator, pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai, yakni pertumbuhan volume usaha Koperasi, hal ini karena proses pemutakhiran dan validasi data ODS, yang menyebabkan data volume usaha Koperasi menurun.

Pada dasarnya, Deputy Bidang Perkoperasian telah melakukan efektivitas dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam POK karena telah sesuai peruntukan anggaran seoptimal mungkin untuk membiayai kegiatan bidang Perkoperasian pada tahun 2023.

Melalui nilai IKPA Deputy Bidang Perkoperasian sebesar 88,59, dapat dikatakan bahwa kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Deputy Bidang Perkoperasian telah sesuai dari

sisi perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sedangkan melalui nilai EKA Deputy Bidang Perkoperasian sebesar 85,77 menunjukkan ketercapaian tujuan kegiatan yang mana efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur melalui Capaian Rincian Output (CRO) Deputy Bidang Perkoperasian telah tercapai. Dapat dipastikan bahwa anggaran Perkoperasian telah dialokasikan untuk setiap sektor dan program dan memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditinjau dari bertambahnya kontribusi Koperasi terhadap perekonomian dan bertumbuhnya volume usaha Koperasi.

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

- Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang lebih tersistem diawal tahun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan agar capaian/realisasi sesuai perencanaan yang telah ditentukan
- Optimalisasi sumber daya Deputy Bidang Perkoperasian agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan

Faktor Pendukung

- Komitmen dan kerja sama antar pegawai di Deputy Bidang Perkoperasian
- Pemantauan secara berkala melalui coffee morning

Kegiatan Pendukung

Dalam upaya pencapaian akuntabilitas anggaran tahun 2023, telah didukung melalui kegiatan dukungan manajemen di Deputy Bidang Perkoperasian.

Anggaran

PAGU anggaran dukungan manajemen sebesar sebesar Rp. 6.762.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.733.890.421,00 (99,58%).

Permasalahan/Kendala

- Pencadangan anggaran atau pemblokiran anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir anggaran

Solusi dan Tindak Lanjut

- Koordinasi penyusunan POK dan komitmen pencapaian target untuk tahun selanjutnya
- Sosialisasi mengenai konsistensi penyerapan dan capaian target terhadap nilai IKPA



**Gambar 4. Grand Opening Pengembangan Unit Usaha Ritel Koperasi Karyawan PT Adis
Dimension Footwear, Serang 10 Mei 2023**

BAB IV

PENUTUP

Dari gambaran dan informasi capaian kinerja yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan tahun 2023 dapat berjalan dengan baik, berhasil dilakukan optimalisasi dan upaya perbaikan untuk mencapai target berhasil. Semua indikator kinerja tercapai namun dengan penyesuaian target dari penetapan targe Renstra.

Capaian target kinerja memberikan gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas komitmen semua unit di Deputi Bidang Perkoperasian dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menunjang percepatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Ke depan, Deputi Bidang Perkoperasian akan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan mekanisme dan prosedur kerja untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran perkoperasian dan melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN



KEMENKOPUKM

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Jakarta Selatan 12940
1500 587
info@kemenkopukm.go.id
www.kemenkopukm.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Zabadi
Jabatan : Deputi Bidang Perkoperasian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Teten Masduki
Jabatan : Menteri Koperasi dan UKM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

Teten Masduki

Pihak Pertama,

Ahmad Zabadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	1	Persentase Koperasi Berkualitas	7,5%
		2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5%
		3	Jumlah Koperasi Modern	150 Unit
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perkoperasian	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian	80
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif	1	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	65%
		2	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi	75%
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB	34
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perkoperasian	85
		3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian	85

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi	78,669,453,000
2	Program Dukungan Manajemen	6,883,340,000
Total Anggaran		85,552,793,000

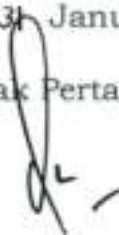
Jakarta, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,



Teten Masduki

Pihak Pertama,



Ahmad Zabadi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	1	Persentase Koperasi Berkualitas
		2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
		3	Jumlah Koperasi Modern
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perkoperasian	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif	1	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya
		2	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Jakarta, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,



Teten Masduki

Pihak Pertama,



Ahmad Zabadi

Daftar 400 Koperasi Modern

Daftar 134 Tenaga Pendamping 2023

Daftar Link Kertas Kerja Pemantauan Program

Daftar Program Khusus

Lampiran 2

Data Koperasi Modern 2023

Daftar koperasi yang telah memenuhi syarat
untuk mengikuti Program Koperasi Modern 2021
dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Koperasi Pangan

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
1	P01-MC21	KUD Sumber Makmur	Kelapa Sawit	Kab. Pelawan	Riau
2	P02-MC21	Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo	Perikanan Tangkap	Kab. Cilacap	Jawa Tengah
3	P03-MC21	Koperasi (BUMR) Pemasaran Paramasera	Kacang Koro	Kota Bogor	Jawa Barat
4	P04-MC21	Koperasi Produsen Leuit Sing Seungit	Pisang	Kab. Garut	Jawa Barat
5	P05-MC21	Koperasi Konsumen Pondok Pesantren AL Ittifaq	Hortikultura	Kab. Bandung	Jawa Barat
6	P06-MC21	Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrayyan	Kopi	Kab. Aceh Tengah	NAD
7	P07-MC21	Koperasi Klasik Beans	Kopi	Kab. Garut	Jawa Barat
8	P08-MC21	Koperasi Produksi Nira Kamukten	Gula Semut	Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah
9	P09-MC21	Koperasi Produsen KJUB Puspetasari	Pakan Ternak	Kab. Klaten	Jawa Tengah
10	P10-MC21	Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur	Susu Sapi	Kab. Lumajang	Jawa Timur
11	P11-MC21	Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur	Pisang	Kab. Tanggamus	Lampung
12	P12-MC21	Koperasi Produsen Kakao Kerta Semaya Samanya	Kakao	Kab. Jembrana	Bali
13	P13-MC21	Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (KOPDIT/CU) Cikalmas	Padi	Kab. Banyumas	Jawa Tengah

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
14	P14-MC21	Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah	Kopi	Kab. Subang	Jawa Barat
15	P15-MC21	Koperasi Ara Cahayani Gayo (ACG)	Kopi	Kab. Bener Meriah	NAD
16	P16-MC21	Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara	Susu Sapi	Kab. Cianjur	Jawa Barat
17	P17-MC21	Koperasi Wanita Srikandi	Gula Kelapa kristal	Kab. Purworejo	Jawa Tengah
18	P18-MC21	Koperasi Plasma Kacang Butor	Lada	Kab. Belitung	Kep. Bangka Belitung
19	P19-MC21	Koperasi Peternakan Saroni Makmur	Susu Sapi	Kab. Sleman	DIY
20	P20-MC21	Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri	Beras	Kab. Kubu Raya	Kalimantan Barat
21	P21-MC21	Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Prawerti	Beras	Kab. Buleleng	Bali
22	P22-MC21	Koperasi Produsen Tabur Benih Melati	Benih Padi	Kab. Subang	Jawa Barat
23	P23-MC21	Koperasi Produsen Rasana Rasyidah Mandiri	Akar Wangi dan Bawang Merah	Kab. Garut	Jawa Barat
24	P24-MC21	Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri	Pisang	Kab. Kutai Timur	Kalimantan Timur
25	P25-MC21	Koperasi Produsen Agro Niaga Jabung Syariah (KAN JABUNG)	Susu Sapi	Kab. Malang	Jawa Timur
26	P26-MC21	Koperasi Produsen Bersama Mandiri Sejahtera (BAHTERA)	Kopi	Kab. Bener Meriah	NAD
27	P27-MC21	Koperasi Produksi Generasi Mandiri	Udang Vaname	Kab. Bengkalis	Riau
28	P28-MC21	Koperasi Kopi Wanita Gayo (KOKOWAGAYO)	Kopi	Kab. Bener Meriah	NAD

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
29	P29-MC21	Koperasi Produsen Eptilu Membangun Indonesia	Sayuran dan Buah	Kab. Garut	Jawa Barat
30	P30-MC21	Koperasi Serba Usaha Gapoktan Tani Mulus	Beras	Kab. Indramayu	Jawa Barat
31	P31-MC21	Koperasi Agro Tora Wajasakti	Padi dan Palawija	Kab. Sukabumi	Jawa Barat
32	P32-MC21	Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti	Beras	Kab. Cianjur	Jawa Barat
33	P33-MC21	Koperasi Pugar Ronggolawe Makmur	Garam	Kab. Tuban	Jawa Timur
34	P34-MC21	Koperasi Produsen Berkah Rempah Sejahtera	Kacang Buah dan Gula	Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah
35	P35-MC21	Koperasi Produsen Singgalang Sari Maju	Nanas	Kab. Subang	Jawa Barat
36	P36-MC21	Koperasi Produsen Mitra Kelapa (KPMK) Pangandaran	Kelapa	Kab. Pangandaran	Jawa Barat
37	P37-MC21	Koperasi Produsen Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pengalengan	Susu Sapi	Kab. Bandung	Jawa Barat
38	P38-MC21	Koperasi Unit Desa (KUD) Mitra Yasa	Susu Sapi	Kab. Tasikmalaya	Jawa Barat
39	P39-MC21	Koperasi Produsen Citra Kina Raya	Beras	Kab. Demak	Jawa Tengah
40	P40-MC21	Koperasi Sae Pujon	Susu Sapi	Kab. Malang	Jawa Timur

2. Koperasi Non-Pangan

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
1	NP01-MC21	KSPPS Tamziz	Simpan Pinjam	Kab. Wonosobo	Jawa Tengah
2	NP02-MC21	KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI	Simpan Pinjam	Kab. Nganjuk	Jawa Timur

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
3	NP03-MC21	KSP Kodanua	Simpan Pinjam	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
4	NP04-MC21	KSPPS BMT Bima	Simpan Pinjam	Kab. Magelang	Jawa Tengah
5	NP05-MC21	KSP Sahabat Mitra Sejati	Simpan Pinjam	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
6	NP06-MC21	KSPPS Baytul Ikhtiar (KSPPS BAIK)	Simpan Pinjam	Kota Bogor	Jawa Barat
7	NP07-MC21	KSP Nusantara	Simpan Pinjam	Kab. Cianjur	Jawa Barat
8	NP08-MC21	Kopdit Sangosay	Simpan Pinjam	Kab. Bajawa	Nusa Tenggara Timur
9	NP09-MC21	KSP BMT Masalahah	Simpan Pinjam	Kota Pasuruan	Jawa Timur
10	NP10-MC21	KSP CU Pancur Kasih	Simpan Pinjam	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
11	NP11-MC21	KSP Balota	Simpan Pinjam	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan
12	NP12-MC21	KSP CU Khatulistiwa Bakti	Simpan Pinjam	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
13	NP13-MC21	KSP Sila Mukti	Simpan Pinjam	Kab. Karang Asem	Bali
14	NP14-MC21	KSP Graha Mandiri	Simpan Pinjam	Kab. Grobogan	Jawa Tengah
15	NP15-MC21	KSP Artha Mulia	Simpan Pinjam	Kota Semarang	Jawa Tengah
16	NP16-MC21	KSP Mekar Sai	Simpan Pinjam	Kota Bandar Lampung	Lampung

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
17	NP17-MC21	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera	Simpan Pinjam	Kab. Rembang	Jawa Tengah
18	NP18-MC21	KSP Surya Kencana	Simpan Pinjam	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
19	NP19-MC21	KSP Berkat	Simpan Pinjam	Kab. Bulukumba	Sulawesi Selatan
20	NP20-MC21	KSP Mekarsari	Simpan Pinjam	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
21	NP21-MC21	Koperasi Desa Wisata Candirejo	Pariwisata	Kab. Magelang	Jawa Tengah
22	NP22-MC21	Koperasi Serba Usaha Mora Maladum Mandiri	Pariwisata	Kota Sorong	Papua Barat
23	NP23-MC21	Koperasi Jasa Sentra Wisata Alam Nusantara (KOPISETARA)	Pariwisata	Kota Jakarta	DKI Jakarta
24	NP24-MC21	Koperasi Jasa Noto Wono	Pariwisata	Kab. Bantul	D.I Yogyakarta
25	NP25-MC21	Koperasi Jasa Kotasi Wisata Senggigi	Pariwisata	Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
26	NP26-MC21	KOPERASI WIRAUUSAHA SULUT HEBAT	Pariwisata	Kota Manado	Sulawesi Utara
27	NP27-MC21	Koperasi Satelit Desa Indonesia	Digital	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
28	NP28-MC21	Koperasi Jasa Energi Terbarukan	Digital	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
29	NP29-MC21	Koperasi Pondok Pesantren Al Muhajirin	Millennial	Kab. Purwakarta	Jawa Barat

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
30	NP30-MC21	Koperasi Kreatif Kinarya (Kinarya Coop)	Millennial	Kab. Bekasi	Jawa Barat
31	NP31-MC21	Koperasi Kampus Unsoed	Millennial	Kab. Banyumas	Jawa Tengah
32	NP32-MC21	Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada	Millennial	Kab. Sleman	D.I Yogyakarta
33	NP33-MC21	Koperasi Pondok Pesantren Husnul Khotimah	Millennial	Kab. Kuningan	Jawa Barat
34	NP34-MC21	Koperasi BeU Abadi Nusantara	Millennial	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
35	NP35-MC21	Koperasi Pondok Pesantren Fathiyah	Millennial	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
36	NP36-MC21	Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah As-Sakinah	Millennial	Kota Surabaya	Jawa Timur
37	NP37-MC21	Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang	Millennial	Kota Malang	Jawa Timur
38	NP38-MC21	Koperasi Jasa Industri Kreatif Indonesia (KIKI)	Millennial	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
39	NP39-MC21	Koperasi Swastisari	Spin Off	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
40	NP40-MC21	Koperasi Pintu Air	Spin Off	Kab. Sikka	Nusa Tenggara Timur
41	NP41-MC21	Kopdit Obor Mas	Spin Off	Kab. Sikka	Nusa Tenggara Timur

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
42	NP42-MC21	Koperasi Simpan Jasa (Kospin Jasa)	Spin Off	Kota Pekalongan	Jawa Tengah
43	NP43-MC21	Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia	Spin Off	Kab. Tangerang	Banten
44	NP44-MC21	Puskop Culna	Spin Off	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
45	NP45-MC21	Koperasi UGT Nusantara	Spin Off	Kab. Pasuruan	Jawa Timur
46	NP46-MC21	Koperasi Astra	Spin Off	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
47	NP47-MC21	KSP CU Keling Kumang	Spin Off	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat
48	NP48-MC21	Inkopdit CUCO Indonesia	Spin Off	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
49	NP49-MC21	GKSI Daerah Jawa Barat	Sekunder	Kota Bandung	Jawa Barat
50	NP50-MC21	Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel)	Sekunder	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
51	NP51-MC21	KSP Nasari	Sekunder	Kota Semarang	Jawa Tengah
52	NP52-MC21	Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi)	Sekunder	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
53	NP53-MC21	Koperasi Jasa Milenial Digital Indonesia Atau IDM Coop	Digital	Kota Jakarta	DKI Jakarta
54	NP54-MC21	Koperasi Jasa Warko Digital Nusantara (Warko.id)	Digital	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
55	NP55-MC21	KONSEP KOPERASI DIGITAL (Kop Multi Pihak) PASAR KOMUNITAS (Oleh SYNCORE CONSULTAN)	Digital	Kab. Sleman	DI Yogyakarta
56	NP56-MC21	UStreet Plus Indonesia (Start-up)	Digital	Kota Bandar Lampung	Lampung
57	NP57-MC21	MYCOOP (PT Sakti Kinerja Kolaborasindo)	Digital	Kab. Banyumas	Jawa Tengah
58	NP58-MC21	DOOMU	Digital	Kab. Banyumas	Jawa Tengah
59	NP59-MC21	PITOO.COOP	Digital	Kab. Purwokerto	Jawa Tengah
60	NP60-MC21	KejarFakta.co	Digital	Kab. Lampung Barat	Lampung



Daftar koperasi yang telah memenuhi syarat
untuk mengikuti Program Koperasi Modern 2022
dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Koperasi Pangan

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
1	P41-MC22	Koperasi Unit Desa (KUD) Tiku V Jorong	Kelapa Sawit	Kab. Agam	Sumatera Barat
2	P42-MC22	Koperasi Serba Usaha Alam Bahari	Pakan Ikan, tambak Ikan, hasil tangkap di laut	Kab. Pandeglang	Banten
3	P43-MC22	Koperasi Serba Usaha Karika	Carica	Kab. Wonosobo	Jawa Tengah
4	P44-MC22	Koperasi Produsen Arinagata	Kopi	Kab. Aceh Tengah	NAD
5	P45-MC22	KSU Mamminasae	Bibit kelapa sawit, Beras, Gabah	Kab. Nunukan	Kalimantan Utara
6	P46-MC22	KUD Tani Luhur	Susu sapi	Kab. Malang	Jawa Timur
7	P47-MC22	Koperasi Produsen Primadona	Cabe dan Hortikultura	Kab. Situbondo	Jawa Timur
8	P48-MC22	Koperasi Pemasaran Setia	Manggis	Kab. Tabanan	Bali
9	P49-MC22	Koperasi Pemasaran APPOLI (Aliansi Petani Padi Organik Boyolali)	Beras Organik dan Palawija	Kab. Boyolali	Jawa Tengah
0	P50-MC22	Koperasi Produsen Karya Tiwi Manunggal	Gula Semut	Kab. Kulon Progo	DIY
1	P51-MC22	Koperasi Produsen Gayo Highland	Kopi	Kab. Aceh Tengah	NAD

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
12	P52-MC22	Koperasi Usaha Mandiri Lestari Makmur	Apel	Kab. Malang	Jawa Timur
13	P53-MC22	Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri	Perikanan Budidaya dan Pakan	Kab. Oku Timur	Sumatera Selatan
14	P54-MC22	Koperasi Produsen Agro Gelem Hijau	Jagung	Kab. Lampung Timur	Lampung
15	P55-MC22	Koperasi Mina Muara Sejahtera	Perikanan Tangkap dan Budidaya Udang	Kab. Lebak	Banten
16	P56-MC22	Koperasi Produsen Tani Ngudi Jaya Lestari	Beras	Kab. Tulang Bawang Barat	Lampung
17	P57-MC22	Koperasi Produsen Madura Multifarm Agromandiri	Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Daur Ulang	Kab. Bangkalan	Jawa Timur
18	P58-MC22	KUD Anugrah	Beras	Kab. Grobogan	Jawa Tengah
19	P59-MC22	Koperasi Jasa Mina Fajar Sidik	Perikanan Tangkap	Kab. Subang	Jawa Barat
20	P60-MC22	Koperasi Jasa Peternak Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KOPAKUB)	Ayam	Jakarta Timur	DKI Jakarta
21	P61-MC22	Koperasi Arabika Tani	Kopi	Kab. Kerinci	Jambi
22	P62-MC22	Koperasi Sumber Mulyo S758	Rumput Laut	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur
23	P63-MC22	Koperasi Max Yasa	Hortikultura (Buncis Kenya)	Kab. Purbalingga	Jawa Tengah
24	P64-MC22	Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS CikaJang)	Susu Sapi	Kab. Garut	Jawa Barat
25	P65-MC22	KUD Batu	Susu sapi	Kota Batu	Jawa Timur
26	P66-MC22	Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya	Sapi Pedaging	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
27	P67-MC22	Koperasi Produsen Serba Usaha Tandangsari	Susu Segar, Yogurt, Keju, Pakan Ternak	Kab. Sumedang	Jawa Barat
28	P68-MC22	KSU Gardu Tani Al Barokah	Beras Organik	Kab. Semarang	Jawa Tengah
29	P69-MC22	Koperasi Wisata Mina Bahari 45	Pelengkapan Ikan dan Wisata Bahari	Kab. Bantul	DIY
30	P70-MC22	Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternak KPS Bogor	Susu Sapi	Kab. Bogor	Jawa Barat
31	P71-MC22	Koperasi Peternak Sapi Perah (PSP) Saluyu	Susu Sapi	Kab. Kuningan	Jawa Barat
32	P72-MC22	Koperasi Produsen Mitra Perhutanan Sosial Lodra Mandiri	Kopi	Kab. Bandung	Jawa Barat
33	P73-MC22	Koperasi KPL Mina Sumitra	Perikanan Tangkap	Kab. Indramayu	Jawa Barat
34	P74-MC22	KOPERASI PRODUSEN SYARIAH GAMBIR ANAM KOTO MANDIRI	Gambir	Kab. Lima Puluh Kota	Sumatera Barat
35	P75-MC22	Koperasi Peternak Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan	Susu Sapi	Kab. Pasuruan	Jawa Timur
36	P76-MC22	Koperasi Jasa Perikanan Tuna Dufa-Dufa Macahaya	Perikanan Tangkap	Kota Ternate	Maluku Utara
37	P77-MC22	Koperasi Produsen Rempah Vanila Nusantara (KARAVAN)	Vanila dan Aneka Rempah	Kab. Boyolali	Jawa Tengah
38	P78-MC22	Koperasi Produsen Sari Buah Kopi	Kopi	Kab. Garut	Jawa Barat
39	P79-MC22	Koperasi Garda Bumi Nusantara	Minyak Sereh Wangi (Produk turunan ; wedang uwuh, hand sanitizer, fresh care, aromaterapi,	Kab. Majalengka	Jawa Barat

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
			pembersih lantai dll). Jagung, Mangga, Alpukat, Kopi dll		
40	P80-MC22	Koperasi Mitra Mandiri	Bibit Sapi	Kab. Merangin	Jambi
41	P81-MC22	Koperasi Produksi Sentra Rendang Payo Payakumbuh	Rendang	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat
42	P82-MC22	Koperasi Produsen Talenta Inovasi Muda	Beras, Gula dan Sayur	Kab. Landak	Kalimantan Barat
43	P83-MC22	Koperasi Kendeng Rimba Raya	Minyak Kayu Putih	Kab. Grobogan	Jawa Tengah
44	P84-MC22	Koperasi Konsumen Gerna Tani Sejahtera	Hasil Pertanian	Kota Batam	Kep. Riau
45	P85-MC22	Koperasi Bolo Tani Makmur	Buah Kesemek dan Apel	Kota Batu	Jawa Timur
46	P86-MC22	Koperasi Produsen Pobri Jaya Bersama	Pakan Ternak	Kota Lhokseumawe	NAD
47	P87-MC22	Koperasi Unit Desa (KUD) Bahagia	Pupuk	Kab. Pati	Jawa Tengah
48	P88-MC22	Koperasi Ekonomi Kerakyatan Indonesia Haraka	Beras	Kota Surakarta	Jawa Tengah
49	P89-MC22	Koperasi Petambak Bumi Dipasena	Udang	Kab. Tulang Bawang	Lampung
50	P90-MC22	KUD Jatinom	Susu Sapi	Kab. Klaten	Jawa Tengah
51	P91-MC22	Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan	Ayam Petelur	Kab. Pasuruan	Jawa Timur
52	P92-MC22	Koperasi Unit Desa (KUD) Gondanglegi	Tebu	Kab. Malang	Jawa Timur
53	P93-MC22	Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias	VCO	Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara
54	P94-MC22	Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Karya	Pupuk	Kab. Dharmasraya	Sumatera Barat

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
55	P95-MC22	Koperasi Perikanan Mina Lemadang Maluku	Perikanan Tangkap	Kab. Maluku Tengah	Maluku
56	P96-MC22	Koperasi Unit Desa (KUD) Minasari	Perikanan Tangkap	Kab. Pangandaran	Jawa Barat
57	P97-MC22	Koperasi Ebler Suth Cokran	Kakao	Kab. Manokwari Selatan	Papua Barat
58	P98-MC22	Koperasi Tani Sekarmelati	Karbon dan Minyak Kelapa	Kab. Ciamis	Jawa Barat
59	P99-MC22	Koperasi Produsen Makmur Sentosa	Beras dan Ternak	Kab. Ponorogo	Jawa Timur
60	P100-MC22	Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rejeki	Beras	Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
61	P101-MC22	Koperasi Ngawi Tani Mandiri	Beras	Kab. Ngawi	Jawa Timur
62	P102-MC22	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	Perikanan	Kota Ternate	Maluku Utara
63	P103-MC22	Koperasi Serba Usaha (KSU) Margi Rahayu	Susu sapi	Kota Batu	Jawa Timur
64	P104-MC22	Koperasi Wanita Ikaboga	Rendang	Kota Padang	Sumatera Barat
65	P105-MC22	Koperasi Produsen Masyarakat Perlindungan Geografis Garam Amed	Garam	Kab. Karangasem	Bali
66	P106-MC22	Primkopti Indramayu	Produsen Tahu Tempe	Kab. Indramayu	Jawa Barat
67	P107-MC22	Koperasi Nashrul Ummah Nusantara	Ayam	Kab. Kudus	Jawa Tengah
68	P108-MC22	Koperasi Produksi Ternak Noetnana	Peternakan Sapi	Kota Kupang	NTT
69	P109-MC22	Koperasi Petani Tambak Salsabila	Udang Vaname, Ikan Bandeng, Ikan Nila	Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
70	PT10-MC22	KSU Megataru	Kelapa	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
71	PT11-MC22	Koperasi Produksi Jamur Merekah	Jamur	Kab. Bantul	DIY
72	PT12-MC22	Koperasi Produsen Mambo Mina Mekar Sejahtera	Udang Vaname	Kab. Bekasi	Jawa Barat
73	PT13-MC22	Kop Produsen Rimbun Jaya Tiga	Domba	Kab. Pesawaran	Lampung
74	PT14-MC22	Koperasi Produsen Petani Keren	Beras	Kab. Buleleng	Bali
75	PT15-MC22	Koperasi Produsen Mitra Tani Jatigede	Mangga	Kab. Sumedang	Jawa Barat
76	PT16-MC22	Primkopti Harum	Tahu Tempe	Kab. Kendal	Jawa Tengah
77	PT17-MC22	Koperasi Produsen Patchouli Aromatic Coop	Minyak Nilam	Kota Banda Aceh	NAD
78	PT18-MC22	Koperasi Anugerah Jonggon Lestari	Jahe, dan Biofarmaka	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
79	PT19-MC22	Koperasi Serba Usaha Letoedae	Peternakan Sapi dan Pertanian	Kota Kupang	NTT
80	PT20-MC22	Koperasi Produsen Saung Tani Millennial	Mangga	Kab. Cirebon	Jawa Barat

2. Koperasi Non-Pangan

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
1	NP61-MC22	Koperasi Sasuka Online	Digital	Kab. Sleman	D.I Yogyakarta
2	NP62-MC22	Koperasi Bokar Tanah Laut	Jasa	Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan
3	NP63-MC22	KOPERASI WANITA MANDIRI	Jasa	Kotamadya Batu	Jawa Timur

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
4	NP64-MC22	KOPERASI JASA INSAN INKA MULTI SOLUSI	Jasa	Kab. Madiun	Jawa Timur
5	NP65-MC22	KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA MALANG (KOPEGTEL MALANG)	Jasa	Kota Malang	Jawa Timur
6	NP66-MC22	Koperasi Angkutan Laut Karya Bahari	Jasa	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat
7	NP67-MC22	KOPERASI PRODUSEN RUMAH KITA BERDAYA	Jasa	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
8	NP68-MC22	Koperasi Konsumen Penjahit Bertuah	Jasa	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
9	NP69-MC22	Koperasi Warkopin Maju Jaya	Jasa	Kab. Banyumas	Jawa Tengah
10	NP70-MC22	Koperasi Karyawan Pelita Harapan	Jasa	Kab. Pacitan	Jawa Timur
11	NP71-MC22	KSU Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI)	Konsumen	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
12	NP72-MC22	KSU PEREMPUAN	Konsumen	Kabupaten Dharma Raya	Sumatera Barat
13	NP73-MC22	Koperasi Simpatik	Konsumen	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
14	NP74-MC22	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH EMPAT LIMA	Konsumen	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
15	NP75-MC22	Koperasi Konsumen Syariah	Konsumen	Kota Bukit Tinggi	Sumatera

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
		Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi			Barat
16	NP76-MC22	Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Kamadhuk	Konsumen	Kota Denpasar Barat	Bali
17	NP77-MC22	Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera	Konsumen	Kota Cirebon	Jawa Barat
18	NP78-MC22	KOPERASI WANITA SUMBER BRANTAS	Konsumen	Kotamadya Batu	Jawa Timur
19	NP79-MC22	KOPERASI KONSUMEN WANITA KRIYA USAHA "MCC"	Konsumen	Kotamadya Mojokerto	Jawa Timur
20	NP80-MC22	Koperasi Syariah BMT El-Arbah Kuncimaju	Konsumen	Kab. Kuningan	Jawa Barat
21	NP81-MC22	KOPERASI KONSUMEN BAGUS BAROKAH GURU SANTRI	Konsumen	Kab. Pamekasan	Jawa Timur
22	NP82-MC22	BMT Sarana Wiraswasta Muslim	Konsumen	Kota Malang	Jawa Timur
23	NP83-MC22	Koperasi serba usaha Rancage	Konsumen	Kab. Bogor	Jawa Barat
24	NP84-MC22	PELITA SEJAHTERA	Konsumen	Kota Malang	Jawa Timur
25	NP85-MC22	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH KAUM IBU AL IKHLAS	Konsumen	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara
26	NP86-MC22	KOPERASI KONSUMEN TERANG AMANAH BERSAMA	Konsumen	Kota Sukabumi	Jawa Barat
27	NP87-MC22	Koperasi Pegawai Republik	Konsumen	Kab. Madiun	Jawa Timur

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
		Indonesia Beringin			
28	NP88-MC22	Koperasi Konsumen Griya Husada	Konsumen	Kab. Bangkalan	Jawa Timur
29	NP89-MC22	Koperasi Konsumen Karyawan Yayasan Fathul Huda Bandung	Konsumen	Kota Bandung	Jawa Barat
30	NP90-MC22	KUD USAHA BERSAMA	Konsumen	Kab. Lampung Utara	Lampung
31	NP91-MC22	Koperasi Konsumen Mitra Usaha Assunnah	Konsumen	Kota Cirebon	Jawa Barat
32	NP92-MC22	Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Konsumen	Kab. Limapuluh Kota	Sumatera Barat
33	NP93-MC22	KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati	Konsumen	Kota Cirebon	Jawa Barat
34	NP94-MC22	Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Millennial	Kab. Sleman	DI Yogyakarta
35	NP95-MC22	Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret	Millennial	Kota Surakarta	Jawa Tengah
36	NP96-MC22	Koperasi Pemasaran Syariah Ikhlas Beramal	Pariwisata	Kab. Bangkalan	Jawa Timur
37	NP97-MC22	Koperasi Pemasaran Sahabat Damandiri Sejahtera	Pariwisata	Kab. Boyolali	Jawa Tengah
38	NP98-MC22	Koperasi Pakat Sama	Produksi	Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
39	NP99-MC22	Koperasi Produsen Jaga Alam Lestari	Produksi	Kab. Sukabumi	Jawa Barat
40	NP100-MC22	Kasongan Usaha Bersama	Produksi	Kab. Bantul	D.I Yogyakarta
41	NP101-MC22	Koperasi Produsen Industri Nilam Gayo (KING)	Produksi	Kab. Gayo Lues	D.I Aceh
42	NP102-MC22	Koperasi Produsen Taman Garam	Produksi	Kab. Sampang	Jawa Timur
43	NP103-MC22	Koperasi Jasa Karya Inovasi Gemilang	Produksi	Kab. Bandung	Jawa Barat
44	NP104-MC22	Koperasi Wanita Jaya Makmur	Simpan - Pinjam	Kabupaten Jember	Jawa Timur
45	NP105-MC22	KOPERASI WANITA KARTINI SEJATI	Simpan - Pinjam	Kotamadya Batu	Jawa Timur
46	NP106-MC22	KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH NOTO UMAT DUKUN	Simpan Pinjam	Kab. Gresik	Jawa Timur
47	NP107-MC22	KPRI WAHANA BAHAGIA	Simpan Pinjam	Kota Pasuruan	Jawa Timur
48	NP108-MC22	Koperasi Simpan Pinjam Sari Permata Niaga	Simpan Pinjam	Kota Denpasar	Bali
49	NP109-MC22	KOPERASI KREDIT AIN HOV AIN	Simpan Pinjam	KAB. MALUKU TENGGARA	Maluku
50	NP110-MC22	KSPPS GIRI ARTA SYARIAH	Simpan Pinjam	Kab. Gunung Kidul	D.I Yogyakarta
51	NP111-MC22	KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH	Simpan Pinjam	Kota Makassar	Sulawesi

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
					Selatan
52	NP112-MC22	KOPERASI KONSUMEN SETIA BUDI WANITA MALANG JAWA TIMUR	Simpan Pinjam	Kotamadya Malang	Jawa Timur
53	NP113-MC22	Koperasi Kuta Mimba	Simpan Pinjam	Kab. Badung	Bali
54	NP114-MC22	KOPERASI PEGAWAI SWADHARMA SURABAYA	Simpan Pinjam	Kota Surabaya	Jawa Timur
55	NP115-MC22	Koperasi Wanita Kencana	Simpan Pinjam	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur
56	NP116-MC22	KOPERASI KARYAWAN PT OTSUKA INDONESIA	Simpan Pinjam	Kab. Malang	Jawa Timur
57	NP117-MC22	KSP BEN SILATU	Simpan Pinjam	KAB. GROBOGAN	Jawa Tengah
58	NP118-MC22	Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Cindelas Tumangkar	Simpan Pinjam	Kab. Sleman	DI Yogyakarta
59	NP119-MC22	KSPPS BMT NU JOMBANG	Simpan Pinjam	Kab. Jombang	Jawa Timur
60	NP120-MC22	Koperasi Simpan Pinjam Saduarsa	Simpan Pinjam	Kota Denpasar	Bali
61	NP121-MC22	KSP Kencana Mukti Tama	Simpan Pinjam	Kab. Banggai	Sulawesi Tengah
62	NP122-MC22	Koperasi Konsumen Wanita Kartini Lestari	Simpan Pinjam	Kab. Simalungun	Sumatera Utara
63	NP123-MC22	KOPERASI KELOMPOK TANI NUSANTARA	Simpan Pinjam	Kab. Malang	Jawa Timur

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
64	NP124-MC22	KSP KARYA BAITUL MANDIRI	Simpan Pinjam	KAB. CIANJUR	Jawa Barat
65	NP125-MC22	KOPERASI PEGAWAI NEGERI KENCANA	Simpan Pinjam	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
66	NP126-MC22	Sari Parama Dana	Simpan Pinjam	Kab. Gianyar	Bali
67	NP127-MC22	Primer Koperasi TNI Angkatan Laut Arsenal Batuporon	Simpan Pinjam	Kab. Bangkalan	Jawa Timur
68	NP128-MC22	Koperasi Simpan Pinjam Ema Duta Mandiri	Simpan Pinjam	Kota Denpasar	Bali
69	NP129-MC22	KSPPS BMT BINA IHSANUL FIKRI	Simpan Pinjam	Kota Yogyakarta	D.I Yogyakarta
70	NP130-MC22	KOPSYAH BMT NURUL UMMAH NGASEM JAWA TIMUR	Simpan Pinjam	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur



Daftar koperasi yang telah memenuhi syarat
untuk mengikuti Program Koperasi Modern 2023
dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Koperasi Pangan

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
1	P121-MC23	Koperasi Pedagang Kopi Ketiar	Kopi	Aceh Tengah/Takengon	Aceh
2	P122-MC23	Koperasi Produksi Sawit Sejahtera Blok 30	Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	Kab. Aceh Singkil	Aceh
3	P123-MC23	KSU Beudoh Beusare	Padi	Kab. Pidie	Aceh
4	P124-MC23	Koperasi Produsen Mandiri Sinar Nusantara (Promassa)	Umbi Porang dan Sorghum	Aceh Barat	Aceh
5	P125-MC23	Koperasi Produsen Meugah Mandiri Agung	Peternakan dan pupuk kompos	Bireuen	Aceh
6	P126-MC23	Koperasi Tunas Usaha Sejahtera	Hasil perikanan	Aceh Besar	Aceh
7	P127-MC23	Koperasi Kertha Agro Ekowisata Jatiluwh	Beras Merah	Tabanan	Bali
8	P128-MC23	Koperasi Pemasaran KBS Kopi Arabika MPIG	Kopi bubuk cap Jempol	Kab. Bangli	Bali

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
9	P129-MC23	KSU Seberang Bersatu	Hasil perikanan	Belitung	Bangka Belitung
10	P130-MC23	Koperasi Kitanu Agro Nusantara	Budidaya Udang Vaname	Serang	Banten
11	P131-MC23	Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara	Gula semut dan minuman jahe	Pandeglang	Banten
12	P132-MC23	Koperasi Produksi Amanah Sejati	Ikan gurami, ikan nila, dan ikan lele, Jeruk kalamansi	Bengkulu	Bengkulu
13	P133-MC23	Koperasi Perkasa Willis Sejati	Produksi Gula Semut	Kulonprogo	DIY
14	P134-MC23	Koperasi Sapi Merapi Sejahtera	Produksi Susu	Sleman	DIY
15	P135-MC23	Koperasi Petani Indonesia Nasional	Kopi dan madu	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
16	P136-MC23	Koperasi Madeinitb Superconnection	Beras Organik	Jakarta Timur	DKI Jakarta
17	P137-MC23	Koperasi Produsen Sinar Naga Mas	Hasil perikanan	Bone Bolango	Gorontalo
18	P138-MC23	Koperasi Unit Desa (KUD) Suka Makmur	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Tanjung Jabung Barat	Jambi
19	P139-MC23	Koperasi Bumi Tani Padjadjaran	Benih jagung dan jagung	Bandung	Jawa Barat

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
20	P140-MC23	Koperasi Karya Nugraha Jaya Kuningan	Produksi susu	Kuningan	Jawa Barat
21	P141-MC23	Koperasi Produsen Tani Bangkit Sejahtera	Perkebunan buah, distributor pupuk, penjualan bibit, menjual ayam karkas	Cianjur	Jawa Barat
22	P142-MC23	Koperasi Pemasaran Pondok Pesantren Baitunnajah	Hortikultura dan Ternak Domba	Kab. Bandung	Jawa Barat
23	P143-MC23	Koperasi Produsen Mitra Tani Bersama	Jagung	Garut	Jawa Barat
24	P144-MC23	Koperasi Produsen Petani Puntang Mulia Mandiri	Pertanian dan pengolahan pasca panen kopi	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
25	P145-MC23	Koperasi Produsen Petani Indonesia Dukuhseti	Beras aromatic, beras, ikan, kelapa kopyor, dan kopi	Pati	Jawa Tengah
26	P146-MC23	PRIMKOPTI Kab. Brebes	Penyediaan bahan baku kedelai untuk anggota pengrajin tahu dan tempe	Brebes	Jawa Tengah
27	P147-MC23	Koperasi Produsen Purworejo Maju Selaras	Gula semut dan kopi	Purworejo	Jawa Tengah

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
28	P148-MC23	Koperasi Produsen Berkah Mandiri Sejahtera	Budidaya kambing dan ikan lele	Banyumas	Jawa Tengah
29	P149-MC23	KPRI KOBAPTO	Simplisia basah dan kering	Karanganyar	Jawa Tengah
30	P150-MC23	Koperasi Bima Lukar	Peternakan kambing dan susu perah	Banjarnegara	Jawa Tengah
31	P151-MC23	Koperasi Konsumen Kopontren Rohmatul Ummah	Produksi Pakan Ikan	Tulung Agung	Jawa Timur
32	P152-MC23	Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ihsan	AMDK Al-Barokah	Kab. Sampang Madura	Jawa Timur
33	P153-MC23	Koperasi Konsumen Aura Indonesia Sejahtera	Sambal olahan seafood	Banyuwangi	Jawa Timur
34	P154-MC23	Koperasi Produsen Duta Horti Gresik	Penjualan produk olahan buah jeruk, buah mangga, buah segar mangga, jeruk, melon	Kabupaten Gresik	Jawa Timur
35	P155-MC23	Koperasi Produsen Pondok Pesantren Azidan Al Barokah	Keripik Pisang Gedang Koe	Kota Probolinggo	Jawa Timur

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
36	P156-MC23	Koperasi Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Berkah	Pembuatan kopi jinten	Ponorogo	Jawa Timur
37	P157-MC23	Koperasi Produsen Petani Indonesia Tuban	Hasil Tani (Jagung, Padi, Kacang Tanah, Gaplek), Benih Kangkung	Tuban	Jawa Timur
38	P158-MC23	Koperasi Wanita Putri Gelora	Keripik dan kerupuk	Blitar	Jawa Timur
39	P159-MC23	Koperasi Ihyaus Sunnah Al Hasany	Kopi Bubuk	Jember	Jawa Timur
40	P160-MC23	Koperasi Serba Usaha " Surya Abadi Kayumas"	Kopi	Situbondo	Jawa Timur
41	P161-MC23	Koperasi Mitra Berlian	Perikanan, Penjualan Pupuk dan Pertambakan Ikan	Sambas	Kalimantan Barat
42	P162-MC23	Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Kab. Tanah Laut	Kalimantan Selatan
43	P163-MC23	Koperasi Produsen Sawit Makmur	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Kab. Tanah Laut	Kalimantan Selatan
44	P164-MC23	Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera	1. Budidaya Kelapa Sawit, Trading TBS, dan Minyak Goreng	Banjarmasin	Kalimantan Selatan

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
			2. Simpan Pinjam dan Deposito 3. Distributor Pupuk 4. Ternak Kambing, Madu Kelulut		
45	P165-MC23	Koperasi Produsen Pengembangan Bisnis Parajakian	Peternakan/Pembibitan dan budidaya lebah madu kelulut	Barito Utara/Kota Muara Teweh	Kalimantan Tengah
46	P166-MC23	Koperasi Serba Usaha Belawan Hapakat	Perkebunan Kelapa Sawit 2. Jasa Sewa Blok Pasar 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Simpan Pinjam	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
47	P167-MC23	Koperasi Serba Usaha Maangkat Utus	Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
48	P168-MC23	Koperasi Srikandi Barito Raya	Teh Bajakah	Barito Utara	Kalimantan Tengah
49	P169-MC23	Koperasi Unit Desa Sekar Tani	Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
50	P170-MC23	Koperasi Produsen Pengembangan Bisnis Benangin Maju Bersama Pama Bharinto	Jagung Hibrida dan peternakan ayam	Barito Utara	Kalimantan Tengah
51	P171-MC23	Koperasi Mitra Cahaya Batuah	Perikanan tangkap, tambak	Seruyan	Kalimantan Tengah
52	P172-MC23	Koperasi Produsen Mina Raharja	Hasil perikanan	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
53	P173-MC23	Koperasi Unit Desa Karya Tani	Perdagangan beras	Barito selatan	Kalimantan Tengah
54	P174-MC23	Koperasi Kukar Idaman Lestari	Budidaya lebah dan produksi madu	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
55	P175-MC23	Koperasi Pemasaran Sarana Bangun Lampung	Porang, Jagung Perdagangan Besar Umbi dan Palawija, Pertanian Aneka Umbi Palawija	Bandar Lampung	Lampung
56	P176-MC23	Koperasi Nelayan Inti Rakyat	Pengasapan Ikan	Tanggamus	Lampung
57	P177-MC23	Koperasi Produsen Timur Jaya Abadi	Perikanan, Waserba & Pengelolaan BBM	Kepulauan Sula	Maluku Utara

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
58	P178-MC23	KSU Masyarakat Tani dan Nelayan Sabuk Hijau	Garam, Penangkapan ikan, dan penyewaan excavator	Kab. Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
59	P179-MC23	Koperasi Pemasaran Bumma Sanggar Mandiri	Kopi robusta tambora, kacang mete, madu dan kerajinan cobek	Bima	Nusa Tenggara Barat
60	P180-MC23	Koperasi Maju Berkarya Keerom	Produksi Jagung Kering	Keerom	Papua
61	P181-MC23	Koperasi Papua Agro Lestari	Produsen Bibit Jagung Komposit	Keerom	Papua
62	P182-MC23	Koperasi Karya Mukti	Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Rokan Hilir	Riau
63	P183-MC23	Koperasi Kospermindo	Rumput laut, Cafe	Makassar	Sulawesi Selatan
64	P184-MC23	Koperasi Produsen Mitra Usaha Perkasa	Beras	Wajo Sengkang	Sulawesi Selatan
65	P185-MC23	Koperasi Mappatuwo	Garam	Pangkep	Sulawesi Selatan

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
66	P186-MC23	Koperasi Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP M3) Tanadoang	1. Ikan pelagis kecil dan besar (layang, deho, cakalang, tuna) 2. Ikan dasar (demersal) 3. Gurita, sotong, teripang, lobster 4. Jasa pembekuan Ikan (Unit Pengolahan Ikan)	Kab. Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
67	P187-MC23	Koperasi Hasil Laut Fikram	Hasil perikanan	Luwu Utara	Sulawesi Selatan
68	P188-MC23	KUD Budi Mukti	Beras	Donggala	Sulawesi Tengah
69	P189-MC23	Koperasi Produsen Arsy Berkah Cahaya	Beras 1. Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung 2. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Kota Palu	Sulawesi Tengah

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
			3. Pertanian Aneka Umbi Palawija 4. Pertanian Jagung 5. Pertanian Padi Hibrida 6. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun 7. Budidaya Biota Air Laut Dan Lainnya 8. Industri Pendinginan/Pengemasan Biota Air Lainnya 9. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut		
70	P190-MC23	Koperasi Unit Desa (KUD) Kencana Murni	Industri Penggilingan Padi dan Penyisihan Beras	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah
71	P191-MC23	Koperasi Serba Usaha Adi Jaya Lestari	Frozen Fish (Octopus & Ikan Tuna komoditi utamanya)	Kendari	Sulawesi Tenggara

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
72	P192-MC23	Koperasi Produsen Purnama Jaya Mandiri	Perikanan tangkap dan tambak	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
73	P193-MC23	Koperasi Produsen Nelayan Bina Usaha Bersama	Ikan, Ubur-ubur, Rumput Laut Sargassum, Pengolahan ikan teri	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
74	P194-MC23	Koperasi Baitulmal Ar-Rahman Nusantara	1. Produk saraba instan bubuk 2. Produk VCO 3. Produk abon ikan 4. Produk kerupuk / keripik 5. Produk aneka kue basa 6. Agribisnis budidaya jahe 7. Agribisnis budidaya rumput laut 8. Penjualan herbal 9. Jasa penjualan sembako 10. Jasa penjualan ATK dan alat kantor	Buton Tengah	Sulawesi Tenggara

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
			Tl. Jasa keuangan syariah		
75	P195-MC23	Kopnel Benteng Lohiya Jaya	Rumput Laut	Muna	Sulawesi Tenggara
76	P196-MC23	Koperasi Pemasaran Perikanan TIRTA MAS	Perikanan tangkap	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara
77	P197-MC23	Koperasi Produsen Bahari Bulu Lestari	Perikanan tangkap, Crustacea (Kepiting)	Kab.Kep.Sangihe	Sulawesi Utara
78	P198-MC23	Koperasi Perikanan Maming	Hasil perikanan	Sangihe	Sulawesi Utara
79	P199-MC23	Koperasi Serba Usaha Sangir Mandiri	Kopi	Solok Selatan	Sumatera Barat
80	P200-MC23	Koperasi Serba Usaha Ekonomi Desa	Pengolahan gula semut dan tebu	Kabupaten Solok	Sumatera Barat
81	P201-MC23	Koperasi Pemasaran Anak Nagari Minang Kabau (KOPASANAM)	Pemasaran bumbu rendang	Padang	Sumatera Barat
82	P202-MC23	Koperasi Produsen Serba Usaha Solok Radjo	Kopi (Green Bean) dan ATK	Kabupaten Solok	Sumatera Barat

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
83	P203-MC23	Koperasi Agribisnis Pincuran Bonjo	Sayuran	Payakumbuh	Sumatera Barat
84	P204-MC23	Koperasi Produsen Ombak Nan Badabua	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Pasaman Barat	Sumatera Barat
85	P205-MC23	Koperasi Serba Usaha Harapan Bersama	Jagung Pipilan	Pasaman Barat	Sumatera Barat
86	P206-MC23	Koperasi Produsen Amal Sejahtera Mandiri	VCO / Minyak Kelapa Murni dan Madu Asli	Padang Pariaman	Sumatera Barat
87	P207-MC23	Koperasi Produsen Tani Bangun Pagi	Beras dan keripik	Solok Selatan	Sumatera Barat
88	P208-MC23	Koperasi Konsumen Maju Bersama Sidodadi	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Pasaman Barat	Sumatera Barat
89	P209-MC23	Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Karamble	Minyak vco dan lidi kelapa	Padang Pariaman	Sumatera Barat
90	P210-MC23	Koperasi Sawit Bersama	Sawit	Pasaman Barat	Sumatera Barat
91	P211-MC23	Koperasi Rempan Jaya	Perkebunan kelapa sawit	Musirawas Utara	Sumatera Selatan

No	No. ID	Nama Koperasi	Produk	Kota/Kab	Provinsi
92	P212-MC23	Koperasi Sembilang Maju Bersama	Kerang, Pembibitan Mangrove	Banyuasin	Sumatera Selatan
93	P213-MC23	Koperasi Gastra Sukses Mandiri	Kerupuk, pempek, dan terasi	Kota Palembang	Sumatera Selatan
94	P214-MC23	Koperasi Jasa Royal Insan Mandiri	Frozen food/biji kopi/beras/minyak	Medan	Sumatera Utara
95	P215-MC23	Koperasi Produsen UMKM Pantai Paris	Kompos Organik dan Jeruk	Simalungun	Sumatera Utara
96	P216-MC23	Koperasi Berkah Abadi Jaya	Cabai	Batu Bara	Sumatera Utara
97	P217-MC23	Koperasi Produsen Sawit Unggul Sejahtera	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara
98	P218-MC23	Koperasi Produsen Petani Indonesia Bukit Kijang	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Kab. Asahan	Sumatera Utara
99	P219-MC23	Koperasi Produsen Pujakesuma Sumatera Utara	Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara
100	P220-MC23	Koperasi Berkah Bersama Darul Mursyid	Kopi Arabika (Green Bean, Roasted Bean, Ground)	Kab. Tapanuli Selatan	Sumatera Utara

2. Koperasi Non-Pangan

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
1	NP131-MC23	Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia	Alas kesehatan, Komponen Otomotif, Komponen kelistrikan, Komponen Alat berat,	Kab. Tegal	Jawa Tengah
2	NP132-MC23	KSU APIKRI	Aneka kerajinan dari berbagai bahan baku	Bantul	DIY
3	NP133-MC23	KOPERASI PRODUSEN KOMUNITAS TOPI BAMBU	Komar : Simpanan Kelompok Anggota Masyarakat Kojek : Simpanan Jangka Pendek Perdagangan umum/Produk	Kab.Tangerang	Banten
4	NP134-MC23	KOPERASI INDUSTRI PENGECORAN LOGAM DAN PERMESINAN BATUR JAYA	BLOKREM METALIK UNTUK KERETA API BLOKREM KOMPOSIT UNTUK KERETA API CYLINDER SLEEVE UNTUK PT. TMMIN	Kab. KLATEN	JAWA TENGAH

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
			MANHOLE GRILL, RODA GIGI KURSI TAMAN, LAMPU TAMAN LAMPU JALAN HOT PLATE DECK DRAIN GIBOULT JOINT BARANG-BARANG COR LAIN SESUAI PESANAN		
5	NP135-MC23	Koperasi Produsen Wana Manunggal Lestari	Kayu bulat dan kayu gergajian, olahan hasil kayu	Gunungkidul	DIY
6	NP136-MC23	KOPERASI PRODUSEN MULTI PIHAK WANATANI BAMBU LESTARI (Kop RPB BAMBU)	BAMBU	MANGGARAI BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR
7	NP137-MC23	KOPERASI SERBA USAHA TRANGSAN MANUNGGAL JAYA (RPB ROTAN)	Produk Furniture Rotan	Kab. SUKOHARJO	JAWA TENGAH
8	NP138-MC23	Koperasi Cinta Carma Bella	Kulit & kerajinan kulit	Kab. Garut	Jawa Barat
9	NP139-MC23	Koperasi konsumen Griya Mas	Produk utama :	Glanyar	Bali

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
		Sedana	Sembako, Barang Kerajinan dan Jasa simpan pinjam		
10	NP140-MC23	Koperasi Produsen Cipta Wastra Sundara	Pemasaran produk kain endek dan songket anggota	Gianyar	Bali
11	NP141-MC23	Koperasi Konsumen AL-MAKKI KARANGBISTAH	Produksi songkok	Sampang	Jawa Timur
12	NP142-MC23	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI PLTU PALABUHANRATU SEJAHTERA BERSAMA PALABUHANARATU	Pengadaan Barang	Kab. Sukabumi	Jawa Barat
13	NP143-MC23	Koperasi Konsumen Karyawan ASABRI Sejahtera	Jasa Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kampus PT ASABRI (Persero) Jasa Layanan Pengemudi Operasional dan Direksi Kampus PT ASABRI (Persero) Jasa Layanan Teknisi Kampus PT ASABRI	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
			(Persero) Jasa Layanan Kesehatan Kampus PT ASABRI (Persero) Jasa Layanan Petugas Masjid dan Kebersihan Kancab PT ASABRI (Persero) Pengadaan Sanitary Bin dan Pengharum Ruang Kampus PT ASABRI (Persero) Pengadaan Piagam Penghargaan untuk Karyawan yang akan memasuki usia Pensiun		
14	NP144-MC23	KOPERASI KARYAWAN SYARIAH PT PIM	SEWA MENYEWA	ACEH UTARA	ACEH
15	NP145-MC23	Koperasi Konsumen Karyawan PT. SGM (Koperkasa)	USP, Minimarket, Snack & Rental	Kota Yogyakarta	DIY
16	NP146-MC23	KOPERASI KARYAWAN SURYA ABADI PT. FAJAR SURYA WISESA	PERDAGANGAN RETAIL	BEKASI	JAWA BARAT

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
		Tbk.			
17	NP147-MC23	Koperasi Pegawai Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	Simpan Pinjam, Swalayan	Jakarta Pusat	DKI Jakarta
18	NP148-MC23	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN PT ADIS DIMENSION FOOTWEAR	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	TANGERANG	BANTEN
19	NP149-MC23	Koperasi Konsumen Pusat Syariah Sarekat Bisnis Pesantren Jawa Timur (Skd)	Perdagangan	Lamongan	Jawa Timur
20	NP150-MC23	Koperasi Konsumen Mitra Usaha Sadaya	SADAYAMART, GULA AREN SERBUK	Tasikmalaya	Jawa Barat
21	NP151-MC23	Koperasi Konsumen Kita Makmur Sejahtera	Produk sembako	Yogyakarta	DIY
22	NP152-MC23	Koperasi Jasa Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Angkutan Darat Wisata	Sleman	DIY

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
23	NP153-MC23	Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta	Ritel	Sieman	DIY
24	NP154-MC23	Koperasi Konsumen Pensiunan Bank BRI Guyub	Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan elektronik	Jakarta Pusat	DKI Jakarta
25	NP155-MC23	Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)	1. Simpan Pinjam 2. Retail : Toko Swalayan K3PG 3. Produksi : AMDK Merek "K" 4. Properti : Perumahan Citra Sari Regency 5. Jasa	Gresik	Jawa Timur
26	NP156-MC23	Koperasi Konsumen BMT Bina Ummat Madani	SIMPAN PINJAM, SIMPANAN, ... Simpanan Pokok (SIMPOK) Simpanan yang di bayarkan sekali selama menjadi anggota. ... Simpanan Wajib (SIMWA) ...	banyuasin	Sumatera Selatan

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
			Simpanan Sukarela (SIRELA) ... Simpanan Berjangka (SIJAKA) ... Simpanan Pendidikan (SIPENA) ... Simpanan Hari Raya (SAHARA) ... Simpanan Qurban (SIQURMA)		
27	NP157-MC23	Koperasi Jasa Sayaga KORPRI Kabupaten Bogor	SPBU dan Sayaga Mart	Kab. Bogor	Jawa Barat
28	NP158-MC23	Kopmen Bangkit Maju dan Sukses (Revitalisasi Pasar)	Perdagangan	Ternate	Maluku Utara
29	NP159-MC23	KOPERASI KONSUMEN KELUARGA BESAR BANK NAGARI	Perdagangan Barang dan Jasa	Padang	Sumatera Barat
30	NP160-MC23	Koperasi Keluarga Besar Semen Padang	angkutan dan distributor semen	Padang	Sumatera Barat
31	NP161-MC23	Koperasi Jasa Bumi Wisata Lestari	Jasa wisata alam, perjalanan wisata, kopi	Kab. Sukabumi	Jawa Barat

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
32	NP162-MC23	KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera	Simpanan dan pembiayaan	Bantul	DIY
33	NP163-MC23	KSPPS BMT ARTHA SEJAHTERA	SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH	BANTUL	DIY
34	NP164-MC23	KSPPS BMT DANA SYARIAH	Simpan Pinjam	Bantul	DIY
35	NP165-MC23	KSPPS BMT DANA INSANI	Simpan Pinjam	Cunungkidul	DIY
36	NP166-MC23	KSPPS BMT UMY	Pembiayaan dan piutang	Yogyakarta	DIY
37	NP167-MC23	KSPPS BMT MOJO BANGUN SENTOSA	SIMPAN PINJAM	BANTUL	DIY
38	NP168-MC23	KSPPS BAITUT TAMWIL MUHAMKA	SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH	PEKALONGAN	Jawa Tengah
39	NP169-MC23	KSPPS BINA MITRA WAHANA AR RAHMAH JATIM	SIJAKO,TARA MUDA,TARA BERKAH,MURABAHA H,MULTIJASA,MUDHA RABAH,AL-QORD	Kota Kediri	Jawa Timur
40	NP170-MC23	KSPPS BMT AL MAWADDAH	Simpanan dan	Kab.Jember	Jawa Timur

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
		BANGSALSARI	pinjaman/pembiayaan		
41	NP171-MC23	KSPPS. BMT NU Jawa Timur	Simpanan / tabungan, Pembiayaan	Kab. Sumenep	Jawa Timur
42	NP172-MC23	KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068	Simpanan dan pinjaman	Kab. Kotawaringin Timur, Kota Sampit	Kalimantan Tengah
43	NP173-MC23	Koperasi Jasa Serikat Talenta Karya	Inkubasi Bisnis, UMKM Detector Assesment kesehatan umkm dan e-learning, investasi	Kota Bandar Lampung	Lampung
44	NP174-MC23	Koperta Langgeng Mulyo	Jasa Simpan Pinjam, Swalayan, dan Kios Pertanian	Kab. Kediri	Jawa Timur
45	NP175-MC23	Koperasi Mitra Sentana Mandiri	Simpan pinjam	Kab. Bangli	Bali
46	NP176-MC23	Koperasi Nelayan Usaha Nelayan Bersama	Es Balok	Kab. Pidie Jaya	Aceh
47	NP177-MC23	Mina Perdana Samudera	Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum Nelayan (SPBUN)	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta

No	No. ID	Nama Koperasi	Kategori	Kota/Kab	Provinsi
			38.14.117		
48	NP178-MC23	Koperasi Konsumen Bahari Pratama	Unit Simpan Pinjam	Kab.Brebes	Jawa Tengah
49	NP179-MC23	Koperasi Konsumen KOGUSDA PANTI	Simpan Pinjam	Kab. Pasaman	Sumatera Barat
50	NP180-MC23	Koperasi Tani Nelayan Sinar Laut	Simpan Pinjam	Kab. Kendal	Jawa Tengah



FORM LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TA. 2023

Unit kerja/Satuan Kerja : Deputi Bidang Perkoperasian

Bulan : Desember 2023

No	KODE	KEGIATAN	Target		PAGU REVISI (Rp.)	Progress Realisasi (s.d.Desember)				Progress Realisasi (Januari s/d Desember)					
			Jmh	Satuan		Kinerja Output		Anggaran		Kinerja Output		Anggaran			
						Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	044.01.02	Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi			73,797,836,000			10,817,949,068	14.66			70,835,860,683	95.99		
	2746	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	725	Koperasi	6,917,388,000	-	Koperasi	0.00	410,699,605	5.94	725	Koperasi	100.00	6,912,144,380	99.92
	QAF	Pelayanan Publik Kepada Koperasi	25	Koperasi	467,000,000	-	Koperasi	0.00	7,007,000	1.50	25	Koperasi	100.00	466,864,904	99.97
	001	Perizinan Berusaha Bagi KSP	25	Koperasi	467,000,000	-	Koperasi	0.00	7,007,000	1.50	25	Koperasi	100.00	466,864,904	99.97
	051	Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam	25	Koperasi	467,000,000	-	Koperasi	0.00	7,007,000	1.50	25	Koperasi	100.00	466,864,904	99.97
	QDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	700	Koperasi	6,450,388,000	-	Koperasi	0.00	403,692,605	6.26	700	Koperasi	100.00	6,445,279,476	99.92
	001	Fasilitasi Akses permodalan dan Penjaminan bagi koperasi	300	Koperasi	2,368,148,000	-	Koperasi	0.00	319,732,731	13.50	300	Koperasi	100.00	2,363,392,836	99.80
	051	Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan	100	Koperasi	576,000,000	-	Koperasi	0.00	26,247,130	4.56	100	Koperasi	100.00	575,404,947	99.90
	052	Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan	200	Koperasi	1,792,148,000	-	Koperasi	0.00	293,485,601	16.38	200	Koperasi	100.00	1,787,987,889	99.77
	002	Pengembangan lembaga APEX Koperasi	1	Model	494,600,000	-	Model	0.00	31,690,534	6.41	1	Model	100.00	494,551,534	99.99
	051	Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan	1	Model	494,600,000	-	Model	0.00	31,690,534	6.41	1	Model	100.00	494,551,534	99.99
	003	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah	100	Koperasi	588,000,000	-	Koperasi	0.00	52,269,340	8.89	100	Koperasi	100.00	587,695,106	99.95
	051	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah	100	Koperasi	588,000,000	-	Koperasi	0.00	52,269,340	8.89	100	Koperasi	100.00	587,695,106	99.95
	004	Sosialisasi Akses Pemodaln bagi Koperasi	300	Koperasi	2,999,640,000	-	Koperasi		-	0.00	300	Koperasi	100.00	2,999,640,000	100.00
	051	Sosialisasi Akses Pemodaln bagi Koperasi	300	Koperasi	2,999,640,000	-	Koperasi	0.00	-	0.00	300	Koperasi	100.00	2,999,640,000	100.00
	052	Koordinasi dan Dukungan Sosialisasi Akses Pemodaln bagi Koperasi	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4442	Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian	808	Koperasi	13,257,808,000	43	Koperasi	5.32	1,457,127,140	10.99	808	Koperasi	100.00	13,144,935,221	99.15
	BDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	2	Koperasi	250,000,000	2	Koperasi	100.00	12,581,300	5.03	2	Koperasi	100.00	249,969,500	99.99
	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran	2	Koperasi	250,000,000	2	Koperasi	100.00	12,581,300	5.03	2	Koperasi	100.00	249,969,500	99.99
	051	Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi	2	koperasi	-	-	koperasi	0.00	-	0.00	-	koperasi	0.00	-	0.00
	052	Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi	2	koperasi	250,000,000	2	koperasi	100.00	12,581,300	5.03	2	koperasi	100.00	249,969,500	99.99
	QDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	806	Koperasi	13,007,808,000	41	Koperasi	5.09	1,444,545,840	11.11	806	Koperasi	100.00	12,894,965,721	99.13
	001	Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan	2	laporan	322,050,000	2	laporan	100.00	-	0.00	2	laporan	100.00	321,987,400	99.98
	051	Inventarisasi potensi pangan berdasarkan sektor usaha	1	laporan	200,000,000	1	laporan	100.00	-	0.00	1	laporan	100.00	199,950,900	99.98

No	KODE	KEGIATAN	Target		PAGU REVISI (Rp.)	Progress Realisasi (s.d.Desember)				Progress Realisasi (Januari s/d Desember)					
			Jmh	Satuan		Kinerja Output		Anggaran		Kinerja Output		Anggaran			
						Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	052	Pengelolaan Database Koperasi Sektor Riil	1	laporan	122,050,000	1	laporan	100.00	-	0.00	1	laporan	100.00	122,036,500	99.99
	002	Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan	175	Koperasi	848,314,000	30	Koperasi	17.14	74,887,800	8.83	175	Koperasi	100.00	832,040,700	98.08
	051	Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha.	150	koperasi	500,000,000	30	koperasi	20.00	-	0.00	150	koperasi	100.00	489,290,600	97.86
	052	Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi	25	koperasi	348,314,000		koperasi	0.00	74,887,800	21.50	25	koperasi	100.00	342,750,100	98.40
	003	Perluasan Jaringan Usaha Koperasi	170	Koperasi	2,453,468,000	-	Koperasi	0.00	358,457,200	14.61	170	Koperasi	100.00	2,433,361,620	99.18
	051	Pemasaran Produk Koperasi melalui Katalog Digital (E-Commerce, LKPP dan PADI)	100	koperasi	499,270,000	-	koperasi	0.00	43,289,200	8.67	100	koperasi	100.00	491,852,900	98.51
	052	Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Ekspor	25	koperasi	326,600,000	-	koperasi	0.00	-	0.00	25	koperasi	100.00	324,055,700	99.22
	053	Pengembangan komoditas Koperasi Pangan substitusi import	20	koperasi	424,350,000	-	koperasi	0.00	-	0.00	20	koperasi	100.00	424,334,000	100.00
	054	Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran	25	koperasi	1,203,248,000	-	koperasi	0.00	315,168,000	26.19	25	koperasi	100.00	1,193,119,020	99.16
	004	Dukungan Fasilitas Factory Sharing	11	Koperasi	4,883,976,000	11	Koperasi	100.00	1,011,200,840	20.70	11	Koperasi	100.00	4,808,431,001	98.45
	051	Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama	11	Koperasi	4,883,976,000	11	Koperasi	100.00	1,011,200,840	20.70	11	Koperasi	100.00	4,808,431,001	98.45
	052	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pasar Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama	12	Koperasi	-	-	Koperasi	0.00	-	0.00		Koperasi	0.00	-	0.00
	005	Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern	450	Koperasi	4,500,000,000	-	Koperasi	0.00	-	0.00	450	Koperasi	100.00	4,499,145,000	99.98
	051	Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern	450	Koperasi	4,500,000,000	-	Koperasi	0.00	-	0.00	450	Koperasi	100.00	4,499,145,000	99.98
	052	Koordinasi dan Dukungan Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern	1	Laporan	-	-	Laporan	0.00	-	0.00	0	Laporan	0.00	-	0.00
	4458	Pengawasan Koperasi	3,600	Koperasi	14,456,689,000	1,310	Koperasi	36.39	1,237,299,496	8.56	5,230	Koperasi	145.28	14,167,416,607	98.00
	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	500,000,000	-	Rekomendasi Kebijakan	0.00	137,735,700	27.55	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	498,586,222	99.72
	001	Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	1	Rekomendasi Kebijakan	500,000,000	-	Rekomendasi Kebijakan	0.00	137,735,700	27.55	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	498,586,222	99.72
	051	Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	1	Rekomendasi Kebijakan	500,000,000	-	Rekomendasi Kebijakan	0.00	137,735,700	27.55	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	498,586,222	99.72
	BDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	-	Koperasi	-	-	Koperasi	0.00	-	0.00	-	Koperasi	0.00	-	0.00
	001	Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi	-	Koperasi	-	-	Koperasi	0.00	-	0.00	-	Koperasi	0.00	-	0.00
	051	Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi	-	Koperasi	-	-	Koperasi	0.00	-	0.00	-	Koperasi	0.00	-	0.00
	BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20	Koperasi	1,080,770,000	-	Koperasi	0.00	74,763,073	6.92	33	Koperasi	165.00	1,045,730,574	96.76
	001	Pengawasan Koperasi Bermasalah	20	Koperasi	1,080,770,000	-	Koperasi	0.00	74,763,073	6.92	33	Koperasi	165.00	1,045,730,574	96.76

No	KODE	KEGIATAN	Target		PAGU REVISI (Rp.)	Progress Realisasi (s.d.Desember)				Progress Realisasi (Januari s/d Desember)				
			Jmh	Satuan		Kinerja Output		Anggaran		Kinerja Output		Anggaran		
						Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	051	Penanganan Koperasi Bermasalah	20	Koperasi	1,080,770,000	- Koperasi	0.00	74,763,073	6.92	33	Koperasi	165.00	1,045,730,574	96.76
	PAA	Undang - Undang	1	RUU	8,522,236,000	- RUU	0.00	-	0.00	1	RUU	100.00	8,520,485,773	99.98
	001	Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya	1	RUU	8,522,236,000	- RUU	0.00	-	0.00	1	RUU	100.00	8,520,485,773	99.98
	051	Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya	1	RUU	2,522,536,000	- RUU	0.00	-	0.00	1	RUU	100.00	2,520,785,773	99.93
	052	Sosialisasi RUU Perkoperasian	1,480	Orng	5,999,700,000	- Orng	0.00	-	0.00	3,518	Orng	237.70	5,999,700,000	100.00
	QAF	Pelayanan Publik kepada Koperasi	1,500	Koperasi	1,791,961,000	1,310 Koperasi	87.33	116,914,614	6.52	1,517	Koperasi	101.13	1,629,286,483	90.92
	001	Implementasi Pengawasan Koperasi dengan Sistem Pengawasan	1,500	Koperasi	1,791,700,000	1,310 Koperasi	87.33	116,914,614	6.53	1,517	Koperasi	101.13	1,629,025,483	90.92
	051	Pengawasan Koperasi	1,500	Koperasi	1,791,700,000	1,310 Koperasi	87.33	116,914,614	6.53	1,517	Koperasi	101.13	1,629,025,483	90.92
	002	Implementasi Pelayanan Badan Hukum Koperasi	0	Koperasi	261,000	0 Koperasi	0.00	-	0.00	-	Koperasi	0.00	261,000	100.00
	051	Pelayanan Badan Hukum Koperasi	0	Koperasi	261,000	0 Koperasi	0.00	-	0.00	-	Koperasi	0.00	261,000	100.00
	QDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	2080	Koperasi	2,561,722,000	40 Koperasi	1.92	907,886,109	35.44	3,680	Koperasi	176.92	2,473,327,555	96.55
	001	Implementasi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2080	Koperasi	2,561,722,000	40 Koperasi	1.92	907,886,109	35.44	3,680	Koperasi	176.92	2,473,327,555	96.55
	051	Sosialisasi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	2000	Koperasi	178,540,000	0 Koperasi	0.00	-	0.00	3,600	Koperasi	180.00	175,700,000	98.41
	052	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Koperasi	40	Koperasi	1,046,282,000	0 Koperasi	0.00	397,295,614	37.97	40	Koperasi	100.00	1,003,837,413	95.94
	053	Penilaian Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Close Loop dan Open Loop)	40	Koperasi	797,500,000	40 Koperasi	100.00	400,657,780	50.24	40	Koperasi	100.00	756,257,780	94.83
	054	Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	65	Orang	539,400,000	65 Orang	100.00	109,932,715	20.38	65	Orang	100.00	537,532,362	99.65
	5615	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan			28,200,000,000			4,793,894,171	17.00				27,706,083,234	98.25
	BAF	Pelayanan Publik Kepada Koperasi	150	Koperasi	5,810,500,000	150 Koperasi	100.00	216,813,252	3.73	150	Koperasi	100.00	5,738,785,939	98.77
	001	Akselerasi Pencapaian Koperasi Modern	150	Koperasi	5,810,500,000	150 Koperasi	100.00	216,813,252	3.73	150	Koperasi	100.00	5,738,785,939	98.77
	051	Akselerasi Pencapaian Koperasi Modern	150	Koperasi	5,810,500,000	150 Koperasi	100.00	216,813,252	3.73	150	Koperasi	100.00	5,738,785,939	98.77
	DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	330	Orang	3,290,450,000	479 Orang	145.15	689,693,429	20.96	689	Orang	208.79	3,171,418,928	96.38
	001	Pelatihan bagi Pengawas Internal Koperasi dan Dewan Pengawas Syariah	330	Orang	3,290,450,000	479 Orang	145.15	689,693,429	20.96	689	Orang	208.79	3,171,418,928	96.38
	051	Pelatihan Bagi Pengawas Internal Koperasi	180	Orang	1,172,315,000	196 Orang	108.89	299,323,697	25.53	316	Orang	175.56	1,132,480,799	96.60
	052	Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah	150	Orang	2,118,135,000	283 Orang	188.67	390,369,732	18.43	373	Orang	248.67	2,038,938,129	96.26
	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	20	Kelompok Masyarakat	1,284,550,000	- Kelompok Masyarakat	0.00	75,686,600	5.89	27	Kelompok Masyarakat	135.00	1,218,235,407	94.84
	001	Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	20	Kelompok Masyarakat	1,284,550,000	- Kelompok Masyarakat	0.00	75,686,600	5.89	27	Kelompok Masyarakat	135.00	1,218,235,407	94.84
	051	Pembentukan Koperasi Bagi Kelompok Strategis	20	Kelompok Masyarakat	1,284,550,000	- Kelompok Masyarakat	0.00	75,686,600	5.89	27	Kelompok Masyarakat	135.00	1,218,235,407	94.84

No	KODE	KEGIATAN	Target		PAGU REVISI (Rp.)	Progress Realisasi (s.d.Desember)				Progress Realisasi (Januari s/d Desember)					
			Jmh	Satuan		Kinerja Output		Anggaran		Kinerja Output		Anggaran			
						Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4,580	Orang	17,814,500,000	1,004	Orang	21.92	3,811,700,890	21.40	5,087	Orang	111.07	17,577,642,960	98.67
	001	Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi Modern	420	Orang	2,961,724,000	250	Orang	59.52	798,183,888	26.95	574	Orang	136.67	2,934,158,841	99.07
	051	Koperasi di Sektor Pangan	30	Orang	729,898,000	-	Orang	0.00	282,928,720	38.76	30	Orang	100.00	728,584,384	99.82
	052	Koperasi di Sektor Non Pangan	390	Orang	2,231,826,000	250	Orang	64.10	515,255,168	23.09	544	Orang	139.49	2,205,574,457	98.82
	002	Pelatihan Akutansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi	180	Koperasi	2,629,871,000	150	Koperasi	83.33	548,790,967	20.87	180	Koperasi	100.00	2,596,296,758	98.72
	051	Koperasi di Sektor Pangan	30	Orang	354,716,000	-	Orang	0.00	51,150,000	14.42	30	Orang	100.00	350,100,000	98.70
	052	Koperasi di Sektor Non Pangan	150	Orang	2,275,155,000	150	Orang	100.00	497,640,967	21.87	150	Orang	100.00	2,246,196,758	98.73
	003	Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar	1,050	Orang	11,107,205,000	-	Orang	0.00	2,035,399,865	18.33	1,159	Orang	110.38	10,953,510,391	98.62
	051	Coaching Bisnis Koperasi/Business Matching	150	Orang	1,097,941,000	-	Orang	0.00	180,711,333	16.46	150	Orang	160.00	1,073,491,083	97.77
	052	Magang/studi banding Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi	240	Orang	5,075,548,000	-	Orang	0.00	1,045,690,200	20.60	240	Orang	100.00	5,060,214,443	99.70
	053	Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi	660	Orang	4,933,716,000	-	Orang	0.00	808,998,332	16.40	769	Orang	116.52	4,819,804,865	97.69
	004	Pelatihan Digitalisasi Koperasi	2,930	Orang	1,115,700,000	604	Orang	20.61	429,326,170	38.48	3,174	Orang	108.33	1,093,676,970	98.03
	051	Pelatihan Digitalisasi Bagi Koperasi	30	Orang	814,700,000	-	Orang	0.00	232,476,170	28.54	30	Orang	100.00	811,476,970	99.60
	052	Pelatihan Tematik-Jarak Jauh	2,900	Orang	301,000,000	604	Orang	20.83	196,850,000	65.40	3,144	Orang	108.41	282,200,000	93.75
	6967	Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi			9,197,639,000				2,918,928,656	31.74				7,180,129,241	78.06
	BMA	Data dan Informasi Publik	1	Dokumen	262,500,000	1	Dokumen	100.00	22,307,500	8.50	1	Dokumen	100.00	240,159,000	91.49
	001	Pengelolaan data Koperasi	1	Dokumen	262,500,000	1	Dokumen	100.00	22,307,500	8.50	1	Dokumen	100.00	240,159,000	91.49
	051	Koordinasi Data Koperasi	1	Dokumen	262,500,000	1	Dokumen	100.00	22,307,500	8.50	1	Dokumen	100.00	240,159,000	91.49
	PAA	Undang-Undang	1	RUU	8,163,200,000	1	RUU	100.00	2,875,777,056	35.23	1	RUU	100.00	6,221,034,071	76.21
	001	Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya	1	RUU	8,163,200,000	1	RUU	100.00	2,875,777,056	35.23	1	RUU	100.00	6,221,034,071	76.21
	051	Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya	1	RUU	8,163,200,000	1	RUU	100.00	2,875,777,056	35.23	1	RUU	100.00	6,221,034,071	76.21
	QAF	Pelayanan Publik kepada Koperasi	150	Koperasi	771,939,000	19	Koperasi	12.67	20,844,100	2.70	583	Koperasi	533.00	718,936,170	93.13
	001	Implementasi Pelayanan Badan Hukum Koperasi	100	Koperasi	460,939,000	-	Koperasi	12.67	8,084,000	1.75	533	Koperasi	533.00	410,553,866	89.07
	051	Pelayanan Badan Hukum Koperasi	100	Koperasi	460,939,000	-	Koperasi	12.67	8,084,000	1.75	533	Koperasi	533.00	410,553,866	89.07
	002	Implementasi Tata Kelola Koperasi	50	Koperasi	311,000,000	19	Koperasi	38.00	12,760,100	4.10	50	Koperasi	100.00	308,382,304	99.16
	051	Implementasi Tata Kelola Koperasi	50	Koperasi	311,000,000	19	Koperasi	38.00	12,760,100	4.10	50	Koperasi	100.00	308,382,304	99.16

No	KODE	KEGIATAN	Target		PAGU REVISI (Rp.)	Progress Realisasi (s.d.Desember)				Progress Realisasi (Januari s/d Desember)					
			Jmh	Satuan		Kinerja Output		Anggaran		Kinerja Output		Anggaran			
						Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (volume)	%	Realisasi (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	044.01.01	Program Dukungan Manajemen			6,762,206,000			1,575,541,673	23.30			6,733,890,421	99.58		
	4946	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian			6,762,206,000			1,575,541,673	23.30			6,733,890,421	99.58		
	AEA	Koordinasi	1	Kegiatan	800,000,000	1	Kegiatan	100.00	226,338,900	28.29	1.00	Kegiatan	100.00	788,881,951	98.61
	001	Koordinasi Ekonomi Makro	1	Kegiatan	400,000,000	1	Kegiatan	100.00	134,006,120	33.50	1.00	Kegiatan	100.00	390,402,454	97.60
	051	Layanan Ekonomi Makro	1	Kegiatan	400,000,000	1	Kegiatan	100.00	134,006,120	33.50	1.00	Kegiatan	100.00	390,402,454	97.60
	002	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	1	kegiatan	400,000,000	0	kegiatan	8.33	92,332,780	23.08	1.00	kegiatan	100.00	398,479,497	99.62
	051	Pelaksanaan Kegiatan Petugas Penyuluh Koperasi	1	Kegiatan	400,000,000	0.08	Kegiatan	8.33	92,332,780	23.08	1.00	Kegiatan	100.0	398,479,497	99.62
	EBA	Layanan Manajemen Dukungan Internal	1	Layanan	2,198,000,000	0	Layanan	8.33	234,689,650	10.68	1.00	Layanan	100.00	2,196,122,715	99.91
	001	Layanan Umum dan Keuangan	1	Layanan	1,086,264,000	0	Layanan	8.33	128,173,400	11.80	1.00	Layanan	100.00	1,084,833,560	99.87
	051	Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Bidang	1	Layanan	1,086,264,000	0.08	Layanan	8.33	128,173,400	11.80	1.00	Layanan	100.0	1,084,833,560	99.87
	994	Layanan Perkantoran Bidang Perkoperasiam	1	Layanan	1,111,736,000	0	Layanan	8.33	106,516,250	9.58	1.00	Layanan	100.00	1,111,289,155	99.96
	002	Operasional kantor	1	Layanan	1,111,736,000	0.08	Layanan	8.33	106,516,250	9.58	1.00	Layanan	100.0	1,111,289,155	99.96
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Unit	714,206,000	-	Unit	0.00	-	0.00	1.00	Unit	100.00	714,000,000	99.97
	001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bidang Perkoperasian	1	Unit	714,206,000	-	Unit	0.00	-	0.00	1.00	Unit	100.00	714,000,000	99.97
	051	Sarana dan Prasarana Internal Bidang Perkoperasian	1	Unit	714,206,000	-	Unit	0.00	-	0.00	1.00	Unit	100.00	714,000,000	99.97
	052	Pengadanaan Kendaran Dinas Eselon I	1	Unit	-	-	Unit	0.00	-	0.00		Unit	0.00	-	0.00
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2	Dokumen	3,050,000,000	0	Dokumen	8.33	1,114,513,123	36.54	2.00	Dokumen	100.00	3,034,885,755	99.50
	001	Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Bidang Perkoperasian	2	Dokumen	3,050,000,000	0.17	Dokumen	8.33	1,114,513,123	36.54	2.00	Dokumen	100.00	3,034,885,755	99.50
	051	Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan	1	Dokumen	2,207,600,000	0.08	Dokumen	8.33	775,811,803	35.14	1.00	Dokumen	100.0	2,332,428,978	105.65
	052	Koordinasi Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi	1	Dokumen	842,400,000	0.08	Dokumen	8.33	338,701,320	40.21	1.00	Dokumen	100.0	702,456,777	83.39
SUB TOTAL (KEGIATAN DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN)					78,791,730,000			12,393,490,741	15.73			75,844,599,104	96.26		
	044.01.02	Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi													
	EB. 4948	Pengembangan dan Penguatan Kontribusi Koperasi			1,768,312,000			265,408,000	15.01			1,725,152,000	97.56		
	BDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	50	Koperasi	1,768,312,000	-	Koperasi	0	265,408,000	15.01	-	Koperasi	0.0	1,725,152,000	97.56
	001	Gerakan Koperasi Yang Diperkuat Oleh Lembaga Gerakan	50	Koperasi	1,768,312,000	-	Koperasi	0.00	265,408,000	15.01	-	Koperasi	0	1,725,152,000	97.56
	051	Penguatan Kerja Sama antar Koperasi	50	Koperasi	-	-	Koperasi	0.00	-	0.00	-	Koperasi	0	-	-
	052	Fasilitasi Operasional Dekopin	1	Kegiatan	1,768,312,000	-	Koperasi	0.00	265,408,000	15.01	1.00	Kegiatan	83.3	1,725,152,000	97.56
SUB TOTAL (KEGIATAN DEKOPIN)					1,768,312,000			265,408,000	15.01			1,725,152,000	97.56		
TOTAL					80,560,042,000			12,658,898,741	15.71			77,569,751,104	96.29		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET		PAGU	JANUARI						KETERANGAN
							TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENT ASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern												
	1.1.	Persentase Koperasi Berkualitas											
		1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17.225.000.000	0	0	0	2,78	479.600.000	2,78	1. terlaksananya RDK Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi 2. Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya 3. Pengawasan Koperasi
	1.2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi											
		1.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	0	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	1	176.600.000	0,81	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran (masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA) 2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan (sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait) 3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan (sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023) 4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi (sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta) 5. Dukungan Fasilitas Factory Sharing (Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023) 6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern (sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan)
		1.2.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	1,52	87.500.000	1,5	-Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. - Updating Data KUK III dan KUK IV - Identifikasi KUR Klaster*
	1.3.	Koperasi Modern											
		1.3.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	0	176.600.000	0,81	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran (masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA) 2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan (sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait) 3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan (sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023) 4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi (sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta) 5. Dukungan Fasilitas Factory Sharing (Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023) 6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern (sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan)
		1.3.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	0	87.500.000	1,5	-Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. - Updating Data KUK III dan KUK IV - Identifikasi KUR Klaster
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan												
	2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik											
		2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,08	0,08	8,3	1,1	74.200.000	1,08	- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023.□ -Layanan rutin pelaporan kegiatan.□ - Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan□
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
	3.1.	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan											
		3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	100	p Masyarakat	6.500.000.000	0	0	0	0	0	0	Identifikasi Pembentukan Koperasi Bagi Kelompok Strategis
		3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27.200.000.000	0	0	0	0	0	0	Pengembangan Kapsitas SDM dalam bentuk Pelatihan-pelatihan
	3.2.	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
		3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	0	0	0	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran (masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA) 2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan (sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait) 3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan (sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023) 4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi (sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta) 5. Dukungan Fasilitas Factory Sharing (Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023) 6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern (sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan)
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang												
	4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian											
		4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,08	0,08	8,3	1,1	74.200.000	1,08	- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023.□ -Layanan rutin pelaporan kegiatan.□ - Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan□
	4.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi											
		4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,08	0,08	8,3	1,1	74.200.000	1,08	- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023.□ -Layanan rutin pelaporan kegiatan.□ - Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan□
	4.3.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang											
		4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,08	0,08	8,3	1,1	74.200.000	1,08	- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023.□ -Layanan rutin pelaporan kegiatan.□ - Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan□

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET		PAGU	FEBRUARI						KETERANGAN
							TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENT ASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern												
	1.1.	Persentase Koperasi Berkualitas											
		1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17.225.000.000	0	0	0	4,1	707.046.250	4,1	1. Dalam Penanganan Koperasi Bermasalah Telah dibentuk Tim pendampingan dan pemantauan Koperasi bermasalah sesuai dengan SPT Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 30/SPT/D.1/ PK.02.00/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 2. Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya Telah dilaksanakan Pembahasan Antar Kementerian (PAK) sebanyak 5 kali (Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 9, Bab 10) 3. Implementasi Pengawasan Koperasi dengan Sistem Pengawasan masih persiapan pelaksanaan kegiatan
	1.2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi											
		1.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	0	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	2,73	482.204.100	2,2	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA 2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait 3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023 4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta 5. Dukungan Fasilitas Factory Sharing Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023, Rapat pembahasan uji kelayakan Koperasi calon pengelola RPB (Sukoharjo dan Batubara) 6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan
		1.2.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	1,81	104.338.050	1,78	- Persiapan pelaksanaan kegiatan - Telah dilaksanakan Pengharmonisasian di The Sahira Hotel Bogor pada Tanggal 24 Februari 2023 - Dari hasil harmon terakhir apa yg perlu di TL /langkah konkret TL agar Rpermen dapat segera di ttd
	1.3.	Koperasi Modern											
		1.3.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	2,73	482.204.100	2,2	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA 2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait 3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023 4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta 5. Dukungan Fasilitas Factory Sharing Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023, Rapat pembahasan uji kelayakan Koperasi calon pengelola RPB (Sukoharjo dan Batubara) 6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan
		1.3.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	1,81	104.338.050	1,78	Persiapan pelaksanaan kegiatan
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan												
	2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik											
		2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,16	0,16	16	6,54	442.102.003	6,42	Kegiatan rutin layanan perencanaan dan penganggaran, Layanan pemantauan dan pelaporan, layanan pengadministrasian kegiatan
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
	3.1.	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan											
		3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	100	p Masyarakat	6.500.000.000	0	0	0	0	0	0	Identifikasi Pembentukan Koperasi Bagi Kelompok Strategis
		3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27.200.000.000	0	0	0	0	0	0	- Pengembangan Kapsitas SDM dalam bentuk Pelatihan-pelatihan - Persiapan pelaksanaan kegiatan
	3.2.	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
		3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	2,73	482.204.100	2,2	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran (masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA) 2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan (sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait) 3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan (sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023) 4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi (sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta) 5. Dukungan Fasilitas Factory Sharing (Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023) 6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern (sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan)
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang												
	4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian											
		4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,16	0,16	16	6,54	442.102.003	6,42	Kegiatan rutin layanan perencanaan dan penganggaran, Layanan pemantauan dan pelaporan, layanan pengadministrasian kegiatan
	4.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi											
		4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,16	0,16	16	6,54	442.102.003	6,42	Kegiatan rutin layanan perencanaan dan penganggaran, Layanan pemantauan dan pelaporan, layanan pengadministrasian kegiatan
	4.3.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang											
		4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,16	0,16	16	6,54	442.102.003	6,42	Kegiatan rutin layanan perencanaan dan penganggaran, Layanan pemantauan dan pelaporan, layanan pengadministrasian kegiatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET	PAGU	MARET							
						TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENT ASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern												
	1.1.	Persentase Koperasi Berkualitas											
		1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17.225.000.000	11	11	0,64	12,27	2.113.143.702	12,27	1. Melakukan pendampingan RAT terhadap 8 (delapan) Koperasi Bermasalah, melakukan pemantauan secara harian terhadap 8 (delapan) Koperasi Bermasalah terkait dengan pembayaran skema perdamaian PKPU yang telah dihomologasi oleh Pengadilan, melakukan mediasi terkait dengan penanganan 8 (delapan) Koperasi Bermasalah dan berkoordinasi dengan Pengurus dan Pengawas 8 (delapan) Koperasi Bermasalah. 2. "1. Telah diselesaikan Pembahasan Antar Kementerian (PAK), penandatanganan Berita Acara Penyelesaian PAK akan dikelilingi ke tiap-tiap K/L anggota PAK 2. Telah disampaikan surat Menteri Koperasi dan UKM kepada Menteri Hukum dan HAM, untuk dilakukan penyeragaman Naskah Akademis, hasil penyeragaman Naskah Akademis sebagai dokumen pendukung pengajuan Harmonisasi 3. Telah dilakukan pertemuan antara Deputi Bidang Perkoperasian dengan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN pada tanggal 21 Maret 2023, membahas persiapan pelaksanaan penyeragaman Naskah Akademis RUU Perkoperasian 4. Telah dilakukan pertemuan lanjutan antara Kepala Biro Hukum dan Kerjasama dan Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi dengan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional dan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN pada tanggal 24 Maret 2023, membahas gambaran umum RUU Perkoperasian 3 Harmonisasi permenkop dan UKM tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dlm pelenyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan"
	1.2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi											
		1.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	0	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	5,37	947.345.250	4,33	Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : "-Telah mendapatkan persetujuan menteri untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar yaitu di Kab Biak Numfor Papua dan Kab Sumba Barat NTT, ditindaklanjuti dengan penandatanganan KEPMENKOP Revitalisasi Pasar oleh Deputi Bidang Perkoperasian - sudah pecah DIPA di tanggal 04 April 2023 untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar di Kab. Biak Numfor Papua dan Kab. Sumba Barat NTT. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan : - "Screening dan seleksi calon peserta koperasi modern thd 95 calon Koperasi modern - Verifikasi via telepon potensial peserta : 50 dan Lolos verifikasi : 46 - Penanganan Program 3M dan Solusi Nelayan - Penanganan Program 3 M dan solusi Nelayan yang sudah mendaftar melalui gform sebanyak 35 koperasi dan koperasi piloting yang belum mengisi gform sebanyak 7 koperasi, total 42 koperasi dari target SPBUN sebanyak 50 Koperasi. Dukungan Fasilitas Factory Sharing : - Telah di sampaikan ke Deputi hasil verifikasi lapangan untuk usulan koperasi pengelola RPB di Kab Batubara dengan komoditas Cabai Merah dan Kab. Sukohardjo dengan komoditas Rotan, - telah di susun kriteria pendamping Koperasi manajemen operasional dan strategi pemasaran - Rapat Koordinasi Studi Kelayakan Rumah Produksi Bersama - Telah dilaksanakan rapat RDK dengan pembahasan terkait evaluasi dan progress kesiapan koperasi pengelola RPB tahun 2022, membahas kriteria pendamping Koperasi untuk manajemen operasional dan strategi pemasaran dan secara intens melakukan komunikasi dan Koordinasi dengan BDO RPB 2022 dan selanjutnya tim RPB tahun 2022 di 3 titik lokasi yaitu Minahasa Selatan, Kutai Kartanegara, dan Kupang akan melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan di minggu kedua bulan April 2023
		1.2.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	9,64	554.950.550	9,49	1. Perizinan Berusaha Bagi KSP : -Telah dilaksanakan Harmonisasi Permenkop Ijin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi - Identifikasi KUR Cluster untuk anggota koperasi
	1.3.	Koperasi Modern											
		1.3.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	5,37	947.345.250	4,33	Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : "-Telah mendapatkan persetujuan menteri untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar yaitu di Kab Biak Numfor Papua dan Kab Sumba Barat NTT, ditindaklanjuti dengan penandatanganan KEPMENKOP Revitalisasi Pasar oleh Deputi Bidang Perkoperasian - Telah melakukan pemenuhan dokumen untuk proses pecah Dipa untuk 2 lokasi pembangunan Revitalisasi Pasa Telah melakukan pemenuhan dokumen untuk proses pecah Dipa untuk 2 lokasi pembangunan Revitalisasi Pasar - sudah pecah DIPA di tanggal 04 April 2023 untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar di Kab. Biak Numfor Papua dan Kab. Sumba Barat NTT. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan : - "Screening dan seleksi calon peserta koperasi modern thd 95 calon Koperasi modern - Verifikasi via telepon potensial peserta : 50 dan Lolos verifikasi : 46 - Penanganan Program 3M dan Solusi Nelayan - Penanganan Program 3 M dan solusi Nelayan yang sudah mendaftar melalui gform sebanyak 35 koperasi dan koperasi piloting yang belum mengisi gform sebanyak 7 koperasi, total 42 koperasi dari target SPBUN sebanyak 50 Koperasi. Dukungan Fasilitas Factory Sharing : - Telah di sampaikan ke Deputi hasil verifikasi lapangan untuk usulan koperasi pengelola RPB di Kab Batubara dengan komoditas Cabai Merah dan Kab. Sukohardjo dengan komoditas Rotan, - telah di susun kriteria pendamping Koperasi manajemen operasional dan strategi pemasaran - Rapat Koordinasi Studi Kelayakan Rumah Produksi Bersama - Telah dilaksanakan rapat RDK dengan pembahasan terkait evaluasi dan progress kesiapan koperasi pengelola RPB tahun 2022, membahas kriteria pendamping Koperasi untuk manajemen operasional dan strategi pemasaran dan secara intens melakukan komunikasi dan Koordinasi dengan BDO RPB 2022 dan selanjutnya tim RPB tahun 2022 di 3 titik lokasi yaitu Minahasa Selatan, Kutai Kartanegara, dan Kupang akan melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan di minggu kedua bulan April 2023
		1.3.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	9,55	554.950.550	9,49	1. Perizinan Berusaha Bagi KSP : -Telah dilaksanakan Harmonisasi Permenkop Ijin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi - Identifikasi KUR Cluster untuk anggota koperasi
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan												
	2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik											
		2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Move Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,25	0,25	25	23,6	1.595.624.953	23,18	"- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023 -Layanan rutin pelaporan kegiatan. - Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan -Koordinasi dan Pemeriksaan dokumen Koperasi yang mengajukan sbg penyalur GKR
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
	3.1.	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan											
		3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	100	p Masyarakat	6.500.000.000	7	7	7	4,28	278.019.636	4,28	Telah dilaksanakan Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas pada 7 Kelompok Strategis (Garut 2, Gunung Kidul 2, Lebak 1, Banyuwangi 2)
		3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27.200.000.000	0	0	0	2,44	784.741	0	Dalam Tahap Koordinasi dan Persiapan

	3.2	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
		3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	5,37	947.345.250	4,33	Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : -Telah mendapatkan persetujuan menteri untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar yaitu di Kab Biak Numfor Papua dan Kab Sumba Barat NTT, ditindaklanjuti dengan penandatanganan KEPMENKOP Revitalisasi Pasar oleh Deputi Bidang Perkoperasian - Telah melakukan pemenuhan dokumen untuk proses pecah DIPA untuk 2 lokasi pembangunan Revitalisasi Pasa Telah melakukan pemenuhan dokumen untuk proses pecah DIPA untuk 2 lokasi pembangunan Revitalisasi Pasar - sudah pecah DIPA di tanggal 04 April 2023 untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar di Kab. Biak Numfor Papua dan Kab. Sumba Barat NTT. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan : - Screening dan seleksi calon peserta koperasi modern thd 95 calon Koperasi modern - Verifikasi via telepon potensial peserta : 50 dan Lolos verifikasi : 46 - Penanganan Program 3M dan Solusi Nelayan - Penanganan Program 3 M dan solusi Nelayan yang sudah mendaftar melalui gform sebanyak 35 koperasi dan koperasi piloting yang belum mengisi gform sebanyak 7 koperasi, total 42 koperasi dari target SPBUN sebanyak 50 Koperasi. Dukungan Fasilitas Factory Sharing : - Telah di sampaikan ke Deputi hasil verifikasi lapangan untuk usulan koperasi pengelola RPB di Kab Batubara dengan komoditas Cabai Merah dan Kab. Sukohardjo dengan komoditas Rotan, - telah di susun kriteria pendamping Koperasi manajemen operasional dan strategi pemasaran - Rapat Koordinasi Studi Kelayakan Rumah Produksi Bersama - Telah dilaksanakan rapat RDR dengan pembahasan terkait evaluasi dan progress kesiapan koperasi pengelola RPB tahun 2022, membahas kriteria pendamping Koperasi untuk manajemen operasional dan strategi pemasaran dan secara intens melakukan komunikasi dan Koordinasi dengan BDO RPB 2022 dan selanjutnya tim RPB tahun 2022 di 3 titik lokasi yaitu Minahasa Selatan, Kutai Kartanegara, dan Kupang akan melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan di minggu kedua bulan April 2023
4.Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang													
	4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian											
		4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,25	0,25	25	23,6	1.595.624.953	23,18	- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023 -Layanan rutin pelaporan kegiatan. - Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan -Koordinasi dan Pemeriksaan dokumen Koperasi yang mengajukan sbg penyalur GKR
4.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi													
		4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,25	0,25	25	23,6	1.595.624.953	23,18	- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023 -Layanan rutin pelaporan kegiatan. - Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan -Koordinasi dan Pemeriksaan dokumen Koperasi yang mengajukan sbg penyalur GKR
4.3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang													
		4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,25	0,25	25	23,6	1.595.624.953	23,18	- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023 -Layanan rutin pelaporan kegiatan. - Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan -Koordinasi dan Pemeriksaan dokumen Koperasi yang mengajukan sbg penyalur GKR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET		PAGU	APRIL						KETERANGAN
							TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENT ASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern												
	1.1.	Persentase Koperasi Berkualitas											
		1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17.225.000.000	11	11	0.64	12,79	2.842.814.482	16,5	- Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya : Pembahasan lanjutan Harmonisasi RUU Pekoperasian dengan Kementerian/Lembaga (FGD tematik akan diselenggarakan di minggu kedua bulan Mei, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Universitas sesuai dengan topik pembahasan FGD.) - Sosialisasi RUU Perkoperasian : Proses lelang direncanakan selesai pada minggu pertama bulan Mei, sehingga penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan pada minggu kedua bulan mei, dan kegiatan Sosialisasi RUU Perkoperasian dapat segera dilaksanakan.
	1.2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi											
		1.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	0	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	7,57	1.334.238.050	6,09	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : * informasi update/progress perkembangan pasar rakyat bahwa Posisi saat ini sedang mempersiapkan penunjukan pihak ke 3 dalam membuat dokumen perencanaan dan administrasi pasar
		1.2.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	12,28	707.142.304	12,09	- Perizinan Berusaha Bagi KSP : identifikasi dan inventarisasi koperasi yang berminat akses KUR Klaster untuk anggota koperasi
	1.3.	Koperasi Modern											
		1.3.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	7,57	1.334.238.050	6,09	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : * informasi update/progress perkembangan pasar rakyat bahwa Posisi saat ini sedang mempersiapkan penunjukan pihak ke 3 dalam membuat dokumen perencanaan dan administrasi pasar
		1.3.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	12,28	707.142.304	12,09	- Perizinan Berusaha Bagi KSP : identifikasi dan inventarisasi koperasi yang berminat akses KUR Klaster untuk anggota koperasi
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan												
	2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik											
		2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,33	0,33	33	30	2.028.952.739	29,48	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
	3.1.	Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan											
		3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	100	Klp Masyarakat	6.500.000.000	7	7	7	40,01	513.901.980	7,91	- Sudah dilaksanakan di kegiatan di wilayah, Yogyakarta, Jawa Barat (Garut), Jawa Timur (Banyuwangi), Papua Tengah (Timika), Papua, Sulut (Manado), Kaltim (Kutai), Banten. - mempersiapkan kegiatan dilokus selanjutnya
		3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27.200.000.000	0	0	0	4,81	1.356.898.480	4,99	- Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar (Coaching Bisnis Koperasi/Business Matching) : Masih Menunggu Pencairan Termin I - Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar (Pelatihan Pengelblaan Organisasi dan Usaha Koperasi) : Masih Menunggu Pencairan Termin I
	3.2.	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
		3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	7,57	1.334.238.050	6,09	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : * informasi update/progress perkembangan pasar rakyat bahwa Posisi saat ini sedang mempersiapkan penunjukan pihak ke 3 dalam membuat dokumen perencanaan dan administrasi pasar
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian yang												
	4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian											
		4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,33	0,33	33	30	2.028.952.739	29,48	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
	4.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy											
		4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,33	0,33	33	30	2.028.952.739	29,48	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
	4.3.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputy Bidang											
		4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,33	0,33	33	30	2.028.952.739	29,48	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET		PAGU	MEI						KETERANGAN
							TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENT ASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern												
	1.1.	Persentase Koperasi Berkualitas											
		1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17.225.000.000	0	0	0	21,13	4.697.101.482	27,27	1. Persiapan Pemkes dan Rdk Tindaklanjuti Hasil Pemkes 19 sd 21 mei 2023 2. Penanganan Koperasi Bermasalah : RDP dengan DPR, pemantauan pembayaran homologasi Dan pendampingan dalam pelaksanaan RAT
	1.2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi											
		1.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	0	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	14,69	2.591.075.850	11,83	1. Untuk Pasar Rakyat di Sumba Barat, 'Desain gambar sudah selesai dari pihak ketiga, sudah bertemu Bupati ada Bupati akan anggarkan terkait support kegiatan ,melalui dana APBD berupa sarana jalan dengan panjang 1 km dan lebar 5 meter ke arah pasar, serta adanya lahan parkir . Pihak desa Waingapu siap melakukan konekting listrik, Terkait Pasar Rakyat di Biak, baru menyusun tim perencanaan gambar desain pihak ketiga., dengan tindak lanjut pertanggal 12 mei 2023 akan dilakukan pendaftaran PBJ (Panita pengadaan barang jasa kab. Sumba. Pasar yang tadinya beroperasi 1 minggu 1 kali nantinya saat pasar ini jadi akan beroperasi 1 minggu 3 kali. Untuk Biak minggu depan tim akan ke Biak terkait koordinasi dengan percepatan proses lelang,memastikan support anggaran daerah untuk pasar. 2. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Sudah Melaksanakan Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan di Medan, TL : Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli 2023 3. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : Sudah Melaksanakan FGD Standarisasi/ Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Boyolali Jateng 4. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Sudah melakukan Bimtek Fasilitas Onboarding Produk koperasi di Boyolali Jateng 5. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : Sudah Melaksanakan Bimtek Kurasi Produk Koperasi di Malang, Jatim, TL : 'Bimtek kurasi produk koperasi akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2023 6. Dukungan Fasilitas Factory Sharing : Sudah Melakukan Verifikasi oleh tim verifikasi dari Asdep 1 dan Pengawas Koperasi ke RPB di Kab. Batubara Medan, Kab. Sukoharjo Jateng, Kab.Jembrana Bali, Kab. Pangkajene Kep. Sulsel, Kab. Sleman Yogyakarta. Surat Hasil verifikasi sudah dibuat oleh tim dan disampaikan ke Pak Asdep dan Pak Deputi. TL : Akan melakukan verifikasi ke Kab. Garut Jabar, Kab. Manggarai Barat NTT, Kab. Tanah Laut Kalsel. Dan rencana akan melakukan Bimtek ke 3 lokasi RPB tahun 2022. 7. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern :'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern dilaksanakan oleh pihak ketiga, termin 1 sudah dibayarkan 20% sebesar Rp 899,829,000, di tanggal 31 Mei sudah SP2D., TL : Termin 2 akan dibayarkan di bulan September sebesar 50% dan termin 3 akan dibayarkan di bulan November sebesar 30%
		1.2.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	27,76	1.597.954.304	27,32	1. Perizinan Berusaha Bagi KSP : identifikasi dan inventarisasi koperasi yang berminat akses KUR Klaster untuk anggota koperasi 2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sedang proses pengadaan barang dan jasa
	1.3.	Koperasi Modern											
		1.3.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	14,69	3	0	1. Untuk Pasar Rakyat di Sumba Barat, 'Desain gambar sudah selesai dari pihak ketiga, sudah bertemu Bupati ada Bupati akan anggarkan terkait support kegiatan ,melalui dana APBD berupa sarana jalan dengan panjang 1 km dan lebar 5 meter ke arah pasar, serta adanya lahan parkir . Pihak desa Waingapu siap melakukan konekting listrik, TL : Terkait Pasar Rakyat di Biak, baru menyusun tim perencanaan gambar desain pihak ketiga., dengan tindak lanjut pertanggal 12 mei 2023 akan dilakukan pendaftaran PBJ (Panita pengadaan barang jasa kab. Sumba. Pasar yang tadinya beroperasi 1 minggu 1 kali nantinya saat pasar ini jadi akan beroperasi 1 minggu 3 kali. Untuk Biak minggu depan tim akan ke Biak terkait koordinasi dengan percepatan proses lelang,memastikan support anggaran daerah untuk pasar. 2. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Sudah Melaksanakan Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan di Medan, TL : Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli 2023 3. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : Sudah Melaksanakan FGD Standarisasi/ Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Boyolali Jateng 4. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Sudah melakukan Bimtek Fasilitas Onboarding Produk koperasi di Boyolali Jateng 5. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : Sudah Melaksanakan Bimtek Kurasi Produk Koperasi di Malang, Jatim, TL : 'Bimtek kurasi produk koperasi akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2023 6. Dukungan Fasilitas Factory Sharing : Sudah Melakukan Verifikasi oleh tim verifikasi dari Asdep 1 dan Pengawas Koperasi ke RPB di Kab. Batubara Medan, Kab. Sukoharjo Jateng, Kab.Jembrana Bali, Kab. Pangkajene Kep. Sulsel, Kab. Sleman Yogyakarta. Surat Hasil verifikasi sudah dibuat oleh tim dan disampaikan ke Pak Asdep dan Pak Deputi. TL : Akan melakukan verifikasi ke Kab. Garut Jabar, Kab. Manggarai Barat NTT, Kab. Tanah Laut Kalsel. Dan rencana akan melakukan Bimtek ke 3 lokasi RPB tahun 2022. 7. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern :'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern dilaksanakan oleh pihak ketiga, termin 1 sudah dibayarkan 20% sebesar Rp 899,829,000, di tanggal 31 Mei sudah SP2D., TL : Termin 2 akan dibayarkan di bulan September sebesar 50% dan termin 3 akan dibayarkan di bulan November sebesar 30%
		1.3.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	0	0	0	27,76	2	0	1. Perizinan Berusaha Bagi KSP : identifikasi dan inventarisasi koperasi yang berminat akses KUR Klaster untuk anggota koperasi 2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sedang proses pengadaan barang dan jasa
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan												
	2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik											
		2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,42	0,42	41,5	36,31	2.455.269.868	35,67	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor *
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
	3.1.	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan											
		3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	100	p Masyarakat	6.500.000.000	0	0	0	58,54	751.983.807	11,57	'Telah dilaksanakan kegiatan di Kalbar, Nganjuk, dan Surabaya TL : mempersiapkan kegiatan di wilayah berikutnya

		3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27.200.000.000	0	0	0	6,02	1.073.129.900	3,95	1. Pelatihan Akutansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi: 'Proses Pencairan Termin I, TL : mempersiapkan pelaksanaan pelatihan di bulan Juni 2023 2. Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar : 'menunggu pembayaran termin 1 pada awal Juni 2023, TL : mempersiapkan pelaksanaan pelatihan untuk minggu ke-2 Juni di Makassar dan minggu ke-3 di Sumatera Utara 3. Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi : menunggu pembayaran termin 1 pada awal Juni 2023 , TL mempersiapkan pelaksanaan pelatihan di bulan Juni 2023
	3.2.	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
		3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	14,69	3	0	1. Untuk Pasar Rakyat di Sumba Barat, 'Desain gambar sudah selesai dari pihak ketiga, sudah bertemu Bupati ada Bupati akan anggarkan terkait support kegiatan ,melaut dana APBD berupa sarana jalan dengan panjang 1 km dan lebar 5 meter ke arah pasar, serta adanya lahan parkir . Pihak desa Waingapu siap melakukan konekting listrik, TL : Terkait Pasar Rakyat di Biak, baru menyusun tim perencanaan gambar desain pihak ketiga, dengan tindak lanjut pertanggal 12 mei 2023 akan dilakukan pendaftaran PBJ (Panita pengadaan barang jasa kab. Sumba. Pasar yang tadinya beroperasi 1 minggu 1 kali nantinya saat pasar ini jadi akan beroperasi 1 minggu 3 kali. Untuk Biak minggu depan tim akan ke Biak terkait koordinasi dengan percepatan proses lelang,memastikan support anggaran daerah untuk pasar. 2. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Sudah Melaksanakan Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan di Medan, TL : Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli 2023 3. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : Sudah Melaksanakan FGD Standarisasi/ Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Boyolali Jateng 4. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Sudah melakukan Bimtek Fasilitas Onboarding Produk koperasi di Boyolali Jateng 5. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : Sudah Melaksanakan Bimtek Kurasi Produk Koperasi di Malang, Jatim, TL : 'Bimtek kurasi produk koperasi akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2023 6. Dukungan Fasilitas Factory Sharing : Sudah Melakukan Verifikasi oleh tim verifikasi dari Asdep 1 dan Pengawas Koperasi ke RPB di Kab. Batubara Medan, Kab. Sukoharjo-Jateng, Kab.Jembrana Bali, Kab. Pangkajene Kep. Sulasel, Kab. Sieman Yogyakarta, Surat Hasil verifikasi sudah dibuat oleh tim dan disampaikan ke Pak Asdep dan Pak Deputi. TL : Akan melakukan verifikasi ke Kab. Garut Jabar, Kab. Manggarai Barat NTT, Kab. Tanah Laut Kalsel. Dan rencana akan melakukan Bimtek ke 3 lokasi RPB tahun 2022. 7. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern dilaksanakan oleh pihak ketiga, termin 1 sudah dibayarkan 20% sebesar Rp 899,829,000, di tanggal 31 Mei sudah SP2D., TL : Termin 2 akan dibayarkan di bulan September sebesar 50% dan termin 3 akan dibayarkan di bulan November sebesar 30%
	4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang											
	4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian											
		4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,42	0,42	41,5	36,31	2.455.269.868	35,67	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
	4.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi											
		4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,42	0,42	41,5	36,31	2	0	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
	4.3.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang											
		4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Movev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,42	0,42	41,5	36,31	2.455.269.868	35,67	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

		2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Money Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,5	0,5	50	40,55	2.742.242.591	39,84	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
	3.1.	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan											
		3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	100	Klp Masyarakat	6.500.000.000	7	7	7	70,32	903.323.807	13,9	1. Target semula 100 menjadi 20 Kelompok Masyarakat 2. Telah dilaksanakan kegiatan di Lhokseumawe 3. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan PMO dan Asdep 1 4. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan Inspektorat dan BPKP.
		3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27.200.000.000	0	0	0	13,28	2.365.025.809	8,69	1. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan PMO dan Asdep 1 2. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan Inspektorat dan BPKP.
	3.2.	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
		3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	23,35	3.417.070.234	15,61	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran - Posisi Sumba Barat : telah sudah ditetapkan pemenang lelang konstruksi hasil dr tim pengadaan barang dan jasa... Insallah senin minggu dpn sudah di lakukan eksekusi pembangunan di lokasi. Untuk Biak posisi progress saat ini sedang dimulai lelang konstruksinya. - akan melakukan kunjungan ke Biak di minggu ke 2 Juli untuk melihat kesiapan dan progress lelang konstruksi 2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan - kegiatan yang belum dilakukan adalah RDK Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Potensi Pangan Berdasarkan Sektor Usaha - rencana RDK Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Potensi Pangan Berdasarkan Sektor Usaha akan dilaksanakan pada bulan Agustus 3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan - perdin dan Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan belum dilaksanakan - Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 4. 'Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi - Kontraktual fasilitasi sertifikasi koperasi belum dijalankan , rencana bulan Oktober, dan perdin masih belum semua dijalankan 5. 'Perluasan Jaringan Usaha Koperasi - semua kegiatan yang belum dilaksanakan akan dicicil di bulan juli - desember 6. 'Dukungan Fasilitasi Factory Sharing - sebelumnya fokus melakukan verifikasi koperasi calon pengelola RPB di 11 titik lokasi RPB - untuk Bimtek dan perdin RPB baru akan dilaksnakan mulai bulan Juli 2023 7. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern - kegiatan sinergi baru mulai di bulan juni karena baru penyelesaian pembayaran termin 1 di akhir bulan Mei 2023 - kegiatan sinergi akan dilakukan sampai bulan November 2023, dan pembayaran dilakukan sebanyak 3 termin, termin 1 dibayarkan 20% di bulan Mei, termin 2 dibayarkan 50 % di bulan September, termin 3 dibayarkan 30 % di bulan November
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian yang												
	4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian											
		4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Money Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,5	0,5	50	40,55	2.742.242.591	39,84	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
	4.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy											
		4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Money Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,5	0,5	50	40,55	2.742.242.591	39,84	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
	4.3.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputy Bidang											
		4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Money Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,5	0,5	50	40,55	2.742.242.591	39,84	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET		PAGU	JULI						KETERANGAN
							TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENT ASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern												
	1.1.	Persentase Koperasi Berkualitas											
		1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17.225.000.000	0	0	0	34,59	5.490.573.172	31,88	1. Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi : pelatihan JFPK 2. Penanganan Koperasi Bermasalah : - Melakukan verifikasi dokumen uji kelayakan bakal calon pengurus dan pengawas KSP Sejahtera Bersama, - mengawal penanganan koperasi bermasalah 3. Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya : Pembahasan konsepsi RUU Perkoperasian terhadap UU cipta Kerja dan UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan 4. Pengawasan Koperasi : Bimtek Pemkes di Bandung
	1.2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi											
		1.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	0	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	30,86	4.515.778.184	20,63	1. Dukungan Fasilitas Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Sumba tidak ada kendala, pembangunan sudah sekitar 15 %, Biak masih proses lelang konstruksi 2. Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : akan dilaksanakan bimtek pengembangan usaha koperasi pangan tgl 10-12 Agustus di Solo 3. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : Masih progress on proses pembuatan surat rekomendasi koperasi calon pengelola RPB draft dari pak Deputi ke Pak Bupati, RDK Penyusunan Pedoman Pengelolaan RPB tgl 03-05 Agustus 2023 Bimtek RPB di lokasi Kab. Sukoharjo (minggu kedua Agustus) dan Kab. Manggarai Barat NTT (07-09 Agustus 2023)
		1.2.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	175	175	28	41,66	2.398.370.967	41	1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 2. Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan 3. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk penguatan usaha koperasi berbasis fasilitas teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi 4. Sosialisasi Akses Pemodaln bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 9 (sembilan) angkatan
	1.3.	Koperasi Modern											
		1.3.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	30,86	4.515.778.184	20,63	1. Dukungan Fasilitas Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Sumba tidak ada kendala, pembangunan sudah sekitar 15 %, Biak masih proses lelang konstruksi 2. Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : akan dilaksanakan bimtek pengembangan usaha koperasi pangan tgl 10-12 Agustus di Solo 3. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : Masih progress on proses pembuatan surat rekomendasi koperasi calon pengelola RPB draft dari pak Deputi ke Pak Bupati, RDK Penyusunan Pedoman Pengelolaan RPB tgl 03-05 Agustus 2023 Bimtek RPB di lokasi Kab. Sukoharjo (minggu kedua Agustus) dan Kab. Manggarai Barat NTT (07-09 Agustus 2023)
		1.3.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	175	175	28	41,66	2.398.370.967	41	1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 2. Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan 3. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk penguatan usaha koperasi berbasis fasilitas teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi 4. Sosialisasi Akses Pemodaln bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 9 (sembilan) angkatan
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan												
	2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik											
		2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,58	0,58	58,3	46,64	3.154.056.003	45,82	- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
	3.1.	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan											
		3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	100	Klp Masyarakat	6.500.000.000	0	0	0	75,97	975.878.807	15,01	"Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan PMO dan Asdep 1 2. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan Inspektorat dan BPKP."
		3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27.200.000.000	0	0	0	28,12	5.009.706.182	18,42	1. "Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi : Telah dilaksanakan kegiatan di Garut, Surabaya, Bali, Padang dan Ternate 2. Pelatihan Digitalisasi Bagi Koperasi : Telah dilaksanakan kegiatan di Malang
	3.2.	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
		3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	0	0	0	30,86	4.515.778.184	20,63	1. Dukungan Fasilitas Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Sumba tidak ada kendala, pembangunan sudah sekitar 15 %, Biak masih proses lelang konstruksi 2. Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : akan dilaksanakan bimtek pengembangan usaha koperasi pangan tgl 10-12 Agustus di Solo 3. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : Masih progress on proses pembuatan surat rekomendasi koperasi calon pengelola RPB draft dari pak Deputi ke Pak Bupati, RDK Penyusunan Pedoman Pengelolaan RPB tgl 03-05 Agustus 2023 Bimtek RPB di lokasi Kab. Sukoharjo (minggu kedua Agustus) dan Kab. Manggarai Barat NTT (07-09 Agustus 2023)

4) Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian yang													
4.1. Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian													
		4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,58	0,58	58,3	46,64	3.154.056.003	45,82	*. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor *
4.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy													
		4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,58	0,58	58,3	46,64	3.154.056.003	45,82	*. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor *
4.3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputy Bidang													
		4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	0,58	0,58	58,3	46,64	3.154.056.003	45,82	*. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor *

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET	PAGU	OKTOBER					KETERANGAN	
						TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENTASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASIAN ANGGARAN		(%)
1	1. Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern											
1.1	1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Berkeadilan											
	1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17,225,000,000	240	240	13.95	66	10,478,112,916	60.83	Implementasi Pengawasan Koperasi dengan Sistem Pengawasan : 200 dilakukan melalui onsite, 7 secara outside melalui OKR
1.2	1.2. Peningkatan Volume Usaha Koperasi											
1.2.1	Pengembangan dan pambuan perkeposasian	0	Koperasi	21,894,453,000	369	369	103.07	67.29	9,847,649,374	44.98	1. Dukungan Fasilitas Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : akan dilakukan monitoring setelah progress mencapai 90% dalam memastikan konstruksi sesuai dengan DED, mempersiapkan progress konstruksi sebelum berakhinya kontrak; 2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan kontraktual fasilitas sertifikasi produk koperasi untuk Tahun 2023 dibatalkan; 3. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : kegiatan Bisnis Matching baru dilaksanakan pada akhir November atau awal Desember, Kegiatan bisnis matching belum dilakukan; 4. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : 2 Bimtek akan di selenggarakan pada minggu ke 3 dan ke 4 Bulan November, Pedoman akan diselesaikan pada awal Desember, 2 Bimtek belum dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Jemberara, Pedoman tata kelola RPB dalam progress pelaksanaan; 5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Penegihan pada temin ke III kegiatan di tanggal 14 November 2023, Kegiatan temin III masih on progress	
1.2.2	Pembayaran dan Penjaminan Perkeposasian	625	Koperasi	5,850,000,000	175	175	28	67.75	4,916,890,549	84.05	1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pangan Dan Koperasi; 2. Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk pengatan modal koperasi pangan : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan; 3. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis pengimanan : Sudah dilaksanakan sebanyak 140 Koperasi; 4. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkutan usaha koperasi berbasis fasilitas teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi; 5. Pembiaran dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi; 6. Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 30 titik sudah selesai	
1.3	Koperasi Modern											
1.3.1	Pengembangan dan pambuan perkeposasian	358	Koperasi	21,894,453,000	369	369	103.07	67.29	9,847,649,374	44.98	1. Dukungan Fasilitas Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : akan dilakukan monitoring setelah progress mencapai 90% dalam memastikan konstruksi sesuai dengan DED, mempersiapkan progress konstruksi sebelum berakhinya kontrak; 2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan kontraktual fasilitas sertifikasi produk koperasi untuk Tahun 2023 dibatalkan; 3. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : kegiatan Bisnis Matching baru dilaksanakan pada akhir November atau awal Desember, Kegiatan bisnis matching belum dilakukan; 4. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : 2 Bimtek akan di selenggarakan pada minggu ke 3 dan ke 4 Bulan November, Pedoman akan diselesaikan pada awal Desember, 2 Bimtek belum dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Jemberara, Pedoman tata kelola RPB dalam progress pelaksanaan; 5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Penegihan pada temin ke III kegiatan di tanggal 14 November 2023, Kegiatan temin III masih on progress	
1.3.2	Pembayaran dan Penjaminan Perkeposasian	625	Koperasi	5,850,000,000	175	567	90.72	67.75	4,916,890,549	84.05	1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pangan Dan Koperasi; 2. Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk pengatan modal koperasi pangan : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan; 3. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis pengimanan : Sudah dilaksanakan sebanyak 140 Koperasi; 4. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkutan usaha koperasi berbasis fasilitas teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi; 5. Pembiaran dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi; 6. Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 30 titik sudah selesai	
2	2. Terwujudnya Kebijakan Perkeposasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi											
2.1	2.1.1. Model Koperasi Masyarakat Berkeadilan Layanan Publik											
	2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkeposasian	1	Layanan	6,883,340,000	0.83	0.83	83	60.14	4,066,777,394	59.08	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan Layanan rutin pengadministrasian keuangan Layanan rutin kepegawaian Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
2.2	2.2.1. Peningkatan Peningkatan Koperasi yang Efektif											
	2.2.1	Pengembangan SDM Perkeposasian dan Jabatan Fungsional	100	Mayor	6,500,000,000	25	25	25	86.95	1,142,548,807	17.58	Sisa anggaran masuk dalam Automatic Adjustment
	2.2.2	Pengembangan SDM Perkeposasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27,200,000,000	1593	1593	35.94	59.32	10,568,039,530	38.85	1. Pelatihan Penguatan Keterampilan dan Tatakelola Koperasi Modern (Sektor Non pangan) : Akan dilaksanakan kegiatan di Jogjakarta, Bandung dan Mataram 2. Pelatihan Auditing, Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi (sektor pangan) : Train dilaksanakan kegiatan pelatihan di Bandung 3. Pelatihan Digitalisasi Bagi Koperasi (Pelatihan Tematik-Jarak Jauh) : Masih dilaksanakan untuk sesi pendampingan insiasi Koperasi Multi Pihak
3	3. Tingkat Peningkatan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
3.2	Pengembangan dan pambuan perkeposasian	358	Koperasi	21,894,453,000	369	369	103.07	67.29	9,847,649,374	44.98	1. Dukungan Fasilitas Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : akan dilakukan monitoring setelah progress mencapai 90% dalam memastikan konstruksi sesuai dengan DED, mempersiapkan progress konstruksi sebelum berakhinya kontrak; 2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan kontraktual fasilitas sertifikasi produk koperasi untuk Tahun 2023 dibatalkan; 3. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : kegiatan Bisnis Matching baru dilaksanakan pada akhir November atau awal Desember, Kegiatan bisnis matching belum dilakukan; 4. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : 2 Bimtek akan di selenggarakan pada minggu ke 3 dan ke 4 Bulan November, Pedoman akan diselesaikan pada awal Desember, 2 Bimtek belum dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Jemberara, Pedoman tata kelola RPB dalam progress pelaksanaan; 5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Penegihan pada temin ke III kegiatan di tanggal 14 November 2023, Kegiatan temin III masih on progress	
4	4. Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Deputy Bidang Perkeposasian yang Efektif											
4.1	4.1.1. Model Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkeposasian											
	4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkeposasian	1	Layanan	6,883,340,000	0.83	0.83	83	60.14	4,066,777,394	59.08	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan Layanan rutin pengadministrasian keuangan Layanan rutin kepegawaian Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
4.2	4.2.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy											
	4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkeposasian	1	Layanan	6,883,340,000	0.83	0.83	83	60.14	4,066,777,394	59.08	Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan Layanan rutin pengadministrasian keuangan Layanan rutin kepegawaian Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
4.3	4.3.1. Nilai Efisiensi Kinerja Anggaran (EKA) Deputy Bidang											
	4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkeposasian	1	Layanan	6,883,340,000	0.83	0.83	83	60.14	4,066,777,394	59.08	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan Layanan rutin pengadministrasian keuangan Layanan rutin kepegawaian Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET	PAUJ	TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENTASE	STATUS PELAKSANAAN	SEPTEMBER		KETERANGAN	
									REALISASI ANGARAN	(%)		
1. Peningkatan Koperasi yang Berkuantitas dan Modern												
1.1. Peningkatan Koperasi Berkuantitas												
	1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17.225.000.000	81	81	4.71	61.11	9.701.945.568	56.32	1. Peningkatan Koperasi Bermutu: Melalui credit urip dan KSP Pundi arta sentra 2. Sosialisasi RUK Perkeperasan yang diselenggarakan melalui media online (website dan youtube) 3. Sosialisasi Undang-undang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan : Sosialisasi dg tema Koperasi Pasca UU P2SK 4. Peningkatan kompetensi melalui Fungsional Penguasa Koperasi : Kegiatan rutin pengabdian JPMK dan di kompetensi JPMK, LK Kompetensi B JPMK, O China Lulu"
1.2. Peningkatan Volume Usaha Koperasi												
	1.2.1	Pengembangan dan pemberian perkeperasan	0	Koperasi	21.894.453.000	344	344	96.09	59.49	8.706.708.204	39.77	1. Dukungan Fasilitas Realisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Untuk Sumber Barai pembangunan kontrakti sudah 59% untuk ikaiak Blak 25 % karena baru mulai pembangunan di tanggal 05 September 2023 2. Serifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : "Penyusunan Tatalaksana Serifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktober 3. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Bimbingan Teknis Pendampingan Onboarding Produk Koperasi di Sumut 4. Pengembangan Koperasi Pengrajin Berorientasi Export : Bimbingan Teknis Aspek Pasar Ekspor Produk Koperasi di Aceh 5. Pengembangan komoditas Koperasi Pengrajin substitusi impor : siala RDK Evaluasi Hasil Pengembangan Komoditas Koperasi Pengrajin Substitusi Impor , rencana akan dilaksanakan di bulan Oktober 6. Promosi Produk Koperasi Pengrajin melalui Business Matching , Showcase dan Pameran : pelaksanaan Showcasing sudah selesai di bulan Agustus, pembayaran di akhir bulan September , saat ini sedang on proses SP2D. Dan pelaksanaan Business Matching akan dilaksanakan di bulan November 2023 7. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produk Bersama : Bimbingan Teknis Peningkatan Usaha dan Aspek Pasar di NTT, Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Manajemen RPB di Kalab 8. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : kurang 1 temen lagi di bulan November sebesar Rp 1.350.598.500 sebesar 30 %
	1.2.2	Pembinaan dan Perjanjian Perkeperasan	620	Koperasi	5.850.000.000	175	175	28	57.7	4.187.032.424	71.57	1. Pelayanan Publik Terhadap Pemenuhan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pijipin : Sosialisasi Permenkop LKM no 6 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pijipin Oleh Koperasi 2. Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk pengatan modal koperasi pengin : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pengin 3. Pengembangan Asas dan Skema Pembiayaan Koperasi Pengin, berbasis pengalaman : penyusunan rancangan draft kepmen tentang penyusunan pjieman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB-KLUMM untuk penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat 4. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatn usaha koperasi berbasis fasilitas teknis dan pemenuhan buiditas : Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi 5. Pembiayaan dan Pengembangan Koperasi Syariah Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi 6. Sosialisasi Aspek Pemrosesan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 15 (lima belas) angktan
1.3. Koperasi Modern												
	1.3.1	Pengembangan dan pemberian perkeperasan	358	Koperasi	21.894.453.000	344	344	96.09	59.49	8.706.708.204	39.77	1. Dukungan Fasilitas Realisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Untuk Sumber Barai pembangunan kontrakti sudah 59% untuk ikaiak Blak 25 % karena baru mulai pembangunan di tanggal 05 September 2023 2. Serifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : "Penyusunan Tatalaksana Serifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktober 3. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Bimbingan Teknis Pendampingan Onboarding Produk Koperasi di Sumut 4. Pengembangan Koperasi Pengrajin Berorientasi Export : Bimbingan Teknis Aspek Pasar Ekspor Produk Koperasi di Aceh 5. Pengembangan komoditas Koperasi Pengrajin substitusi impor : siala RDK Evaluasi Hasil Pengembangan Komoditas Koperasi Pengrajin Substitusi Impor , rencana akan dilaksanakan di bulan Oktober 6. Promosi Produk Koperasi Pengrajin melalui Business Matching , Showcase dan Pameran : pelaksanaan Showcasing sudah selesai di bulan Agustus, pembayaran di akhir bulan September , saat ini sedang on proses SP2D. Dan pelaksanaan Business Matching akan dilaksanakan di bulan November 2023 7. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produk Bersama : Bimbingan Teknis Peningkatan Usaha dan Aspek Pasar di NTT, Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Manajemen RPB di Kalab 8. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : kurang 1 temen lagi di bulan November sebesar Rp 1.350.598.500 sebesar 30 %
	1.3.2	Pembinaan dan Perjanjian Perkeperasan	620	Koperasi	5.850.000.000	175	175	28	57.7	4.187.032.424	71.57	1. Pelayanan Publik Terhadap Pemenuhan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pijipin : Sosialisasi Permenkop LKM no 6 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pijipin Oleh Koperasi 2. Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk pengatan modal koperasi pengin : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pengin 3. Pengembangan Asas dan Skema Pembiayaan Koperasi Pengin, berbasis pengalaman : penyusunan rancangan draft kepmen tentang penyusunan pjieman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB-KLUMM untuk penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat 4. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatn usaha koperasi berbasis fasilitas teknis dan pemenuhan buiditas : Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi 5. Pembiayaan dan Pengembangan Koperasi Syariah Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi 6. Sosialisasi Aspek Pemrosesan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 15 (lima belas) angktan
2. Peningkatan Kualitas Perkeperasan yang Berkuantitas sesuai Tugas dan												
2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik												
	2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Bidang Perkeperasan	1	Layanan	6.883.340.000	0.75	0.75	75	56	3.787.124.354	55.02	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (trial anggran tahun 2023 dan penyusunan anggran kegiatan tahun 2024) 2. Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan 3. Layanan rutin pengadministrasian keuangan 4. Layanan rutin kangsawalan 5. Layanan rutin karsitas dan pusuasana karsitas "
3. Peningkatan Peningkatan Koperasi yang Efektif												
3.1. Peningkatan RUM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan												
	3.1.1	Pengembangan SCM Perkeperasan dan	100	Mayara	6.500.000.000	25	25	25	88.09	1.151.588.807	17.41	Sisa anggran masuk dalam Automatic Adjustment.
	3.1.2	Pengembangan SCM Perkeperasan dan	4432	Orang	27.200.000.000	1585	1583	35.94	41.05	7.312.319.538	26.88	Sisa anggran masuk dalam Automatic Adjustment.
3.2. Peningkatan Peningkatan Koperasi yang Efektif												
	3.2.1	Pengembangan dan pemberian perkeperasan	358	Koperasi	21.894.453.000	344	344	96.09	59.49	8.706.708.195	39.77	1. Dukungan Fasilitas Realisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Untuk Sumber Barai pembangunan kontrakti sudah 59% untuk ikaiak Blak 25 % karena baru mulai pembangunan di tanggal 05 September 2023 2. Serifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : "Penyusunan Tatalaksana Serifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktober 3. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Bimbingan Teknis Pendampingan Onboarding Produk Koperasi di Sumut 4. Pengembangan Koperasi Pengrajin Berorientasi Export : Bimbingan Teknis Aspek Pasar Ekspor Produk Koperasi di Aceh 5. Pengembangan komoditas Koperasi Pengrajin substitusi impor : siala RDK Evaluasi Hasil Pengembangan Komoditas Koperasi Pengrajin Substitusi Impor , rencana akan dilaksanakan di bulan Oktober 6. Promosi Produk Koperasi Pengrajin melalui Business Matching , Showcase dan Pameran : pelaksanaan Showcasing sudah selesai di bulan Agustus, pembayaran di akhir bulan September , saat ini sedang on proses SP2D. Dan pelaksanaan Business Matching akan dilaksanakan di bulan November 2023 7. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produk Bersama : Bimbingan Teknis Peningkatan Usaha dan Aspek Pasar di NTT, Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Manajemen RPB di Kalab 8. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : kurang 1 temen lagi di bulan November sebesar Rp 1.350.598.500 sebesar 30 %
4. Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Departemen Bidang Perkeperasan yang												
4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik												
	4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Bidang Perkeperasan	1	Layanan	6.883.340.000	0.75	0.75	75	56	3.787.124.354	55.02	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (trial anggran tahun 2023 dan penyusunan anggran kegiatan tahun 2024) 2. Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan 3. Layanan rutin pengadministrasian keuangan 4. Layanan rutin kangsawalan 5. Layanan rutin karsitas dan pusuasana karsitas "
4.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Output												
	4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Bidang Perkeperasan	1	Layanan	6.883.340.000	0.75	0.75	75	56	3.787.124.354	55.02	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (trial anggran tahun 2023 dan penyusunan anggran kegiatan tahun 2024) 2. Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan 3. Layanan rutin pengadministrasian keuangan 4. Layanan rutin kangsawalan 5. Layanan rutin karsitas dan pusuasana karsitas "
4.3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Output Bidang												
	4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Bidang Perkeperasan	1	Layanan	6.883.340.000	0.75	0.75	75	56	3.787.124.354	55.02	1. Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (trial anggran tahun 2023 dan penyusunan anggran kegiatan tahun 2024) 2. Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan 3. Layanan rutin pengadministrasian keuangan 4. Layanan rutin kangsawalan 5. Layanan rutin karsitas dan pusuasana karsitas "

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET	PAGU	NOVEMBER							
						TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENTASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern												
1.1	Peningkatan Koperasi Berkualitas												
1.1.1	Peningkatan Koperasi			3600	Koperasi	17,225,000,000	3930	3930	228.49	81.45	12,930,117,111	75.07	Pemkes sdh tercapai 1517, lalu penilaian close loop open loop sdh 40
1.2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi												
		1.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	0	Koperasi	21,894,453,000	369	369	103.07	79.86	11,687,808,081	53.38	1. 'Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha': Kegiatan berupa Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan lokasi di Medan dan Solo dan RDK 2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : kegiatan berupa FGD Standarisasi/Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Solo , RDK dan 'Sisa Perdin , akan dilaksanakan di bulan Desember lokasi Deli Serdang, Medan (sarung Minyak Makan Merah tgl 27 Desember 2023) 3. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Ekspor : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 99,22%, bimtek di Aceh, dan Perdin 4. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 98,78% (ada Kegiatan Showcase B Summit di Bali, Pameran di Solo, dan Business Matching tgl 01 Desember 2023 di Jakarta) 5. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Bersama : kegiatan berupa RDK dan Bimtek di 11 lokasi RPB, 'hanya bimtek RPB komoditas Kulit di kab. Garut yang belum dilaksanakan, rencana pelaksanaan di minggu ke 3 Desember 6. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern': Kegiatan berupa sinergi 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern
		1.2.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5,850,000,000	175	175	28	89.59	6,501,444,775	111.14	1. 'Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan': Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan 2. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan : Sudah dilaksanakan sebanyak 140 Koperasi 3. Pembiinan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi 4. Sosialisasi Akses Pemodaln bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 30 (tiga puluh) angkatan
1.3	Koperasi Modern												
		1.3.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21,894,453,000	369	369	103.07	79.86	11,687,808,081	53.38	1. 'Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha': Kegiatan berupa Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan lokasi di Medan dan Solo dan RDK 2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : kegiatan berupa FGD Standarisasi/Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Solo , RDK dan 'Sisa Perdin , akan dilaksanakan di bulan Desember lokasi Deli Serdang, Medan (sarung Minyak Makan Merah tgl 27 Desember 2023) 3. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Ekspor : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 99,22%, bimtek di Aceh, dan Perdin 4. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 98,78% (ada Kegiatan Showcase B Summit di Bali, Pameran di Solo, dan Business Matching tgl 01 Desember 2023 di Jakarta) 5. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : kegiatan berupa RDK dan Bimtek di 11 lokasi RPB, 'hanya bimtek RPB komoditas Kulit di kab. Garut yang belum dilaksanakan, rencana pelaksanaan di minggu ke 3 Desember 6. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern': Kegiatan berupa sinergi 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern
		1.3.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5,850,000,000	567	567	90.72	89.59	6,501,444,775	111.14	1. 'Pengembangan pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan': Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan 2. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan : Sudah dilaksanakan sebanyak 140 Koperasi 3. Pembiinan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi 4. Sosialisasi Akses Pemodaln bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 30 (tiga puluh) angkatan
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan												
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik												
		2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6,883,340,000	0.92	0.92	92	76.28	5,158,348,748	74.94	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
3.1	Peningkatan SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan												
3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional			100	Kip Masyarakat	6,500,000,000	27	27	27	89.95	1,142,548,807	17.58	Sisa anggaran masuk dalam Automatic Adjustment.
3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional			4432	Orang	27,200,000,000	4651	4651	104.94	77.27	16,247,687,569	59.73	1. Pelatihan Bagi Pengawas Internal Koperasi: Akan dilakukan Webinar Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Dalam Meningkatkan Trust Anggota Kepada Koperasi pada 14 Desember 2023 2. Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah: Akan dilakukan Webinar Dewan Pengawas Koperasi "Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pola Keuangan Syariah" pada tanggal 18-19 Desember 2023 3. Pelatihan Tematik-Jarak Jauh : Akan dilakukan Webinar Digitalisasi Koperasi "Menuju Koperasi Modern"
3.2	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi												
		3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21,894,453,000	369	369	103.07	79.86	11,687,808,081	53.38	1. 'Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha': Kegiatan berupa Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan lokasi di Medan dan Solo dan RDK 2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : kegiatan berupa FGD Standarisasi/Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Solo , RDK dan 'Sisa Perdin , akan dilaksanakan di bulan Desember lokasi Deli Serdang, Medan (sarung Minyak Makan Merah tgl 27 Desember 2023) 3. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Ekspor : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 99,22%, bimtek di Aceh, dan Perdin 4. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 98,78% (ada Kegiatan Showcase B Summit di Bali, Pameran di Solo, dan Business Matching tgl 01 Desember 2023 di Jakarta) 5. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : kegiatan berupa RDK dan Bimtek di 11 lokasi RPB, 'hanya bimtek RPB komoditas Kulit di kab. Garut yang belum dilaksanakan, rencana pelaksanaan di minggu ke 3 Desember 6. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern': Kegiatan berupa sinergi 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern

4) Meringkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian yang										
4.1.		Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian								
4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6,883,340,000	0.92	0.92	92	76.28	5,158,348,748	74.94
- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor										
4.2.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (RPFA) Deputy Bidang								
4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6,883,340,000	0.92	0.92	92	76.28	5,158,348,748	74.94
- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor										
4.3.		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputy Bidang Perkoperasian								
4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6,883,340,000	0.92	0.92	92	76.28	5,158,348,748	74.94
- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor										

MONITORING CAPAIAN KINERJA

NO	SASARA N	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	TARGET	PAGU	DESEMBER							
						TARGET	CAPAIAN OUTPUT	PERSENT ASE	STATUS PELAKSANAAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN	
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern												
	1.1.	Persentase Koperasi Berkualitas											
	1.1.1	Pengawasan Koperasi	3600	Koperasi	17.225.000.000	3930	3930	109,17	98	14.167.416.607	82,25	Kegiatan telah terlaksana	
	1.2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi											
	1.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	0	Koperasi	21.894.453.000	808	808	0	99,15	13.144.935.221	60,04	Target sudah tercapai sebanyak total 808 Koperasi	
	1.2.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	725	725	116	99,92	6.912.144.380	118,16	Target mengalami perubahan menjadi 725 Koperasi	
	1.3.	Koperasi Modern											
	1.3.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	808	808	225,7	99,15	13.144.935.221	60,04	Target Total mengalami perubahan menjadi 808 Koperasi	
	1.3.2	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	625	Koperasi	5.850.000.000	725	725	116	99,92	6.912.144.380	118,16	Target mengalami perubahan menjadi 725 Koperasi	
2	Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas												
	2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik											
	2.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	1	1	100	99,58	6.733.890.421	97,83	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor	
3	Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif												
	3.1.	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan											
	3.1.1	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	100	Klp Masyarakat	6.500.000.000	20	27	27	94,84	1.218.235.407	18,74	Target mengalami perubahan menjadi 20 Kelompok masyarakat Sisa anggaran masuk dalam Automatic Adjustment.	
	3.1.2	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	4432	Orang	27.200.000.000	4910	5776	130,32	97,52	20.749.061.888	76,28	Kegiatan telah selesai dilaksanakan Target mengalami perubahan menjadi 4910	
	3.2.	Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi											
	3.2.1	Pengembangan dan pembaruan perkoperasian	358	Koperasi	21.894.453.000	808	808	225,7	99,15	13.144.935.221	60,04	Target Total mengalami perubahan menjadi 808 Koperasi	
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian yang												
	4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perkoperasian											
	4.1.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	1	1	100	99,58	6.733.890.421	97,83	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor	
	4.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy											
	4.2.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	1	1	100	99,58	6.733.890.421	97,83	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor	
	4.3.	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputy Bidang											
	4.3.1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang Perkoperasian	1	Layanan	6.883.340.000	1	1	100	99,58	6.733.890.421	97,83	- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024) - Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan - Layanan rutin pengadministrasian keuangan - Layanan rutin kepegawaian - Layanan rutin sarana dan prasarana kantor	